

# ANALISIS PUTUSAN DIFABEL BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Penulis :

**Johanes Widijantoro**

**M. Syafi'ie**

**Tri Wahyu**

**Sarli Zuhendra**

## **Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum**

Penulis :

**Johanes Widiyantoro**

**M. Syafi'ie**

**Tri Wahyu**

**Sarli Zulhendra**

Tim Peneliti :

**Purwanti, M. Bahjadul Ulumudin, Himawan Sutanto, S.H.,**

**Roby Solahudin, Tutik Kurniawati, Yulianto**

Editor :

**Puguh Windrawan**

Cover & Layout :

**Gramasurya**

Penerbit

**SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel)  
Indonesia**

Jl. Kopral Samiyo 1 / Jl. Wonosari KM 8, Dsn Gamelan,  
Sendangtirto, Kec. Berbah, Sleman, Yogyakarta

Telp/fax: +62 274 2840056

Website: [www.sigab.or.id](http://www.sigab.or.id) ; [www.solider.or.id](http://www.solider.or.id)

ISBN : **978-602-70134-8-3**

Cetakan Pertama : 2019

**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari Penerbit



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

# **Sambutan**

atas Buku yang disusun dari Laporan  
Hasil Penelitian

## **“PUTUSAN KASUS-KASUS DIFABEL BERHADAPAN DENGAN HUKUM”**

Yang diselenggarakan oleh SIGAB dan didukung oleh  
Disability Rights Fund

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, didahului dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Komisi Yudisial menyampaikan selamat kepada SIGAB atas diterbitkannya buku “Putusan Kasus-Kasus Difabel Berhadapan Dengan Hukum” ini. Kami mengapresiasi dipublikasikannya hasil penelitian ini yang merupakan buah kerja keras periset SIGAB demi terwujudnya pembaruan penegakan hukum di Indonesia. Terutama untuk meletakkan dasar kebijakan hukum dan peradilan yang berperspektif pada pemenuhan hak-hak difabel Indonesia.

Komisi Yudisial turut bangga karena gagasan riset ini lahir dari hasil seminar yang diselenggarakan SIGAB bersama Komisi Yudisial pada tahun 2015. Berangkat dari kesadaran bahwa ada kekosongan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, buku ini merefleksikan situasi dunia peradilan dari perspektif kaum *different ability*.

Dengan menggunakan beberapa metode penelitian yang berbeda namun tetap berfokus pada studi putusan hakim, buku ini melengkapi hasil-hasil kajian sebelumnya tentang kasus – kasus difabel yang berhadapan dengan hukum. Komisi Yudisial terus meyakini bahwa informasi atau bahkan kritik yang terkait dengan putusan dari dunia peradilan sangat penting untuk disampaikan secara terbuka, karena perbaikan dimulai dari kepedulian publik dan bukan hanya dari kesadaran internal. Oleh karenanya, Komisi Yudisial mengharapkan buku ini dapat menjadi salah satu rujukan penting bagi para hakim dalam memutus perkara serupa sekaligus penyusunan kebijakan hukum dan peradilan yang berpihak pada difabel. Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat mendorong peningkatan integritas moral, kredibilitas dan profesionalisme penegak hukum, khususnya para hakim di Indonesia dalam mengadili kasus di mana para difabel terlibat di dalamnya.

Wassalammualaikum wr.wb.

**Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI**

Ttd

**Danang Wijayanto**

# Pengantar: Memahami Difabilitas

Muhammad Joni Yulianto

**D**alam beragam forum dan ruang diskusi, hampir tak ada perdebatan ketika difabel atau penyandang disabilitas dikategorikan sebagai kelompok yang rentan. Hampir semua orang dengan disiplin dan alasan yang berbeda, menyepakati keberadaan difabel sebagai kelompok rentan. Mereka dianggap atau diposisikan sebagai orang yang tidak beruntung. Terutama dalam menikmati hak dan kesempatan atas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, penghidupan yang layak, hingga akses terhadap keadilan dan hukum.

Setya Adi Purwanta (2013) dalam buku *The Vulnerable Group*, menegaskan bahwa konstruksi sosial kecacatan telah menjadi pemahaman yang dominan pada masyarakat kita. Ini berdampak

pada perilaku masyarakat, bahkan tatanan negara dan hukum yang tidak memposisikan difabel secara setara. Dalam konteks tatanan negara dan masyarakat sosial, perubahan dapat terjadi tak hanya dengan adanya perbaikan kebijakan, namun juga karena pergeseran pemahaman.

Pengistilahan dalam hal ini ternyata mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengkonstruksi pemahaman. Bersamanya melekat makna, persepsi, serta rekomendasi perilaku. Hal itulah yang terjadi dengan “cacat”, “penyandang disabilitas” dan “difabel”. Istilah “penyandang disabilitas” merupakan istilah pengganti dari istilah ‘penyandang cacat’ yang dulu lebih banyak digunakan. Istilah ini resmi digunakan di Indonesia semenjak diratifikasinya konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau *the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) pada November 2011. Diratifikasi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas.

Konvensi mendefinisikan “*persons with disabilities*” atau “penyandang disabilitas” sebagai “mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang”. Dalam interaksinya, dengan berbagai hambatan, dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. Perlu digarisbawahi, bahwa definisi ini menempatkan disabilitas (ketidakmampuan atau hambatan aktivitas) sebagai hasil dari interaksi antara keterbatasan fungsi fisik atau mental, dan faktor lingkungan, respon sosial, serta faktor yang lebih luas, yang mendukung hambatan atas ketidakmampuan tersebut.

Sebagai contoh, si A mengalami kaki layu. Ia mengalami disabilitas dalam kegiatan sehari-harinya. Itu terjadi ketika ia tak didukung dengan ketersediaan kursi roda, lingkungan

fisik yang mendukung aksesibilitas, serta lingkungan sosial yang menguatkan dan mendukung partisipasi sosialnya. Jika lingkungan merespon keberadaan si A secara positif dengan adanya sarana fisik yang aksesibel, alat bantu yang tersedia, serta masyarakat yang memberikan dukungan sosial secara baik, maka disabilitasnya dalam melakukan aktivitas menjadi bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali.

Contoh lain, saya kebetulan adalah seorang tuna netra. Tidak mungkin dapat menyelesaikan tulisan ini jika tidak ada sarana yang mendukung, seperti komputer dengan *software* pembaca layar. Dulu, orang serta merta menyimpulkan ketidakmampuan ketika melihat kondisi fungsi fisik yang tuna netra, kaki layu, atau bentuk kecacatan lainnya. Namun dengan adanya faktor lingkungan yang mendukung (teknologi komputer dengan *screen reader*), saya tak terkendala dengan hilangnya fungsi visual. Semua itu telah tergantikan oleh komputer dengan *screen reader*. Dengan demikian, disabilitas saya dalam membaca, menulis, dan menyerap serta mengolah informasi, menjadi teratasi dengan adanya *screen reader* tersebut.

### **Beberapa Pandangan tentang Disabilitas**

Seiring dengan perkembangan sejarah perubahan sosial dari masa ke masa, pemahaman orang terhadap keberadaan kelompok berkebutuhan khusus, penyandang cacat, penyandang disabilitas, penyandang ketunaan, maupun istilah lain yang dimaksudkan untuk merujuk subyek yang sama (dengan ideologi dan konsepsi yang berbeda) juga mengalami perubahan. Setidaknya ada dua konsepsi terkait dengan difabilitas ini, yaitu pandangan medis dan *social model*.

Pandangan medis (individual) melihat dan menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu. Secara

ringkas, pandangan ini menganggap kecacatan (*impairment*) sebagai sebuah tragedi personal. *Impairment* selalu diposisikan sebagai akar permasalahan serta penyebab atas hambatan aktivitas, serta berbagai bentuk ketidakberuntungan sosial yang dialami (Barnes, Colin, Mercer, Geof, 1996).

Bentuk aplikasi dari pemahaman model ini adalah digunakannya pendekatan rehabilitasi atau memampukan kembali (menormalkan). Ini sebagai pendekatan utama dalam mengatasi permasalahan disabilitas. Penyandang disabilitas dianggap sebagai '*center of the problem*'. Ketidakberfungsian (kerusakan fungsi fisik atau mental) yang terjadi pada individu dengan disabilitas, dianggap sebagai penyebab utama yang membutuhkan penyembuhan atau perbaikan. Ketika seseorang tak dapat bekerja, sulit diterima bergaul secara wajar, tak dapat diterima belajar di sekolah, yang dilihat adalah karena dia cacat. Situasi itu membuat dia tidak mampu dan perlu direhabilitasi. Demikianlah pandangan ini menempatkan penyandang disabilitas dalam sebuah lingkaran yang memisahkan mereka dari masyarakat. Malangnya, pandangan ini dianut dan menjadi pola kebijakan yang terstruktur. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat misalnya, mendefinisikan penyandang cacat sebagai "setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya..."

Sebagaimana yang dianut oleh pandangan medis, definisi ini juga menempatkan kecacatan atau kelainan fisik (mental) sebagai penyebab gangguan atau hambatan untuk beraktivitas. Artinya, menempatkan permasalahan disabilitas sebagai permasalahan individu yang cukup membutuhkan penanganan individu saja. Untuk itu, tak mengherankan jika kemudian banyak



terdapat peraturan-peraturan, yang entah disengaja atau tidak, menempatkan disabilitas sebagai masalah yang tidak dapat diterima.

Adapun pandangan selanjutnya adalah pandangan disabilitas yang terlahir atas dominasi konsepsi penyandang disabilitas dan bagaimana semestinya lingkungan sosial memandang diri mereka. Pandangan ini disebut dengan *social model*. Belakangan kemudian berkembang menjadi pandangan yang melihat disabilitas dalam pendekatan hak asasi manusia. Situasi ini dibangun atas sebuah prinsip dasar bahwa kecacatan (*impairment*) maupun keterbatasan fungsional, sesungguhnya tidak pernah mempunyai hubungan langsung terhadap apa yang dikatakan sebagai disabilitas (ketidakmampuan aktivitas), maupun juga partisipasi sosial (UPIAS 1996, Barnes, Mercer, 1996).

Disabilitas menurut pandangan ini dikarenakan kegagalan masyarakat, lingkungan, serta negara dalam mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas (UPIAS, 1996). Dengan kata lain, disabilitas yang dimaksud merupakan buah dari sebuah interaksi lingkungan yang gagal mengakomodasi keberadaan penyandang disabilitas. Dalam perkembangannya, isu disabilitas menjadi bagian tak terpisahkan dari isu hak asasi manusia. Berangkat dari salah satu prinsip, bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang secara alami melekat pada setiap manusia. Dengan begitu, kondisi sosial yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas, yang diakibatkan atas interaksi yang gagal tersebut, sudah seharusnya dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran hak.

Dengan kata lain, jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh, semestinya juga melekat pada setiap individu penyandang disabilitas. Langkah-langkah pemenuhan

hak dasar, sebagaimana diatur dalam berbagai dokumen resmi hak asasi manusia --untuk kelompok penyandang disabilitas akan lebih relevan jika merujuk pada CRPD-- juga semestinya dilakukan dengan memperhatikan prinsip *inter dependence*, *indivisibility* and *inter related of rights*. Jadi semua itu bisa dimaknai bahwa setiap hak bersifat terkait, tergantung, dan tak terpisahkan satu sama lain.

### **Perdebatan Pengistilahan di Indonesia: Lahirnya Konsep Difabel**

Meskipun tak sekuat yang terjadi di belahan dunia barat, di Indonesia konsep kecacatan (disabilitas/ difabilitas), juga terus berkembang. Terutama pada era tahun 90-an, ketika para aktivis difabel mulai menggagas penolakan atas istilah dan pemakaian istilah penyandang cacat. Sampai akhirnya memunculkan istilah difabel, sebagai akronim dari *differently abled people*.

Istilah “difabel”, yang pertama kali digagas oleh Mansour Fakih dan Setya Adi Purwanta (seorang difabel netra). Istilah itu bukanlah serta-merta merupakan pengganti dari istilah penyandang cacat. Gagasan ini merupakan perubahan konstruksi sosial dalam memahami difabilitas, atau yang saat itu dikenal sebagai kecacatan (penyandang cacat). Konsep kecacatan (penyandang cacat) yang setali tiga uang dengan pelabelan medis dan sosio psikologis, menurut saya, tak mampu menjawab beberapa pertanyaan kritis berikut.

Yang pertama, konsep kecacatan telah runtuh. Ia gagal melihat keberadaan faktor di luar individu sebagai bagian yang sangat menentukan dalam pencapaian aktualitas sosial seseorang. Pemaknaan “keterbatasan fungsi fisik dan atau mental”, “hambatan aktivitas”, serta “ketidakberuntungan sosial”

sebagai tiga hal yang mempunyai hubungan kausatif secara langsung, jelas telah mengabaikan faktor individu lain di luar keterbatasan tersebut. Di samping juga faktor lingkungan serta interaksi individu dengan lingkungan, yang telah nyata-nyata turut ambil bagian dalam melahirkan hambatan bagi difabel.

Yang ke dua, konsepsi kecacatan sangat dekat dengan faham “normalisme”. Didesain oleh para profesional medis dengan standar-standar keilmuan yang sepihak. Melalui standar-standar tersebut, mereka menempatkan orang-orang pada kategori normal dan tidak normal. Kemudian melabeli mereka yang dikatakan sebagai tidak normal tersebut dengan label tertentu dan merekomendasikan resep atau *treatment* tertentu.

Lalu bagaimana dengan mereka yang dikatakan normal? Yang kemudian meyakini stigma yang mereka labelkan kepada yang dianggap tidak normal, lalu memberikan sikap yang berbeda seperti *prejudice* dan diskriminasi misalnya? Apakah mereka, termasuk para profesional medis dan sosiologis itu, juga dapat dikatakan sebagai tidak normal? Akan lebih adil kiranya, jika kemudian ‘normalisme’ dipahami sebagai sebuah kewajaran. Setiap orang hidup wajar dalam harmoni dengan keberbedaannya masing-masing.

Yang ke tiga, konsepsi kecacatan dinilai tidak konsisten dengan nilai teologis yang menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan dengan derajat tertinggi. Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta tak pernah salah dengan ciptaan-Nya. Dengan melabelkan sekelompok orang sebagai yang cacat, hal itu berarti juga mengatakan bahwa Tuhan kurang sempurna dalam menciptakan sekelompok hambanya. Saya yakin, tak ada satupun pemuka agama manapun yang mau dikatakan bahwa Tuhannya telah ceroboh atau kurang teliti dalam menciptakan hamba-Nya.

Dengan melihat kritik atas konsepsi kecacatan di atas, istilah “difabel” coba ditawarkan. Ini dipandang lebih mampu mengakomodasi serangkaian kritik di atas. Disamping juga merupakan upaya untuk mendekonstruksi gambaran negatif dari konsepsi kecacatan atau penyandang cacat.

Yang pertama, pengistilahan difabel mencoba melepaskan hubungan kausatif antara keterbatasan fungsi (fisik atau mental), hambatan aktifitas, serta ketidakberuntungan sosial. Dengan kata lain, bahwa ke tiga hal tersebut boleh jadi berkaitan, namun bukan merupakan keterkaitan yang mutlak. Konsepsi difabilitas mengakui bahwa setiap individu mempunyai perbedaan, terlepas apakah dia difabel atau bukan. Sebagai konsekuensi dari perbedaan itu, sangat penting bagi lingkungan dan masyarakat untuk merespon positif bentuk perbedaan tersebut. Konsepsi ini juga mengakui realitas akan keterbatasan fungsi (fisik atau mental) sebagai suatu realitas yang normal.

Ke dua, konsepsi ini menggeser standar “normalisme” sebagai sebuah realitas. Berbeda dengan standar medis atau sosiologis, dimana normalisme didasarkan pada standar-standar mayoritas. Sementara yang berbeda (minoritas) dikatakan sebagai tidak normal. Dalam konsepsi difabilitas, standar kenormalan adalah realitas itu sendiri. Manusia dilahirkan sejatinya secara beragam.

Ketiga, konsepsi difabilitas tidak menempatkan satu kelompok sebagai yang inferior dan yang lain sebagai superior. Coba bandingkan dengan istilah *persons with disabilities* atau *disabled people* (istilah internasional), ataupun penyandang cacat, penyandang ketunaan dan penyandang disabilitas. Walaupun berbagai definisi telah dibuat, namun penggunaan kata-kata tersebut setidaknya tetap mempunyai makna inferior.

Istilah difabel secara obyektif dirasa lebih adil dengan mengedepankan pengakuan atas keberbedaan. Bukan ketidakmampuan atau kecacatan. ‘Penyandang disabilitas’ yang coba ditawarkan dan memperoleh legitimasi formal, juga tak lepas dari kritik bias inferioritas dan kenormalan. Berbeda dengan di daerah asalnya, di Indonesia tidak dikenal adanya tiga dimensi “*construction of disability*”, yaitu *impairment*, *disability* dan *handicap*, sehingga “disabilitas” pun tetap berada pada dimensi kecacatan (*impairment*).

Selain itu, penggunaan kata ‘penyandang’ yang menunjuk individu yang dilekati disabilitas, masih saja menempatkan individu difabel sebagai “*center of the problem*”. Melihat kritik tersebut, penggunaan istilah “difabel” atau “difabilitas”, lebih nyaman dilakukan. Dianggap sebagai alternatif terminologi yang lebih memanusiakan. Lebih mencerminkan kesetaraan dalam konteks Indonesia, sebagaimana amanah CRPD. Tetapi tentunya, ruang diskusi dan refleksi untuk terus menyempurnakan pengistilahan difabel sebagai sebuah konsepsi yang lebih matang perlu terus dibuka dan menjadi perdebatan yang tetap harus diakomodasi.

Pada akhirnya, uraian tulisan ini mengajak kita semua untuk memahami sebuah hal. Ketidakmampuan sejatinya bukanlah sesuatu yang secara alami melekat pada setiap atau kelompok orang tertentu, melainkan akibat dari pengabaian. Jika ‘*difference*’ atau perbedaan itu diketahui, dikenali dan diakomodasi, sejatinya tak ada lagi yang tidak mampu, yang ada hanyalah kemampuan dengan cara yang berbeda. Karenanya, mereka yang tuli, buta, maupun mempunyai hambatan mental atau intelektual, bukan berarti kecakapan hukum mereka terampas atas kondisi mereka. Dengan kata lain, struktur, substansi, serta perilaku hukum yang menyebabkan keberbedaan tersebut sebagai sebuah ketidakmampuan.



# Daftar Isi

## **SAMBUTAN KOMISI YUDISIAL RI—iii**

## **PENGANTAR: MEMAHAMI DIFABILITAS—v**

Beberapa Pandangan tentang Disabilitas—vii

Perdebatan Pengistilahan di Indonesia: Lahirnya

Konsepsi Difabel—x

## **DAFTAR ISI—xv**

## **BAB I PROLOG—1**

A. Landasan Berpikir—1

B. Apa yang Hendak Dijawab?—13

C. Tujuan dan Manfaat yang Akan Dicapai—13

## **BAB II RUANG LINGKUP PENELITIAN—15**

A. Jenis Penelitian—15

B. Pendekatan Penelitian—16

- C. Sifat Penelitian—17
- D. Sumber Data—17
- E. Metode Pengumpulan Data—18
- F. Metode Analisis Data—19
- G. Metode Pengambilan Kesimpulan—19
- H. Batasan Konsep—20

### **BAB III KEASLIAN PENELITIAN—21**

### **BAB IV STUDI DOKUMEN PERUNDANG-UNDANGAN —29**

- A. Undang-Undang Dasar 1945—30
- B. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia—32
- C. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik—35
- D. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas—38
- E. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas—45
- F. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)—50
- G. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPP)—54
- H. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan—55
- I. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak—57



- J. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak—61
- K. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik—63
- L. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung—65

## **BAB V ANOTASI PUTUSAN KASUS-KASUS DIFABEL BERHADAPAN DENGAN HUKUM —67**

- **Korban Kebejatan Oknum Guru**
  - Bermula dari Tayangan Video—70
  - Memakan Waktu Lama—74
  - Bagaimana Pembuktian Kasusnya?—75
  - Menelaah Putusan Selanjutnya—77
  - Pihak yang Terlibat dalam Perkara—79
- **Kejahatan Bermula Dari Sebuah Dompok**
  - Tendangan di Area Pekuburan—80
  - Perilaku Berbuah Derita—81
  - Tepatkah Penggunaan Pasal Pencurian?—82
  - Pihak yang Terlibat dalam Perkara—85
- **Peristiwa Pada Dini Hari**
  - Gerbang Kos yang Terbuka—86
  - Layakkah Hukuman Itu?—87
  - Pihak yang Terlibat dalam Perkara—90
- **Tindakan Tak Senonoh Pak Tua**
  - Perlakuan Kasar di Penginapan—91
  - Dakwaan Jaksa—92
  - Alat dan Barang Bukti—93
  - Fakta Soal Kekerasan dan Ancaman Kekerasan —94
  - Penggunaan Alat Bukti Petunjuk dan Surat—96
  - Pihak yang Terlibat dalam Perkara—97

- **Penolakan Yang Sia-Sia**
  - Bermula dari Kiriman Pesan —98
  - Dakwaan Jaksa—99
  - Surat dan Barang Bukti—101
  - Mengulik Pertimbangan Hakim—103
  - Pihak yang Terlibat dalam Perkara—105
- **Peristiwa di Kebun Bambu**
  - Rayuan Berujung Paksaan —106
  - Tuntutan Sepuluh Tahun Penjara—108
  - Dakwaan Jaksa—109
  - Surat dan Barang Bukti—111
  - Bagaimana dengan Sanksi Berupa Denda?—113
  - Pihak yang Terlibat dalam Perkara—115
- **Rudapaksa Pekerja Jalan Tol**
  - Awalnya Mencari Kopi—116
  - Dakwaan Jaksa—117
  - Surat dan Barang Bukti—119
  - Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim—120
  - Pihak yang Terlibat dalam Perkara—122
- **Ulah Tak Beradab Sang Ayah**
  - Kejadian pada Dini Hari—123
  - Dakwaan Jaksa—124
  - Surat dan Barang Bukti—125
  - Tafsiran Ulang Hakim—125
  - Pihak yang Terlibat dalam Perkara—129
- **Perilaku Miring Pak Tani**
  - Ketahuan Lantaran Hamil —130
  - Dakwaan Jaksa—132
  - Surat dan Barang Bukti—133
  - Peran Pendamping Layak Diapresiasi—134
  - Pihak yang Terlibat dalam Perkara—138

**BAB VI EPILOG—139**

- A. Beragam Pandangan Soal Disabilitas—140
- B. Hambatan Penanganan Kasus —140
- C. Peluang Guna Mendorong Penyelesaian Kasus—147
- D. Rekomendasi Penanganan Kasus—151

**BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI—155**

- A. Kesimpulan—155
- B. Rekomendasi—157

**DAFTAR PUSTAKA—159****BIOGRAFI —163**



# BAB I

## Prolog

### A. Landasan Berpikir

**A**langkah menariknya apabila penegakan hukum didekati menggunakan tiga hal, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Meski hal ini tak mudah lantaran penegak hukum di Indonesia masih banyak yang menganut paham positivisme. Apa bunyi pasal dalam aturan, itulah hukum. Adagium jenis ini akan memisahkan hukum dari nilai moral. Paham ini sama sekali terlepas dari perkembangan jaman dan teknologi manusia. Padahal, satu yang musti diingat: perkembangan jaman termasuk teknologi dan pengetahuan, selalu melesat lebih cepat dari aturan atau undang-undang itu sendiri.

Secara teknis, asas legalitas formil terumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas ini mengutamakan kepastian hukum (*legal certainty*). Ia dianggap sebagai satu-satunya pegangan dalam menegakkan hukum pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pemidanaan.

Dari segi ini bisa dilihat kasat mata, keadilan adalah urusan prosedural dan sangat formal. Yang penting prosedurnya tercapai dengan benar, maka keadilan dianggap sudah tercapai. Soal substansi atau isi dari keadilan itu sendiri, ibaratnya bukan menjadi pokok masalah yang hendak digapai.

Apakah ini berpengaruh pada hakim yang hendak mengambil keputusan? Jelas ada. Hakim akan kesulitan mencari dan menemukan hukum. Tidak semua perkara yang akan ia putuskan ada di undang-undang. Dengan meminjam doktrin Fungsionalisme Kaum Realis, mustinya hakim mampu menciptakan hukum. Istilahnya adalah *judge made law*. Hakim adalah pembentuk hukum untuk setiap perkara yang dihadapkan padanya.

Ini sejajar dengan apa yang diutarakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto.<sup>1</sup> “Hakim sebaiknya mengimbuhkan suatu pertimbangan pribadi yang sifatnya *extra-legal*. Pandangan di luar logika-logika hukum,” tulisnya. Dengan begitu, keputusan-keputusan yang dibuat akan lebih bermanfaat bagi kehidupan. Pengalaman yang tersimak dalam kehidupan akan lebih mampu menjawab persoalan hukum daripada sekedar bersandar pada logika-logika hukum semata. Holmes, perintis aliran realisme dalam ilmu hukum di Amerika Serikat, memadankan situasi ini dengan ungkapan: *the life of law has not been logic, it is experience*.

Hakim adalah pembentuk keadilan, bukan sekedar pembentuk hukum. Jadinya, peran hakim sangat strategis. Tak bisa dilepaskan dari persoalan akses keadilan masyarakat. Dalam hukum internasional, akses keadilan adalah konsep yang luas. Konsep ini mencakup, akses masyarakat terhadap sistem, prosedur, informasi dan lokasi yang digunakan dalam

---

<sup>1</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, (tanpa tahun), “Mengkaji dan Meneliti Hukum dalam Konsepnya sebagai Realitas Sosial”, artikel lepas, hlm. 9.

administrasi peradilan.<sup>2</sup> Mereka yang merasa diperlakukan tak adil atau dirugikan, dipersilahkan untuk mendapatkan ganti rugi. Selain itu, orang juga berhak untuk berpartisipasi secara langsung, misalnya bertindak sebagai saksi atau juri dalam persidangan.<sup>3</sup>

Dalam pandangan Takdir Rahmadi, akses keadilan meliputi ketersediaan asas hukum, norma-norma hukum materiil dan formil. Secara teknis, hal ini disertai dengan kebijakan lembaga peradilan untuk menyediakan fasilitas bagi para pencari keadilan.<sup>4</sup> Konsep ini juga dapat ditelusuri pada Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten atas tindakan yang melanggar hak-hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang

(Pasal 8 DUHAM)

Memang pada kenyataannya, masyarakat belum memperoleh keadilan secara merata. Ini yang juga menjadi dasar, mengapa lahir pemikiran mengenai akses keadilan. Kelompok miskin, buta huruf dan tidak berpendidikan, seyogyanya juga mendapatkan akses

---

<sup>2</sup> Janet E. Lord et. al., (2012), *Human Rights Yes! Action and Advocacy on the Rights of Person with Disabilities*, 2nd edition, Minneapolis: University of Minnesota Human Right Center.

<sup>3</sup> Stephanie Ortoleva, (2011), "Inaccessible Justice: Human Rights, Person with Disabilities and the Legal System", *ILSA Journal of International & Comparative Law*, Vol. 17:2 (Spring), hlm. 284.

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, (2011), "Akses Menuju Keadilan", Makalah disampaikan pada Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkas Medan, 2-5 Mei 2011 dan diselenggarakan oleh Pusham UII, Komisi Yudisial dan NCHR.

melalui lembaga peradilan.<sup>5</sup> Seorang ahli yang bekerja untuk akses keadilan perempuan menyoroti hal ini melalui tiga hal, yaitu (a) keadilan substantif, yang menyangkut penilaian terhadap klaim hak yang tersedia bagi mereka yang mencari pemulihan; (b) aspek prosedural, yang berfokus pada peluang dan hambatan untuk membuat orang mengajukan tuntutan ke pengadilan atau forum penyelesaian konflik lainnya dan (c) komponen simbolis akses terhadap keadilan yang melangkah keluar dari doktrin hukum dan meminta sejauh mana rezim hukum tertentu mempromosikan hak dan pemberdayaan warga negara.<sup>6</sup>

Dari pendapat itu bisa dilihat secara seksama. Akses keadilan tak hanya bicara soal hukum substantif (hukum materiil) dan hukum prosedural (hukum formil) semata. Ada juga soal kebijakan penegak hukum, terutama bagi hakim. Hakim misalnya, bisa memberikan akses keadilan dengan cara memberikan fasilitas atau akomodasi bagi pencari keadilan. Dengan begitu, dibutuhkan hakim yang tak semata-mata mampu membaca aturan. Ia juga musti bisa merasakan dan mencerna rasa keadilan masyarakat.

Penekanan pada prosedur atau hukum formil bisa jadi membelenggu para hakim. Mereka terjebak pada pekerjaan untuk mengadili. Hal yang lambat laun menjadi rutinitas (*bussiness as usual*). Beban kerja, rutinitas dan formalisme seringkali membuat hakim tak sadar tentang nilai-nilai keadilan di sekitarnya. “Sistem pengadilan telah dipenuhi dengan pengacara yang buas, hakim yang ganas dan pegawai dengan beban kesibukan yang tinggi sehingga tidak dapat menyediakan prosedur yang adil,” kritik Warren Burger.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Stephanie Ortoleva, *op.cit.*, hlm. 284.

<sup>7</sup> J. Djohansyah, (2010), “Akses Menuju Keadilan”, makalah disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial Bandung, diselenggarakan oleh



Apayang dikatakan Warren Burger agak mengerikan memang. Jika benar demikian gambarannya, bagaimana nasib para pencari keadilan? Terlebih bagi mereka yang terpinggirkan atau dikategorikan sebagai kelompok rentan? Sama halnya dengan penyandang disabilitas atau difabel. Lalu, apa yang akan terjadi di dalam peradilan pada saat mereka harus berhadapan dengan proses hukum sementara situasi peradilan masih sedemikian rupa? Akankah difabel memperoleh akses keadilan dan hak-hak hukumnya terpenuhi? Satu yang pasti. Difabel, bagaimanapun juga, akan menghadapi berbagai permasalahan untuk mencari keadilan.

Ada sebuah fakta yang tak bisa dipungkiri. Difabel seringkali menemui hambatan tatkala berusaha untuk mendapatkan akses peradilan. Ada perilaku diskriminatif yang diperlihatkan oleh penegak hukum. Tentu saja ini sangat berkaitan dengan cara pandang. Aparat penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, masih menganut perspektif, “siapa yang normal dan siapa yang tidak normal.” Ini tentu merugikan difabel. Padahal ada prinsip *equality before the law*. Prinsip yang mengamanatkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum.<sup>8</sup>

Banyak kasus dimana difabel belum mendapatkan perlakuan yang layak di pengadilan. Tak hanya berkaitan dengan sarana fisik, namun juga soal prosedur. Sarana fisik dibangun tanpa mempertimbangkan kepentingan difabel untuk bergerak. Prosedur di pengadilan juga demikian. Masih ditafsirkan secara tekstual sehingga menghalangi difabel untuk mengaksesnya. Aparat penegak hukum bahkan berperilaku tak ramah. Ini menyebabkan difabel lagi-lagi menjadi korban ketidakadilan. Saat difabel

---

Pusham UII, Komisi Yudisial dan NCHR, hlm. 1.

<sup>8</sup> Nurul Qomar, (2012), *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratie Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta.

berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku, hak-haknya banyak yang tercerabut. Ini ditambah dengan dukungan sistem peradilan sangat minim. Dengan kata lain, saat berhadapan dengan hukum, difabel mengalami diskriminasi.<sup>9</sup>

Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities/ CRPD*). Tujuan mendasar dari penyusunan konvensi ini ialah untuk memajukan, melindungi, menjamin penikmatan secara penuh dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua difabel dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.

Konvensi ini menegaskan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama.<sup>10</sup> Lebih lanjut, terdapat pula kewajiban negara untuk mencegah semua diskriminasi atas disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang sama dan efektif bagi difabel terhadap diskriminasi dengan fundamental alasan apa pun.<sup>11</sup>

Pasal 13 ayat (1) dan (2) CRPD menyatakan dua hal. *Pertama*, Negara-Negara Pihak wajib menjamin secara efektif akses difabel pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian pengaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif difabel sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua

---

<sup>9</sup> Pugu Windrawan (ed), (2015), *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>10</sup> Pasal 5 ayat (1) UN CRPD.

<sup>11</sup> Pasal 5 ayat (2) UN CRPD.

persidangan, termasuk dalam penyelidikan dan tahap-tahap awal lainnya. *Kedua*, dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi difabel, Negara-Negara Pihak wajib meningkatkan pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

Konvensi ini juga memastikan bahwa difabel harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.<sup>12</sup> Pengaturan ini memberi batasan jelas. Praktik difabel berhadapan dengan hukum yang kerap diperlakukan secara tidak manusiawi, direndahkan martabatnya dan dipojokkan dengan alasan disabilitas, tidak boleh terulang. Dengan mengacu pada fakta bahwa negara sudah mengakui hak-hak difabel dalam sebuah peraturan, maka menelaah penerapannya di lapangan menjadi penting untuk dilakukan. *Das sollen* (hukum sebagai kenyataan normatif) memang seringkali berbeda dengan *das sein* (hukum sebagai kenyataan empiris).

Praktik hukum, termasuk di dalamnya praktik penegakan hukum, seringkali berjalan tak sesuai harapan. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Ini bisa terjadi lantaran ketidakcakapan aparat penegak hukum, minimnya sarana dan pra sarana, aturan hukum yang belum lengkap, sampai pada keengganan masyarakat untuk berproses di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada butir-butir Konvensi CRPD dan dilatarbelakangi oleh gambaran penegakan hukum di Indonesia.

Titik paling penting dari penelitian ini juga terletak pada upaya untuk mengetahui dinamika penegakan hukum. Lebih khusus pada jawaban atas pertanyaan, bagaimana penegak

---

<sup>12</sup> Pasal 15 ayat (1) dan (2) UN CRPD.

hukum menangani dan mengadili kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan difabel? Di tengah keterbatasan peraturan, penelitian ini ingin mengetahui reaksi penegak hukum, terutama hakim, dalam menangani dan mengadili kasus-kasus difabel. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan dan menganalisa praktik hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus yang melibatkan difabel.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menjadi bagian dari langkah strategis untuk pembaharuan hukum di Indonesia. Secara jujur, Indonesia belum memiliki kebijakan hukum dan peradilan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak difabel. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Mahkamah Agung dalam seminar yang diselenggarakan Komisi Yudisial Republik Indonesia pada 31 Agustus 2015, dengan tajuk “Ayo Kerja! Wujudkan Peradilan Bersih yang Beretika dan Profesional”. Dalam forum itu dinyatakan bahwa memang ada kekosongan hukum bagi difabel yang berhadapan dengan hukum. Dan pada tahap selanjutnya, penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan dasar yang kuat guna merealisasikan gagasan penyusunan peraturan Mahkamah Agung (perma) tentang difabel berhadapan dengan hukum.

Penelitian atas putusan kasus-kasus difabel ini merupakan penelitian dengan perspektif *socio-legal*.<sup>13</sup> Meskipun kegiatan ini dinamai putusan pengadilan, namun kajian atas putusan-putusannya hanyalah salah satu dari beberapa metode

---

<sup>13</sup> Studi *socio-legal* dipandang sebagai alternatif interdisipliner dan tantangan terhadap studi doktrinal hukum. Kata “*socio*” dalam studi *socio-legal* tidak mengacu pada sosiologi atau ilmu sosial, namun mewakili ‘sebuah antarmuka dengan konteks di mana hukum ada’. Studi *socio-legal*, di sisi lain, sering menggunakan sosiologi (dan ilmu sosial lainnya) tidak begitu banyak untuk analisis substantif, namun sebagai alat untuk pengumpulan data. Itulah sebabnya, ketika peneliti *socio-legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka cenderung tidak membahas masalah sosiologi atau ilmu sosial lainnya, tetapi hukum dan studi hukum. Lihat Reza Banakar, dan Max Travers, (2005), *Theory and Methods in Socio-Legal Research*, Oxford: Hart, hlm. xi-xii.

pengumpulan data yang digunakan. Metode pengumpulan data lainnya meliputi, studi dokumen, yakni kajian regulasi dan hukum positif yang relevan dengan pokok permasalahan. Sedangkan untuk menggali pengalaman dan permasalahan aktor-aktor kunci dalam menghadapi kasus-kasus difabel, dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). Adapun untuk memperdalam dan menggali informasi penting dari beberapa aktor kunci digunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*). Secara berturut-turut, tim peneliti mengorganisasi pengumpulan data dengan pertama-tama melakukan studi dokumen, selanjutnya mengumpulkan putusan-putusan pengadilan terkait untuk kemudian dilakukan kajian atau analisis, dilanjutkan dengan FGD serta diakhiri dengan wawancara mendalam.

Tujuan penelitian ini adalah mengungkap fakta-fakta hukum dalam proses peradilan kasus-kasus difabel maupun faktor-faktor yang melingkupinya. Persoalannya memang terletak pada cara pandang aparat penegak hukum. Ini ditambah dengan tidak adanya mekanisme yang secara khusus mengatur prosedur atau sistem peradilan bagi difabel. Oleh karenanya, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan perspektif difabel bagi aparat penegak hukum dan aktor-aktor kunci lainnya.

Pasal 35 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur sebuah hal yang janggal. Disebutkan pada pasal itu, proses peradilan pidana bagi difabel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Ini tentu saja mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan ini dengan jelas membatasi bahkan menutup kemungkinan para penegak hukum untuk mengembangkan perspektif difabel dalam menjalankan tugas dan perannya.

KUHAP yang telah berusia 36 tahun itu sama sekali tidak memiliki perspektif disabilitas.

Ada kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang lama, sebelum ratifikasi UNCPRD, dengan perundang-undangan yang baru. Peraturan yang lama masih berperspektif *charity-based*. Sedangkan yang diundangkan belakangan sudah menekankan *rights-based*. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi pengambil kebijakan untuk segera mengharmonisasi peraturan-peraturan yang ada. Bahkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah yang panjang. Ada amanat untuk melahirkan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari berlakunya undang-undang tersebut.

Adapun di dalam konteks kajian putusan ditemukan beberapa fakta hukum yang menarik. Beberapa yang bisa diketemukan adalah:

Fakta yang Merugikan	Fakta yang Menguntungkan
<p>Majelis hakim tidak menafsirkan bahwa korban, khususnya difabel dengan retardasi mental, sebagai orang yang tidak berdaya. Dampaknya, Pasal 286 KUHP dianggap tidak terbukti</p> <p>Pasal 286 KUHP: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan isterinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”</p>	<p>Majelis hakim memperbolehkan seorang juru bahasa dari lingkungan terdekat korban untuk menjadi seorang penerjemah. Ia diambil sumpahnya terlebih dahulu.</p>

<p>Majelis hakim tidak secara spesifik menguraikan dampak atau kerugian yang dialami korban dengan latar belakang sebagai difabel. Sama halnya dengan tuntutan jaksa. Dengan begitu, majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi tidak mempertimbangkan disabilitas korban.</p>	<p>Majelis hakim cukup memahami kerentanan yang ada pada seorang anak difabel, termasuk retardasi mental.</p>
<p>Korban tidak mendapatkan pendamping dan penerjemah yang memadai.</p>	<p>Majelis hakim memberikan penafsiran baru. Ukuran atas ancaman kekerasan dilihat dari sudut pandang korban, bukan pelaku.</p>
<p>Penasihat hukum tidak berhasil memberikan gambaran utuh tentang disabilitas terpidana. Selain itu, penasihat hukum juga tidak menghadirkan <i>profile assesment</i> ke muka persidangan.</p>	
<p>Masih terbatasnya pengetahuan majelis hakim tentang <i>hidrosipalus</i> dan lumpuh. Pada sisi lain, tidak ada bukti medis yang dihadirkan oleh jaksa untuk memberi gambaran tentang <i>hidrosipalus</i> dan lumpuh tersebut.</p>	
<p>Tidak adanya laporan psikologis atau <i>profile assesment</i>. Hal ini dijadikan celah bagi pengacara terdakwa untuk mengatakan bahwa anak dengan retardasi mental dianggap tidak cakap memberikan keterangan di persidangan.</p>	
<p>Majelis hakim masih menafsirkan kekerasan secara sempit. Setiap kekerasan harus diiringi dengan suatu perlawanan dari korban, termasuk jika korbannya mental retardasi.</p>	

Selain itu, muncul juga hambatan dari hasil berbagai pengalaman melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Mulai dari penegak hukum, aparat desa, keluarga korban, masyarakat, bahkan pendamping. Masih diperlukan kerja keras dan dukungan berbagai pihak untuk meningkatkan akses keadilan bagi difabel. Selanjutnya, melalui hasil penelitian ini telah direncanakan langkah lanjutan. Langkah tersebut berupa diseminasi hasil penelitian. Langkah ini diambil sebagai sarana mendesak pengambil keputusan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan hukum yang berpihak dan memperkuat akses keadilan difabel. Secara teknis, hasil penelitian ini bisa dipergunakan untuk membuat *policy brief* difabel berhadapan dengan hukum dan menggunakannya sebagai media advokasi.

Perjuangan difabel untuk memperoleh haknya seringkali memakan waktu yang lama. Hal yang sama juga terjadi negara maju. Di Inggris misalnya, kelompok disabilitas harus berjuang lebih dari satu dekade untuk mendapatkan legislasi yang berprespektif anti diskriminasi. Mereka bahkan telah mempersiapkan rancangan yang disusun untuk disetujui di parlemen. Persoalannya, ketika Aturan Tentang Diskriminasi Disabilitas (*Disability Discrimination Act*) diundangkan pada tahun 1995, banyak aktivis hak-hak disabilitas kecewa. Demikian juga sejarah hukum yang diskriminatif di Amerika Serikat. Di negara tersebut, pertarungan legislasi untuk kesetaraan membutuhkan lebih dari satu undang-undang.<sup>14</sup> Berdasarkan pengalaman tersebut, kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara, khususnya difabel, harus terus didorong. Didesakkan terus menerus.

---

<sup>14</sup> BJ Doyle sebagaimana dikutip oleh Theresia Degener, "A Global Comparison of Anti Discrimination Law", dalam Anna Lawson dan Caroline Gooding (ed), (2005), *Disability Rights in Europe from Theory to Practice*, Oregon: Hard Publishing, hlm. 90.



## B. Apa yang Hendak Dijawab?

Penelitian yang fokus pada isu difabel yang berhadapan dengan hukum ini merumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah perlindungan hukum bagi difabel dalam tataran yuridis normatif?
- Bagaimanakah penegak hukum, khususnya hakim, dalam memeriksa dan mengadili kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum?
- Problematika dan kendala apa saja yang dihadapi oleh difabel ketika terlibat bahkan mengalami persoalan ini?
- Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penanganan dan penyelesaian kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum?

## C. Tujuan dan Manfaat yang Akan Dicapai

Tabel dibawah ini akan menguraikan apa saja hal-hal yang hendak dikaji dalam penelitian

Tujuan	Manfaat
Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi difabel dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.	Dapat mengembangkan pengetahuan dan perspektif difabilitas bagi aparat penegak hukum dan aktor-aktor kunci lainnya.
Untuk mengetahui bagaimanakah penegak hukum, khususnya hakim, dalam memeriksa dan mengadili kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum.	Dapat mendorong para penegak hukum untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus kasus-kasus penyadang disabilitas berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan agar tidak menjadi putusan yang kontroversial sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.

Untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh difabel ketika terlibat dan bahkan mengalami persoalan hukum.	Dapat menjadi sarana dan masukan bagi pengambil keputusan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan hukum yang berpihak dan memperkuat akses keadilan bagi difabel.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan dan penyelesaian kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum.	

## BAB II

# Ruang Lingkup Penelitian

### A. Jenis Penelitian

**P**enelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal), khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua. Hal ini dilakukan untuk mengkaji kualitas dari putusan pengadilan atas kasus-kasus difabel dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah ketiga dan keempat, digunakan jenis penelitian hukum non-doktrinal. Mengutip pandangan Sutandyo Wignjosoebroto,<sup>1</sup> jenis penelitian ini mengkonsepkan hukum sebagai gejala yang berada, bergerak atau beroperasi di dunia empiris.

---

<sup>1</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, hlm. 10.

Hukum akan menampakkan diri sebagai fakta alami yang tunduk kepada keajegan-keajegan (*regularities*) atau keseragaman-keseragaman (*uniformities*).

Dalam konteks ini, bagaimana hukum bekerja, dilihat dalam realitas kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, perspektif yang digunakan adalah perspektif *socio-legal*.

Kata “*socio*” dalam studi *socio-legal* tidak mengacu pada sosiologi atau ilmu sosial. Studi *socio-legal*, di sisi lain, sering menggunakan sosiologi dan ilmu sosial lainnya, namun tidak begitu banyak untuk analisis substantif. Pendekatan itu hanya dilakukan sebagai alat untuk pengumpulan data. Itulah sebabnya, ketika peneliti *socio-legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka cenderung tidak membahas masalah sosiologi atau ilmu sosial lainnya, tetapi lebih berkonsentrasi pada hukum dan kajian hukumnya.<sup>2</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan hukum yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mencoba memaparkan dan menganalisa peraturan perundangan dan putusan pengadilan atas kasus-kasus difabel. Pemaparan akan disertai dengan kajian terhadap permasalahan, hambatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, hasil kajian dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan.

---

<sup>2</sup> Reza Banakar dan Max Travers, *op.cit.*, hlm. xi-xii.

### C. Sifat Penelitian

Penelitian ini berpijak pada penelitian deskriptif analitis. Penelitian akan mendeskripsikan instrumen hukum dan putusan pengadilan dalam konteks akses keadilan bagi difabel. Supaya penelitian ini lebih lengkap, maka akan ditambah dengan gambaran praktik hukum yang dipahami dan dialami oleh pihak-pihak terkait, baik itu penegak hukum, aparat desa, tokoh masyarakat, pendamping, maupun keluarga difabel yang berhadapan dengan hukum.

### D. Sumber Data

Bahan Hukum Primer	Bahan Hukum Sekunder
Undang-Undang Dasar 1945.	Dua puluh dua putusan pengadilan kasus difabel dan bahan hukum lain, seperti kepustakaan ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian, khususnya yang berkaitan dengan isi penelitian.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	
Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.	
Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas.	
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	
Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	

### E. Metode Pengumpulan Data

Meskipun dinamakan penelitian putusan pengadilan, namun kajian atas putusan kasus-kasus difabel hanyalah salah satu dari beberapa metode pengumpulan data yang digunakan. Kajian putusan ini sebagai suatu langkah untuk mengetahui bagaimana hakim memeriksa dan memutus kasus-kasus tersebut. Akan dipilih dua puluh dua putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pada keragaman persoalan hukum yang ada.

Selanjutnya, dianalisis dan dikritisi dengan fokus pada kajian terhadap pertimbangan hukum hakim, baik materiil maupun formil, aksesibilitas dan *reasonable* akomodasi serta sanksi yang diputuskan hakim. Dua puluh dua putusan tersebut secara geografis mewakili wilayah peradilan di DIY: Bantul, Sleman dan Gunung Kidul serta Jawa Tengah: Solo, Boyolali dan Sukoharjo. Selanjutnya, dengan metode anotasi putusan (*legal annotations*), dari ke dua puluh dua putusan tersebut, kajian

terhadap putusan kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum dilakukan terhadap sembilan putusan pengadilan.

Metode pengumpulan data lainnya meliputi studi dokumen, yakni kajian regulasi dan hukum positif yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Sedangkan untuk menggali pengalaman dan permasalahan aktor-aktor kunci dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, pengumpulan data dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). FGD melibatkan tokoh masyarakat, keluarga difabel, pendamping, aparat dusun atau desa dan aparat penegak hukum. FGD pertama dilakukan dengan peserta dari keluarga difabel, pendamping dan aparat dusun atau desa. Untuk FGD yang kedua, melibatkan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim serta pendamping, organisasi difabel dan aparat desa atau dusun.

Kegiatan FGD dipilih dengan tujuan menggali pendapat dan pengalaman peserta, kendala yang dihadapi serta peluang dan terobosan yang diusulkan. Adapun untuk memperdalam dan menggali informasi penting dari beberapa aktor kunci, digunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), antara lain dilakukan dengan keluarga difabel, tokoh masyarakat, aparat dusun atau desa serta penegak hukum.

## **F. Metode Analisis Data**

Sesuai dengan permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka masalah kebijakan dan regulasi yang terkait dengan perlindungan hak-hak difabel dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk kajian putusan pengadilan, dilakukan dengan metode anotasi putusan (*legal annotations*).

## G. Metode Pengambilan Kesimpulan

Semua bahan hukum yang telah terkumpul dan telah diurutkan sedemikian rupa, selanjutnya dilakukan analisis dan diinterpretasi. Setelah itu dilakukan pengambilan kesimpulan. Sebagai upaya untuk mempermudah analisis normatif, maka dipergunakan metode *content analysis*, yaitu analisis isi terhadap semua bahan hukum yang berupa dokumen hukum dilakukan. Selanjutnya pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

## H. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang dipergunakan dan perlu untuk ditegaskan makna atau konsep yang dimaksudkan oleh peneliti. Beberapa istilah tersebut adalah:

1. Difabel, yang dimaksudkan dengan difabel dalam penelitian ini maknanya sama dengan apa yang dimaksudkan dengan “*persons with disabilities*” dalam UNCPRD dan “penyandang disabilitas” dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Putusan kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum, yang dimaksudkan adalah dua puluh dua putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan difabel sebagai korban. Kasusnya telah diputuskan oleh pengadilan di wilayah hukum Propinsi DIY dan Jawa Tengah dan telah ditentukan oleh peneliti.
3. Perlindungan hukum difabel, maksudnya adalah penghormatan dan pemenuhan hak-hak hukum difabel oleh penegak hukum dalam proses pemeriksaan atau persidangan atas kasus yang melibatkan difabel.



## BAB III

# Keaslian Penelitian

**S**epengetahuan tim peneliti, belum ada penelitian yang menelaah putusan pengadilan kasus difabel berhadapan dengan hukum. Demikian halnya dengan studi putusan hakim terkait hal itu, yang kemudian diperkaya dengan studi dokumen, *indept interview* dan menggali konteks di balik sebuah putusan hakim. Penelitian putusan difabel berhadapan dengan hukum belum banyak dilakukan. Jika ada, fokus penelitiannya berbeda.

Di antara produk penelitian dan buku yang terkait dengan ini adalah buku *“Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara”*. Buku ini merupakan publikasi penelitian yang dilakukan SIGAB. Isinya terkait pemenuhan hak-hak difabel yang menjadi korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Buku ini fokus meneliti terhadap dua kasus disabilitas perempuan dan anak. Kasus pertama terjadi di Sukoharjo, dimana korbannya adalah seorang difabel perempuan dan mengalami retardasi mental.

Satu kasus lagi terjadi di Solo. Korbannya sama: perempuan dan mengalami retardasi mental.

Dalam buku itu dikatakan bahwa praktik penyidikan tindak pidana dengan korban “Bunga” di Sukoharjo tergolong sukses. Penyidik cukup terbuka. Ia menerima cara pandang baru dengan menghadirkan penerjemah. Ia juga mau menerima keterangan saksi korban yang disampaikan melalui kalender pribadi. Pada tahap penuntutan, jaksa juga bersikap sama. Mereka menggunakan pasal perkosaan untuk menjerat terdakwa, meskipun saksi korban tetap tidak diakui sebagai saksi korban anak-anak lantaran umur kalendernya sudah di atas 18 tahun. Pada tahap persidangan, hakim telah memperhatikan kebutuhan saksi korban, pendamping hukum dan penerjemah. Namun demikian, proses persidangan perkara “Bunga” di Sukoharjo belum sepenuhnya ideal. Secara umum belum mengakomodir sisi psikologis saksi korban dan belum menjamin sepenuhnya hak-hak saksi korban yang *notabene* seorang penyandang disabilitas perempuan. Apalagi ia juga mengalami retardasi mental.

Sedangkan kasus disabilitas yang terjadi di Solo, praktik penyidikan harusnya dinyatakan batal demi hukum. Proses penyidikan dilakukan bukan oleh penyidik, tetapi oleh penerjemah yang sejak pertama kali sudah memiliki prasangka negatif kepada korban. Difabel perempuan yang menjadi korban tindak pidana di Solo, tidak terpenuhi hak-haknya. Ia tidak didampingi penasihat hukum dan tidak diproses oleh penyidik. Jaksa dan hakim tidak memahami disabilitas. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam proses hukum bahkan umumnya merendahkan saksi korban.

Buku penelitian SIGAB ini meromendasikan agar difabel yang menjadi korban tindak pidana dan perkaranya diproses dalam persidangan, maka proses peradilannya mesti berpedoman pada kebutuhan dasar korban. Beberapa ketentuan normatif dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) yang dipergunakan penegak hukum, musti direvisi. Khususnya terkait definisi anak. Seharusnya bisa mengakomodasi pertimbangan umur mental. Selain itu, disabilitas yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan pendampingan hukum dan penerjemah. Keberadaan mereka tentu sangat berpengaruh kepada proses peradilan yang *fair* bagi difabel.

Secara umum, penelitian SIGAB yang telah dibukukan ini berbeda dengan penelitian terkait “*Putusan Pengadilan Kasus Difabel Berhadapan dengan Hukum*” yang juga dilakukan oleh lembaga SIGAB. Penelitian terbaru akan fokus mengkaji putusan-putusan hakim, norma-norma yang dirujuk hakim dan proses hukum yang melatarbelakangi putusan-putusan yang diambil oleh seorang hakim.

Penelitian kedua, yang setidaknya terkait dengan topik penelitian adalah “*Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*”. Buku ini ditulis oleh Pusham UII. Buku ini didasarkan pada penelitian di Surakarta, Yogyakarta dan Makassar terkait dengan aksesibilitas peradilan, jaminan prosedur hukum dan perilaku penegak hukum. Dalam buku itu diuraikan beberapa hal.

*Pertama*, cara pandang baru terhadap penegak hukum terkait penanganan difabel berhadapan dengan hukum.

*Kedua*, difabel dan kajian teoritis hak asasi manusia.

*Ketiga*, peradilan yang *fair* dan hubungannya dengan difabel.

*Keempat*, pendekatan sosial dalam memahami disabilitas dan implikasinya terhadap klasifikasi disabilitas yang mendasarkan pada hambatan.

*Kelima*, aplikasi kategori hambatan terhadap pemenuhan hak atas peradilan yang *fair* bagi difabel, yang berproses dalam peradilan pidana.

Buku Pusham UII berkontribusi secara praktis. Buku itu menggambarkan bagaimana semestinya penegak hukum bersikap pada saat menangani perkara disabilitas berhadapan dengan hukum. Buku ini juga sangat detail mengemukakan beberapa hambatan disabilitas. Tertulis di dalamnya, hambatan tersebut meliputi hambatan sarana prasarana fisik dan mobilitas, hambatan perilaku, hambatan hukum dan prosedur, hambatan sumber daya serta hambatan teknologi, informasi dan komunikasi. Berangkat dari hambatan-hambatan yang ada, penyidik, jaksa dan hakim dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan *afirmatif* dan progresif. Tujuannya agar proses peradilan bagi difabel berhadapan dengan hukum berjalan secara *fair*. Buku ini juga mengemukakan panduan aksesibilitas peradilan yang bisa dijadikan rujukan untuk mendorong peradilan yang aksesibel.

Secara umum, buku Pusham UII ini berbeda dengan penelitian terkait “*Putusan Pengadilan Kasus Difabel Berhadapan dengan Hukum*” yang dilakukan SIGAB. Penelitian ini fokus mengkaji putusan-putusan hakim, norma-norma yang dirujuk hakim dan proses hukum yang melatarbelakangi putusan-putusan yang diambil oleh seorang hakim.

Buku penelitian ketiga terkait topik penelitian ini adalah buku “*Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas Indonesia*” yang diterbitkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Buku ini mengkaji perkembangan isu disabilitas dalam aspek hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Buku ini menguraikan dengan cukup baik bahwa cara pandang kebijakan dan perundang-undangan di Indonesia terhadap isu disabilitas masih menggunakan pendekatan lama, yakni pendekatan medis dan *charity based*. Dengan pendekatan ini, disabilitas masih dianggap sebagai kelompok

yang tidak beruntung dan tidak mampu bersaing. Anggapan negatif terhadap disabilitas dikarenakan kebijakan pemerintah hanya fokus pada kondisi fisik atau ketidakmampuan. Padahal, disabilitas adalah bagian dari keragaman masyarakat.

Disabilitas adalah bagian dari warga negara yang dijamin pemenuhan hak-haknya. Disabilitas juga hadir sebagai hasil dari interaksi masyarakat dan kondisi di lingkungan sosial.

Secara umum, buku yang diterbitkan PSHK ini mempunyai kontribusi penting. Sudah selayaknya, pendekatan pengaturan hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas, diubah. Yang semula dimulai dari cara pandang pandang *charity based* dengan pendekatan medis, menjadi cara pandang *rights-based* dengan pendekatan sosial. Dengan demikian, buku ini juga berbeda dengan penelitian “*Putusan Pengadilan Kasus Difabel Berhadapan dengan Hukum*”. Penelitian PSHK fokus pada penelitian permasalahan pendekatan peraturan perundangan-undangan. Sementara penelitian ini akan fokus mengkaji putusan-putusan hakim, norma-norma yang dirujuk hakim dan proses hukum yang melatarbelakangi putusan-putusan yang diambil oleh seorang hakim.

Penelitian terkait disabilitas berhadapan dengan hukum juga dilakukan Noviani Arum Lestari dalam skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila: Studi Putusan Nomor 244/Pid.2013/P.T Smg*”. Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan buku penelitian SIGAB yang berjudul “*Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*”. Kasusnyanya yang diteliti sama, yaitu kasus difabel anak di Sukoharjo yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo. Perbedaannya, penelitian Noviani Arum Lestari fokus mengkaji putusan hakim. Skripsi itu menyatakan bahwa kepolisian dan

kejaksaan masih tertatih dan kurang memperhatikan hak-hak korban. Perlindungan terhadap saksi dan korban seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masih belum terpenuhi. Di antara faktornya adalah keterbatasan ahli dan semua jenis perlindungan difabel tidak dapat dikontekstualisasi kepada difabel yang menjadi korban tindak pidana.

Penelitian yang dilakukan Noviani juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh SIGAB terkait *“Putusan Pengadilan Kasus Difabel Berhadapan dengan Hukum”*. Penelitian Noviani fokus satu putusan. Tidak demikian dengan penelitian putusan milik SIGAB. Putusan hakim yang diteliti lebih banyak dan melacak latar belakang konteks sosial yang mempengaruhi putusan hakim.

Penelitian disabilitas berhadapan dengan hukum juga dilakukan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI). Mereka membukukan hasil penelitiannya dengan judul *“Difabel dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan”*. MaPPI FH UI menganalisa putusan hakim dan mengemukakan tiga rumusan masalah. *Pertama*, apakah korban difabel hadir bersama penerjemah dalam persidangan? *Kedua*, apakah majelis hakim mempertimbangkan keterangan ahli mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku difabel? *Ketiga*, apakah hakim mempertimbangkan usia kalender atau usia mental?

Dalam penelitian ini, MaPPI FH UI membuat kesimpulan tiga hal.

*Pertama*, berdasarkan hasil perbandingan lima putusan ditemukan adanya dua varian putusan terkait penerjemah, yakni (1) pemberian penerjemah tercantum dalam putusan dan (2) tidak tercantum nama penerjemah dan diduga tidak didampingi penerjemah.

*Kedua*, berdasarkan hasil perbandingan lima putusan ditemukan adanya tiga varian putusan yang berbeda dalam memandang kekuatan keterangan ahli dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, yakni (1) keterangan ahli dijadikan satu-satunya landasan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, (2) pengamatan hakim dapat mengesampingkan keterangan ahli, dan (3) keterangan ahli dengan pengamatan hakim merupakan instrumen yang saling mendukung.

*Ketiga*, berdasarkan hasil perbandingan lima putusan, seluruh putusan tidak mempertimbangkan usia mental korban. Hakim justru menganggap korban sebagai orang dewasa sehingga pelaku dihukum atas pasal dalam KUHP.

Penelitian yang dilakukan MaPPI FH UI di atas juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh SIGAB terkait “*Putusan Pengadilan Kasus Difabel Berhadapan dengan Hukum*”. Penelitian di atas mengkaji beberapa putusan dan fokus pada tiga rumusan masalah, sedangkan penelitian SIGAB, putusan hakim yang diteliti lebih banyak dan melacak latar belakang dan konteks sosial yang mempengaruhi terhadap putusan hakim. Penelitian SIGAB tidak semata-mata meneliti putusan hakim, tetapi juga dokumen hukum dan konteks sosial yang mempengaruhi terhadap putusan (*socio-legal research*).





## **BAB IV**

# Studi Dokumen Perundang- Undangan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas lewat Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. Peraturan itu mengatur hak-hak difabel, termasuk didalamnya dijabarkan bagaimana difabel seharusnya diperlakukan saat berhadapan dengan hukum. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk mengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak difabel di Indonesia.

Berikut perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan difabel pada saat berhadapan dengan hukum.

## A. Undang-Undang Dasar 1945

Pasca reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengalami perubahan sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Setelah perubahan itu, isinya mengalami perombakan mendasar. Utamanya bagi perkembangan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pasal tentang hak asasi manusia terletak pada bab tersendiri, yaitu Bab XA. Di dalamnya terdapat 26 butir ketentuan yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Di antara dampak perubahan UUD 1945 adalah penegasan bahwa setiap orang tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya difabel, berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

UUD 1945 juga mengemukakan tentang perlunya perlakuan khusus dan hak untuk mendapatkan kemudahan guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini memberi mandat terkait difabel berhadapan dengan hukum untuk dibuatkan peraturan yang bersifat *lex specialis* atau khusus, seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan pengaturan terkait hak-hak perempuan.

Pengaturan yang bersifat khusus sangat penting bagi difabel. Beberapa varian dan hambatan difabel sangat kompleks. Tidak cukup dengan proses hukum sebagaimana mekanisme

---

<sup>1</sup> Sri Hastuti PS, (2005), *Perlindungan HAM dalam Empat Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum No. 1 Vol. 1, Universitas Islam Indonesia, hlm. 21-23.

standar yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Butuh cara dan metode yang spesifik untuk mewujudkan peradilan yang *fair* bagi difabel ketika berhadapan dengan hukum.

Ketentuan khusus itu setidaknya ditegaskan pada Pasal 28H ayat (2). Dinyatakan dalam pasal itu bahwa, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*”

UUD 1945 juga mengakui bahwa setiap orang harus diakui sebagai pribadi manusia di hadapan hukum. Selama ini, persoalan diskriminasi kerap menimpa difabel, khususnya dalam hubungan keperdataan. Persoalannya adalah tidak diakui difabel sebagai pribadi. Difabel ditempatkan di bawah pengampuan. Akibatnya, difabel biasa tidak mendapatkan hak waris, tidak dapat mengikuti asuransi, tidak bisa menjadi pihak dalam hubungan keperdataan dan seterusnya.<sup>2</sup> Dalam konflik-konflik keperdataan dan pidana, difabel kerap dikesampingkan karena statusnya yang tidak diakui sebagai pribadi manusia di hadapan hukum. Padahal jelas termaktub di UUD 1945 bahwa hal itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apa pun (*non derogable rights*).<sup>3</sup>

Selama ini difabel berhadapan dengan hukum juga biasa

---

<sup>2</sup> M. Syafi’ie, (2015), *Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif kepada Difabel*, Jurnal Difabel Edisi II, hlm. 164.

<sup>3</sup> Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa, “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Hal ini dimulai dari perilaku para penegak hukumnya, sarana prasara peradilan yang tidak aksesibel, sampai dengan proses hukum yang tidak mendasarkan pada hambatan difabel. Terkait hal ini, UUD 1945 telah menegaskan larangan praktik diskriminasi.<sup>4</sup> Secara prinsip, UUD 1945 juga mengatur bahwa sistem hukum di Indonesia harus dijalankan dengan proses yang *fair*, layak dan mendasarkan pada kepentingan hak asasi manusia. Karena itu, praktik penegakan hukum yang diskriminatif sebenarnya bertentangan dengan ketentuan hukum dasar di Indonesia.

## **B. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Peraturan ini merupakan merupakan alat pokok yang menjamin semua hak yang tercantum di berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Di dalamnya memuat pengakuan dan perlindungan hak-hak yang sangat luas. Banyak ketentuannya yang merujuk pada kategorisasi hak yang ada dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional, Konvensi Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan beberapa instrumen lainnya. Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Terkait difabel berhadapan dengan hukum, undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan dengan mandat UUD 1945. Ada penegasan bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak atas

---

<sup>4</sup> Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28I ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Undang-undang ini menyatakan larangan praktik diskriminasi atas nama apa pun dan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.<sup>5</sup>

Undang-undang ini juga menegaskan bahwa setiap orang harus diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum.<sup>6</sup> Karena itu, difabel berhadapan dengan hukum dalam kasus apa pun harus diposisikan sebagai subyek hukum. Difabel mesti diakui sebagai manusia. Ia setara dengan umat manusia pada umumnya dan tidak menjadikan difabilitas sebagai penghalang untuk berperkara dan untuk mendapat jaminan perlindungan secara hukum.<sup>7</sup>

Undang-undang ini juga mengatur hak-hak kelompok. Hak tersebut wajib diberikan dan mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus, baik dalam pemberian pelayanan jasa, penyediaan fasilitas dan sarana prasarana untuk menjamin kelancaran, keamanan, kesehatan dan keselamatan. Kelompok rentan yang disebutkan dalam undang-undang ini meliputi difabel, lansia, wanita hamil, dan anak-anak.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pada ayat (3) dinyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

<sup>6</sup> Pasal 4 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

<sup>8</sup> Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa, “setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, yang meliputi pemberian pelayanan, jasa atau penyediaan

Dalam hal ini, difabel berhadapan dengan hukum mempunyai legitimasi setidaknya dalam dua hal. *Pertama*, penyediaan sistem peradilan yang cocok berdasarkan hambatan-hambatan difabel. Sistem peradilan khusus, seperti peradilan anak menjadi penting untuk diwujudkan. Ada kebutuhan yang spesifik terhadap ketersediaan sumber daya penegak hukum yang mengerti disabilitas. Di samping itu, harus tersedia juga prosedur hukum yang sesuai dengan hambatan disabilitas dan layanan peradilan yang harus memahami etiket berinteraksi dengan difabel. *Kedua*, soal sarana prasarana yang aksesibel dan desain bangunan yang mesti bisa digunakan semua orang (*universal design*).

Undang-undang ini turut mengatur warga negara yang berusia lanjut. Difabel berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>9</sup> Dalam konteks hukum, menjadi penting bahwa difabel juga berhak mendapatkan bantuan hukum yang dananya dibiayai dan ditanggung oleh negara.

Secara umum, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan jaminan terhadap

---

fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan dan keselamatan.

<sup>9</sup> Pasal 42 menyatakan bahwa, "setiap warga negara yang berusia lanjut cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada pasal 54 dinyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

peradilan yang *fair*, penyediaan sarana prasarana yang aksesibel dan pengakuan kesetaraan difabel berhadapan dengan hukum. Semua itu merupakan tanggungjawab negara untuk memenuhinya.

Namun demikian, undang-undang ini masih memiliki kelemahan, khususnya terkait penyebutan yang masih menggunakan sebutan atau istilah penyandang cacat.

Istilah ini banyak dikritik karena stigmatik dan memberi label negatif kepada difabel. Sebutan “penyandang cacat” juga telah diganti dengan sebutan “penyandang disabilitas” dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016.

### **C. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik**

Ini adalah satu perjanjian pokok internasional tentang hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia meratifikasinya pada tahun 2005 melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Dalam kovenan ini ditegaskan bahwa Negara-Negara Pihak yang telah meratifikasi kovenan berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan melaksanakan hak-hak yang dijamin di dalamnya. Termasuk mewajibkan untuk mengambil langkah-langkah dan atau upaya, baik administrasi, yudisial atau legislatif, yang dijamin dalam kovenan.

Terkait dengan hukum, Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan majelis hakim. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak atas pemeriksaan yang adil di depan hukum, pengadilan yang mandiri dan tidak berpihak. Pasal 14 ayat 1 berbunyi: “*Semua orang mempunyai kedudukan*

*yang setara di depan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadap dirinya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum...”*

Pada Pasal 14 ayat (3) juga dinyatakan bahwa dalam penentuan tindak pidana, setiap orang tanpa terkecuali berhak atas jaminan minimum dalam persamaan yang penuh meliputi:

Untuk segera diberitahu secara terperinci dalam bahasa yang ia mengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.

Untuk mendapat waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara yang dipilihnya sendiri.

Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.

Untuk diadili dengan kehadirannya dan untuk membela dirinya secara sendiri atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahu tentang haknya atas bantuan hukum apabila ia tidak mempunyai pembela dan untuk mendapatkan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian dan tanpa pembayaran darinya apabila ia tidak memiliki cukup sarana untuk membayarnya.

Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya, saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkannya dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya dengan syarat-syarat yang sama seperti saksi-saksi yang memberatkannya.

Untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara cuma-cuma apabila ia tidak mengerti atau tidak bisa berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan.



Untuk tidak dipaksa agar memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengakui kesalahannya.

Menurut Suparman Marzuki, pasal di atas menegaskan jaminan prosedural (*procedural guarantee*) agar sistem peradilan dapat dijalankan dengan *fair*. Kaitannya difabel berhadapan dengan hukum, ketersediaan layanan peradilan yang berbeda dengan orang kebanyakan menjadi satu hal yang penting. Ketersediaan layanan berkaitan dengan dua hal, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas prosedural.

Menurut Suparman, aksesibilitas fisik berkaitan dengan kewajiban peradilan untuk memastikan bahwa sarana prasarana fisik seperti gedung pengadilan, ruang sidang, berkas acara pemeriksaan, surat dakwaan dan tuntutan, semuanya aksesibel untuk difabel. Sedangkan aksesibilitas prosedural berkaitan dengan hukum acarayang pada beberapa hal masih mengganggu, menyulitkan dan tidak aksesibel untuk difabel berhadapan dengan hukum.<sup>10</sup> Peradilan yang *fair* tidak akan tercipta tanpa pemenuhan kedua hal tersebut.

Selain itu, Kovenan Hak Sipil dan Politik juga menegaskan tentang prosedur peradilan yang harus mempertimbangkan pelaku, korban dan atau pun saksi yang masih berusia anak-anak. Prosedur hukum mesti mempertimbangkan kelayakan untuk pemajuan rehabilitasi usia anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>11</sup> Pasal ini sangat relevan jika dikaitkan dengan difabel intelektual yang berhadapan dengan hukum, di mana usia difabel

---

<sup>10</sup> Suparman Marzuki, *Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas*, dalam Hari Kurniawan dkk, *Aksesibilitas Peradilan*, op.cit., hlm. xv-xvi.

<sup>11</sup> Pasal 14 ayat 4 menyatakan bahwa dalam hal anak yang belum dewasa, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia dan kelayakan bagi pemajuan rehabilitasinya.

intelektual berbeda antara usia kalender dan mentalnya. Difabel intelektual layak diproses dengan menggunakan prosedur peradilan anak dengan merujuk pada usia mentalitasnya.

#### **D. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Konvensi ini merupakan rujukan spesifik hak-hak difabel secara internasional. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang No. 19 tahun 2011. Tujuan mendasar dari pembuatan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, menjamin penikmatan secara penuh dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua difabel dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Difabel mencakupi mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>12</sup>

Konvensi ini menyatakan beberapa prinsip mendasar, meliputi:<sup>13</sup> *pertama*, penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan perseorangan. *Kedua*, nondiskriminasi. *Ketiga*, partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat. *Keempat*, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan difabel sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan. *Kelima*, kesetaraan kesempatan. *Keenam*, aksesibilitas. *Ketujuh*, kesetaraan antara laki-laki dan

---

<sup>12</sup> Pasal 1 UN CRPD.

<sup>13</sup> Pasal 3 UN CRPD.

perempuan. *Kedelapan*, penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari difabel anak dan penghormatan hak difabel anak guna mempertahankan identitas mereka.

Untuk kepentingan tujuan interaksi, partisipasi, kesetaraan dan penikmatan secara penuh hak-hak difabel, konvensi ini menjelaskan secara detail beberapa hal penting, yaitu:

1. Komunikasi yang mencakupi bahasa, tayangan teks, *braille*, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses seperti juga maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, *plain-language*, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi tambahan maupun alternatif lainnya, sarana, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses.
2. Bahasa yang mencakupi bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa nonlisan yang lain.
3. Penegasan untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan disabilitas yang berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pengurangan atau peniadaan pengakuan, penikmatan dan pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan manusia lainnya terhadap semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya.
4. Kewajiban negara untuk memberikan akomodasi yang patut, yaitu modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan layak yang tidak memberikan beban yang tidak seimbang atau tidak semestinya ketika diperlukan dalam kasus-kasus tertentu, untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan orang lain.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 2 UN CRPD.

Sejalan dengan tujuan dan kepentingan untuk menjamin dan meningkatkan realisasi pemenuhan hak-hak difabel, konvensi ini menegaskan kewajiban pokok negara pihak yang telah meratifikasi, meliputi:<sup>15</sup>

1. Mengadopsi semua kebijakan legislatif, administratif dan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam konvensi;
2. Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk legislasi, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku, yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para difabel;
3. Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia dari difabel dalam semua kebijakan dan program;
4. Menahan diri dari keterlibatan dalam semua tindakan atau praktik yang bertentangan dengan konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga-lembaga publik bertindak sesuai dengan konvensi;
5. Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi berfundamentalkan disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
6. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus difabel, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-standar dan pedoman-pedoman;

---

<sup>15</sup> Pasal 4 ayat (1) UN CRPD.

7. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantuan, yang cocok untuk difabel, serta memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;
8. Menyediakan informasi yang dapat diakses oleh para difabel mengenai bantuan mobilitas, peralatan dan teknologi pembantu bagi difabel, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;
9. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan tenaga bantuan yang bekerja dengan difabel tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang sesuai dengan hak-hak tersebut.

Di antara tanggungjawab pemerintah yang telah meratifikasi konvensi adalah kewajibannya untuk memastikan aksesibilitas pelayanan publik, aksesibilitas prosedur dan peningkatan kesadaran. Pasal 9 konvensi ini menegaskan beberapa hal:

*Pertama*, agar difabel mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi difabel, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Langkah-langkah yang wajib meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, wajib berlaku, *inter alia*: (a) Gedung-gedung, jalan-

jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja; (b) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

*Kedua*, Negara-Negara Pihak wajib juga mengambil langkah-langkah yang tepat untuk: (a) Mengembangkan, menyebarluaskan dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik; (b) Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi difabel; (c) Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan mengenai masalah aksesibilitas yang dihadapkan kepada difabel; (d) Menyediakan di dalam bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf *braille* dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami; (e) Menyediakan bentuk-bentuk bantuan dan perantara langsung, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik; (f) Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang tepat bagi difabel untuk menjamin akses mereka terhadap informasi; (g) Memajukan akses bagi difabel terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet; (h) Memajukan desain, pengembangan, produksi, dan distribusi sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang dapat terakses sejak tahap awal, sehingga sistem serta teknologi ini dapat terakses dengan biaya yang minimum.<sup>16</sup>

Dalam konteks difabel berhadapan dengan hukum, konvensi ini menegaskan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan

---

<sup>16</sup> Pasal 9 ayat (1) UN CRPD.

dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama.<sup>17</sup> Termasuk kewajiban negara untuk mencegah semua diskriminasi atas disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang sama dan efektif bagi difabel terhadap diskriminasi dengan fundamental alasan apa pun.<sup>18</sup>

Secara lebih spesifik, konvensi menegaskan persamaan dan pengakuan di muka hukum bagi difabel berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa difabel memiliki hak untuk diakui dimana pun berada sebagai seorang manusia di muka hukum.<sup>19</sup>
2. Negara-Negara Pihak wajib mengakui bahwa difabel memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan.<sup>20</sup>
3. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi difabel terhadap bantuan yang mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka.<sup>21</sup>
4. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa seluruh langkah yang terkait dengan pelaksanaan kapasitas hukum menyediakan pengamanan yang tepat dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan, selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional. Pengamanan tersebut wajib menjamin bahwa langkah yang terkait dengan pelaksanaan kapasitas hukum menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan difabel bersangkutan, bebas dari

---

<sup>17</sup> Pasal 5 ayat (1) UN CRPD.

<sup>18</sup> Pasal 5 ayat (2) UN CRPD.

<sup>19</sup> Pasal 12 ayat (1) UN CRPD.

<sup>20</sup> Pasal 12 ayat (2) UN CRPD.

<sup>21</sup> Pasal 12 ayat (3) UN CRPD.

konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan difabel bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan yudisial yang kompeten, mandiri dan tidak memihak. Pengamanan wajib bersifat proporsional hingga pada tingkat dimana ketentuan semacam ini memberikan dampak terhadap hak dan kepentingan difabel bersangkutan.<sup>22</sup>

5. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat dan efektif untuk menjamin hak yang sama bagi difabel dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki persamaan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa difabel tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang.<sup>23</sup>

Konvensi Hak-Hak Difabel juga mengatur akses kepada keadilan bagi difabel berhadapan dengan hukum. Pasal 13 ayat (1) dan (2) menegaskan dua hal, yaitu:

*Pertama*, Negara-Negara Pihak wajib menjamin secara efektif akses difabel pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian peraturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif difabel sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyelidikan dan tahap-tahap awal lainnya.

*Kedua*, dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi difabel, Negara-Negara Pihak wajib

---

<sup>22</sup> Pasal 12 ayat (4) UN CRPD.

<sup>23</sup> Pasal 12 ayat (5) UN CRPD.



meningkatkan pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

Konvensi ini juga memastikan bahwa difabel harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2). Pengaturan ini melengkapi terhadap praktik difabel berhadapan dengan hukum yang kerap diberlakukan secara tidak manusiawi, direndahkan martabatnya dan dipojokkan dengan alasan disabilitas.

Secara umum, konvensi ini sangat komprehensif mengatur dan menjamin hak-hak difabel berhadapan dengan hukum. Letak tanggungjawab perbaikannya berada di pundak pemerintah untuk memastikan terhadap fasilitas, sarana prasarana, prosedur hukum, pengaturan yang non diskriminasi, bantuan hukum, difabel yang harus diakui sebagai subyek hukum dan difabel yang mesti diberlakukan secara manusiawi ketika berhadapan dengan hukum. Konvensi ini memberi jawaban atas persoalan-persoalan diskriminasi yang kerap muncul di dunia pengaturan hukum dan proses peradilan yang saat ini masih belum ramah kepada difabel.

### **E. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**

Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dinilai stigmatik, menggunakan cara pandang *charity* dan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan difabel. Undang-undang ini dibuat karena beberapa kondisi. *Pertama*, difabel masih berada dalam kondisi rentan dan terbelakang. *Kedua*, masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan hak. *Ketiga*, difabel masih

dianggap beban dan obyek. *Keempat*, masih adanya perilaku diskriminasi. *Kelima*, difabel belum sepenuhnya dilibatkan dalam masyarakat. *Keenam*, difabel masih dipandang berbeda dengan orang lain. *Ketujuh*, penyandang disabilitas belum disetarakan kesempatannya. *Kedelapan*, fasilitas publik yang aksesibel belum terpenuhi.

Tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak difabel menurut undang-undang ini meliputi: *pertama*, mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar difabel secara penuh dan setara. *Kedua*, menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri difabel. *Ketiga*, mewujudkan taraf kehidupan difabel yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. *Keempat*, melindungi difabel dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. *Kelima*, memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak difabel untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Definisi difabel dalam peraturan ini tidak berbeda dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yakni setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ragam difabel dalam undang-undang dibagi menjadi lima.

*Pertama*, difabel fisik, yaitu orang-orang yang terganggu fungsi gerak seperti, amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil. *Kedua*, difabel intelektual, yaitu orang-orang yang terganggu fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, *slow learner*; grahita dan *down syndrom*. *Ketiga*, difabel mental, yaitu mereka yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi, psikosial seperti *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas* dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif. *Keempat*, difabel sensorik, yaitu mereka yang terganggu salah satu fungsi dari panca indera, seperti difabel netra dan difabel tuli. *Kelima*, difabel yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, seperti difabel runtuwicara, difabel netra tuli, difabel daksa dan netra sekaligus.

Undang-undang ini cukup komprehensif mengatur hak-hak difabel. Hak tersebut meliputi, hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan dan eksploitasi, hak perempuan dengan disabilitas dan hak anak dengan disabilitas.

Kaitannya dengan difabel berhadapan dengan hukum, undang-undang ini secara spesifik mengatur beberapa hal penting yang diatur pada pasal 28 sampai dengan 39, meliputi:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak difabel sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada difabel dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penegak hukum sebelum memeriksa wajib minta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog/psikiater dan pekerja sosial mengenai psikososial. Dalam hal pemeriksaan atau saran tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.
4. Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak difabel wajib mengizinkan orang tua atau keluarga, pendamping/penerjemah untuk mendampingi anak difabel.
5. Ketidaccakapan difabel harus dengan penetapan pengadilan negeri setempat dengan melampirkan bukti dari dokter/psikolog/psikiater.
6. Keluarga difabel berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat difabel ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
7. Putusan pengadilan negeri dapat dibatalkan karena difabel dapat mengambil keputusan dengan bukti dokter/psikolog/psikiater.
8. Proses peradilan pidana bagi difabel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

9. Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
10. Rumah tahanan negara wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang berfungsi untuk tiga hal. *Pertama*, menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan difabel selama 6 (enam) bulan. *Kedua*, menyediakan kebutuhan khusus termasuk obat-obatan yang melekat dengan difabel dalam masa tahanan dan pembinaan. *Ketiga*, menyediakan layanan rehabilitasi untuk difabel mental.
11. Pembantaran terhadap difabel mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah jiwa atau pusat rehabilitasi.
12. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparaturnegara tentang perlindungan difabel yang isinya meliputi pencegahan, pengenalan tindak pidana dan laporan serta pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.

Secara umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 ini cukup komprehensif mengatur hak-hak difabel. Namun demikian, undang-undang ini tidak cukup baik menjawab kebutuhan sistem hukum difabel berhadapan dengan hukum, khususnya terkait dengan kebutuhan prosedur beracara dalam sistem peradilan. Sesuai Pasal 35, proses peradilan pidana difabel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Padahal, ketentuan hukum acara pidana dalam banyak hal sudah dikritik karena dinilai masih diskriminatif dan tidak mengakomodasi kebutuhan difabel ketika berproses di peradilan.

## **F. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**

Peraturan ini selalu berkaitan dengan difabel. Khususnya pada saat difabel berurusan dengan tindak pidana, baik statusnya sebagai pelaku, korban dan atau sebagai saksi. KUHP menjadi rujukan utama para penegak hukum ketika memproses kasus-kasus tindak pidana. Persoalannya, sejauhmana KUHP ini memiliki rumusan prosedur hukum yang memadai dan sejauhmana peraturan ini selaras dengan hambatan dan kebutuhan difabel?

Secara umum, rumusan prosedur yang diatur dalam KUHP dinilai belum berperspektif disabilitas dan tidak aksesibel.

Secara substansi, KUHP belum mendasarkan proses hukum sesuai dengan hambatan-hambatan difabel. Akibatnya, proses hukum yang merujuk pada KUHP kerap dan biasa berujung pada praktik diskriminasi dan tidak *fair*. Berikut beberapa pasal yang dinilai tidak ramah kepada difabel berhadapan dengan hukum pidana.

*Pertama*, surat penangkapan dan penahanan pada pasal 18 ayat (1) KUHP. Surat tugas penangkapan dan surat perintah penangkapan biasanya masih menggunakan bentuk surat tertulis. Belum berbentuk *braille*. Hal ini tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas netra. Demikian juga penyebutan alasan penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan masih menggunakan model lisan. Padahal, bagi difabel tuli dan grahita, penjelasan semestinya menggunakan sarana penerjemah dan atau pendamping yang mengerti hambatan difabilitas.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan

*Kedua*, jenis penahanan. Pada Pasal 22 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa jenis penahanan ada tiga, yaitu penahanan rumah tahanan negara; penahanan rumah; dan penahanan kota.<sup>25</sup> Pada jenis penahanan ini, utamanya tahanan negara, biasanya ada persoalan aksesibilitas sarana prasarana ruang tahanan dan model pelayanannya pun tidak aksesibel. Karena itu, penting ada *assessment* model penahanan yang tepat bagi difabel berhadapan dengan hukum.

*Ketiga*, perpanjangan masa penahanan yang termaktub pada Pasal 29 ayat (1) KUHAP. Pasal ini mengecualikan jangka waktu penahanan. Khususnya untuk tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat dengan pembuktian surat keterangan dokter.<sup>26</sup> Pasal ini sebenarnya telah mengafirmasi difabel berhadapan dengan hukum. Pada kenyataannya, difabel berhadapan dengan hukum memang membutuhkan waktu yang relatif lama dan membutuhkan mekanisme khusus sesuai dengan hambatnya. Karena itu, *profile assessment*, keberadaan ahli dan keberadaan pendamping difabel menjadi sangat penting untuk proses peradilan yang *fair*.

*Keempat*, pendamping hukum. Pasal 56 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa tersangka atau terdakwa disangka atau

---

memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

<sup>25</sup> Pasal 22 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa jenis penahanan dapat berupa: (a) Penahanan rumah tahanan negara; (b) Penahanan rumah; (c) Penahanan kota.

<sup>26</sup> Pasal 29 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena: tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka wajib disediakan penasihat hukum.<sup>27</sup> Pasal ini masih kurang spesifik. Untuk kasus difabel berhadapan dengan hukum, yang dibutuhkan selain penasihat hukum adalah pendamping difabilitas.

*Kelima*, surat tuntutan dan dakwaan. Pasal 140 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.<sup>28</sup> Dalam prakteknya, surat tuntutan dan dakwaan masih menggunakan versi surat biasa dan belum ada desain lain yang aksesibel bagi difabel. Semestinya, surat dakwaan dan tuntutan dibuat dalam beragam versi, baik itu *braille*, tayangan teks, audio dan atau pun format informasi yang aksesibel lainnya.

*Keenam*, saksi dan alat bukti persidangan. Pada Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>29</sup> Hal

---

<sup>27</sup> Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

<sup>28</sup> Pasal 140 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan



serupa juga dinyatakan pada Pasal 1 angka 27 KUHP.<sup>30</sup> Pasal ini diskriminatif kepada difabel netra dan tuli. Kesaksian difabel tuli dan netra biasa diragukan keabsahan dan kekuatannya. Akibatnya, difabel berhadapan dengan hukum biasa dikalahkan, disalahkan dan dipojokkan karena disabilitasnya.<sup>31</sup>

*Ketujuh*, penyediaan penerjemah. Pasal 178 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah. Penerjemah itu adalah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi.<sup>32</sup> Pasal ini sudah afirmatif kepada difabel tuli dalam hal penyediaan penerjemah. Namun demikian, penyediaan penerjemah sebenarnya tidak hanya dibutuhkan difabel bisu dan tuli, tetapi juga difabel yang mengalami disabilitas intelektual. Karena itu, penting adanya *profile assesment* terlebih dahulu terkait penyediaan penerjemah. Di samping itu, ada persoalan penyediaan penerjemah yang tepat. Sebab, tidak semua penerjemah dapat mengerti bahasa difabel dan mengerti persoalan disabilitas yang sangat kompleks dan beragam.

*Kedelapan*, pemeriksaan hakim terbuka untuk umum. Pasal 153 ayat (3) dinyatakan bahwa untuk keperluan pemeriksaan,

---

ia alami sendiri.

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 27 KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.

<sup>31</sup> "Difabel Masih Terdiskriminasi di Depan Hukum", *Jurnal Difabel*, volume 1 No. 1, Mei 2014, hlm. 8.

<sup>32</sup> Pasal 178 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. Pada ayat (2), disebutkan bahwa jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.<sup>33</sup> Pasal ini dinilai masih memiliki kelemahan dan tidak ramah kepada difabel. Umur mental yang melekat kepada difabel intelektual tidak diakui. Yang diakui hanya umur kalender. Dalam proses pemeriksaan, hakim juga belum memiliki sistem *profile assessment* disabilitas dan tidak mewajibkan pendamping disabilitas. Akibatnya, penyandang disabilitas sudah terbiasa terdiskriminasi dan tidak diproses secara *fair* sesuai dengan hambatan-hambatan disabilitasnya.

### **G. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPdt)**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) merupakan terjemahan resmi dari buku aslinya yang berjudul *Bergerlijk Wetboek*. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Peraturan ini sangat berkaitan dengan difabel sebagai individu dan pasti berhubungan secara perdata dengan manusia pada umumnya.

Sebagai rujukan hukum perdata di Indonesia, KUHPdt dinilai sangat diskriminatif kepada difabel.

Substansi yang diskriminatif itu tertulis pada pasal 433 (Buku 1) yang menyatakan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

---

<sup>33</sup> Pasal 153 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

Pasal ini langsung menohok dan menempatkan difabel sebagai kelompok yang harus berada di bawah pengampuan. Ada beberapa kritik mendasar terhadap pasal ini. *Pertama*, pasal ini belum menggunakan prinsip persamaan dan kesetaraan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Akibatnya, difabel belum ditempatkan sebagai pribadi yang setara di depan hukum. *Kedua*, pasal ini masih belum berperspektif hak asasi manusia karena meletakkan difabel sebagai warga negara “kelas dua” dan tidak diberlakukan sebagai manusia yang setara, yang memiliki harkat dan martabatnya sebagai manusia. *Ketiga*, pasal ini adalah produk masa lampau. Secara substantif bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Secara umum, pasal ini berdampak diskriminatif secara langsung terhadap posisi difabel dalam konteks hubungan keperdataan. Difabel kerap tidak mendapatkan hak waris karena di bawah pengampuan. Difabel tidak bisa menjadi pihak dalam hubungan keperdataan seperti asuransi dan perbankan dan hubungan keperdataan lainnya. Lewat pasal ini, difabel belum diakui sebagai manusia yang bermartabat, tidak diakui kemandiriannya, tidak diakui subyektifitas status hukumnya dan ditempatkan dalam stigma yang negatif.

## **H. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Peraturan ini sangat berkaitan dengan difabel. Bagaimanapun, difabel sama dengan manusia pada umumnya. Ada keinginan untuk berumah tangga. Persoalannya, sejauhmana undang-undang ini ramah dan tidak diskriminatif pada difabel yang akan atau telah menikah? Pada Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak banyak pasal yang menyinggung difabel dalam undang-undang ini. Letak masalahnya ada pada Pasal 4 ayat (1). Di dalam pasal ini dinyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal di atas menjelaskan tentang persyaratan poligami bagi seorang laki-laki yang telah menikah. Salah satu syaratnya yaitu apabila seorang istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Pasal ini perlu mendapatkan kritik. Difabel perempuan yang telah menjadi istri atau akan menjadi calon istri sangat rentan untuk dipoligami oleh laki-laki yang menikah dan atau akan menikah. Masa depannya sebagai perempuan sangat tidak terjamin.

Dalam prakteknya, banyak difabel perempuan yang telah menjadi istri dipoligami atau bercerai karena alasan difabilitas. Ketika berkonflik dan dibawa ke pengadilan agama, perempuan difabel biasa dikalahkan dengan alasan-alasan disabilitas. Peraturan ini secara langsung berdampak diskriminatif kepada perempuan difabel dan masih meletakkan perempuan di bawah hegemoni laki-laki.

## **I. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, negara harus melakukan semua langkah untuk menjamin penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar difabel anak secara penuh atas dasar kesetaraan dengan anak-anak pada umumnya.<sup>34</sup> Dalam tindakan tindakan apapun terkait difabel anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>35</sup> Negara juga menjamin terhadap hak kebebasan berpendapat difabel anak sesuai usia dan kedewasaannya.<sup>36</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak ini sudah tepat untuk menggambarkan anak, tetapi kaitannya dengan difabel anak, definisi ini belum cukup komprehensif. Definisi anak disini masih pendekatan umur kalender anak. Dalam penjelasan pun tidak cukup jelas. Padahal, umur anak semestinya diakui dalam dua macam: umur kalender dan umur mental. Bagi difabel mental intelektual, banyak kejadian dimana umur kalender mereka sudah dewasa, tetapi mentalitas dan kedewasaan mereka tidak sebanding dengan umur kalendernya. Ketika difabel mental intelektual berhadapan dengan hukum, mereka tidak diproses sesuai umur mental yang masih anak-anak. Proses hukum kerap berujung pada diskriminasi.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 7 ayat (1) UN CRPD.

<sup>35</sup> Pasal 7 ayat (2) UN CRPD.

<sup>36</sup> Pasal 7 ayat (3) UN CRPD.

<sup>37</sup> Endang Ekowarni, (2014), *Perempuan Difabel Kemana Mencari Perlindungan Hukum?*, dalam M. Syafiie dkk, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, hlm. 163-166.

Undang-undang ini juga mengatur difabel anak. Pasal 1 ayat (7) dinyatakan bahwa anak difabel adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Karena itu, undang-undang ini menegaskan bahwa anak difabel berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial,<sup>38</sup> pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, serta hak untuk diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan atau pendidikan khusus.<sup>39</sup>

Dalam konteks perlindungan, undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan khusus kepada anak, termasuk di dalamnya anak yang berhadapan dengan hukum dan anak difabel.<sup>40</sup> Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

<sup>39</sup> Pasal 51 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

<sup>40</sup> Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pada ayat (2) perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: (a) Anak dalam situasi darurat; (b) Anak yang berhadapan dengan hukum; (c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; (f) Anak yang menjadi korban pornografi; (g) Anak dengan HIV/AIDS; (h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; (i) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; (j) Anak korban kejahatan seksual; (k) Anak korban jaringan terorisme; (l) Anak difabel; (m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; (n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan (o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

<sup>41</sup> Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
10. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Pemberian advokasi sosial;
12. Pemberian kehidupan pribadi;
13. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak difabel;
14. Pemberian pendidikan;
15. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
16. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan khusus anak berhadapan dengan hukum di atas sangat ideal bagi anak. Namun demikian, belum cukup cukup untuk mengakomodir hak anak difabel. Ada beberapa alasan mengapa hal itu masih menyisakan permasalahan. *Pertama*, pasal ini tidak tegas dan jelas mengakui umur

mental untuk difabel mental intelektual. Banyak difabel mental intelektual yang umur mentalnya masih anak-anak. Mereka tidak diakui dan dilindungi sebagai anak. *Kedua*, pasal ini belum cukup komprehensif mengatur kebutuhan perlindungan khusus anak difabel yang berhadapan dengan hukum. Hanya pemberian aksesibilitas yang diatur. Sedangkan kebutuhan lain seperti *profile assessment*, kebutuhan pendamping khusus yang memahami difabel, penyediaan penerjemah, bantuan hukum dan pemeriksaan yang berbasis difabilitas, belum diatur dengan cukup baik. Sesuai dengan persoalan ini, sebaiknya Undang-Undang Perlindungan Anak diperbaiki untuk lebih mengakomodasi hak-hak anak difabel.

Selain perlindungan khusus untuk anak berhadapan dengan hukum, undang-undang ini juga mengatur perlindungan khusus untuk difabel. Upaya-upaya perlindungan khusus itu meliputi:<sup>42</sup>

- (a) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- (b) Pemenuhan kebutuhan khusus;
- (c) Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- (d) Pendampingan sosial.

Pengaturan perlindungan khusus bagi difabel merupakan poin bagus untuk Undang-Undang Perlindungan Anak Difabel. Namun demikian, pasal ini diletakkan dalam konteks yang berbeda dengan anak yang berhadapan dengan hukum, yang telah diatur pada pasal sebelumnya.

---

<sup>42</sup> Pasal 70 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



## **J. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-undang ini merupakan upaya bersambung terkait kebutuhan sistem peradilan pidana anak. Hal ini ditandai dengan adanya jaminan perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam undang-undang ini, pada Pasal 1 ayat (3) dijelaskan definisi tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Pada Pasal 1 ayat (4) dinyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak korban, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pada Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak saksi, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa sistem peradilan anak dalam undang-undang ini semata diperuntukkan untuk peradilan anak pada umumnya, Belum cukup memadai untuk anak difabel lantaran beberapa alasan berikut.

*Pertama*, umur anak dalam undang-undang ini ukurannya adalah kalender. Tidak dinyatakan pengakuan tentang umur

mental. Akibat pendekatan ini, para penegak hukum, utamanya polisi, jaksa dan hakim, ketika memproses difabel mental intelektual yang umur mentalnya masih anak-anak, para penegak hukum itu tidak mau. Alasannya, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang diakui ialah umur kalender.<sup>43</sup>

*Kedua*, definisi anak yang menjadi saksi tindak pidana, dimana persyaratannya harus didengar, dilihat dan atau dialami sendiri. Definisi ini diskriminatif kepada penyandang disabilitas tuli dan netra. Akibat definisi ini, kesaksian difabel netra dan tuli lemah, bahkan ditolak di peradilan. Difabel kerap tidak mendapatkan peradilan yang *fair* akibat dari ketentuan persaksian ini.

*Ketiga*, undang-undang ini tidak cukup komprehensif untuk mengatur sistem peradilan anak difabel. Kebutuhan *profile assessment*, kebutuhan penerjemah, pendamping difabel, pendamping hukum yang paham penyandang disabilitas, aparat penegak hukum yang paham isu disabilitas dan pemeriksaan yang berbasis disabilitas anak, tidak diatur dalam undang-undang ini.

Meski demikian, undang-undang ini cukup menarik untuk menjadi referensi guna mendorong sistem peradilan pidana untuk difabel. Aspek sistem peradilan khusus cukup terbaca dalam undang-undang ini. Ada beberapa hal yang mendasarinya.

*Pertama*, undang-undang ini menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

---

<sup>43</sup> M. Syafiie, dkk, (2014), *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, hlm. 105-116.

semula. Pendekatannya bukan model pembalasan.<sup>44</sup>

*Kedua*, sistem peradilan pidana menggunakan sistem diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>45</sup>

*Ketiga*, aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pidana semuanya khusus, meliputi: penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak, hakim kasasi anak dan pembimbing kemasyarakatan yang memahami dunia anak. Mereka juga bertugas membimbing serta mengawasi anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.<sup>46</sup>

#### **K. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

Undang-undang ini secara tidak langsung berkaitan dengan hak-hak difabel untuk mendapatkan pelayanan publik, terutama di pengadilan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik sebagaimana Pasal 1 ayat (2) adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen

---

<sup>44</sup> Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat (8)- ayat (13) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Undang-undang ini menganut beberapa prinsip penting, yaitu: (a) Kepentingan umum; (b) Kepastian hukum; (c) Kesamaan hak; (d) Keseimbangan hak dan kewajiban; (e) Keprofesionalan; (f) Partisipatif; (g) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; (h) Keterbukaan; (i) Akuntabilitas; (j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) Ketepatan waktu; (l) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Terkait pelayanan bagi difabel, undang-undang ini menyebutkannya di dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu. Pada bagian penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.

Secara umum, undang-undang ini sangat bermanfaat untuk mendorong pelayanan publik yang tidak diskriminatif kepada difabel. Namun demikian, undang-undang ini memunculkan beberapa catatan.

*Pertama*, undang-undang ini tidak cukup komprehensif untuk mengakomodasi pelayanan publik yang aksesibel. Prinsip dan pasal yang membahas aksesibilitas tidak dimasukkan di dalam undang-undang ini. Salah satu diantaranya adalah ketentuan mengenai desain sarana-prasarana yang aksesibel dan model pelayanan yang ramah kepada difabel. Hal itu belum diatur.

*Kedua*, undang-undang masih menggunakan istilah “penyandang cacat”. Padahal istilah tersebut dinilai diskriminatif dan negatif.

#### **L. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung**

Undang-undang ini secara langsung berkaitan dengan sarana prasarana bangunan gedung yang aksesibel untuk difabel. Di dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa bangunan ialah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Asas dari pembangunan gedung dalam undang-undang ini adalah asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungan sekitarnya.<sup>47</sup> Sedangkan tujuan pembangunannya meliputi:

- (a) Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- (b) Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- (c) Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Dalam undang-undang ini diatur secara spesifik pembangunan gedung yang harus aksesibel untuk difabel. Pada Pasal 27 ayat (2)

---

<sup>47</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

dinyatakan bahwa kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.<sup>48</sup> Sedangkan kelengkapan sarana prasarana yang harus disediakan meliputi: penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.<sup>49</sup>

Secara umum, undang-undang ini belum cukup komprehensif untuk mewujudkan bangunan gedung yang aksesibel dan *universal design*. Hal itu terlihat dari asas yang tidak menegaskan prinsip aksesibilitas dan non diskriminasi. Juga tidak ada penjelasan yang cukup memadai terkait aksesibilitas gedung dan mekanisme pengawasan, pengaduan dan pemberian sanksinya. Istilah yang digunakan dalam undang-undang ini pun masih “penyandang cacat” yang dinilai diskriminatif dan negatif.

---

<sup>48</sup> Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan usia lanjut.

<sup>49</sup> Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah serta fasilitas komunikasi dan informasi.

## BAB V

# Anotasi Putusan Kasus-Kasus Difabel Berhadapan dengan Hukum

**M**enilai dan melakukan kajian atas putusan pengadilan sebagai sebuah produk hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, sama sekali tidak akan mengubah putusan tersebut. Namun, kajian atas putusan tetap bisa dilakukan. Hal itu bertujuan untuk menilai atau memeriksa berbagai hal yang berkaitan dengan proses dan hasil putusan. Adapun manfaat dari penilaian tersebut, antara lain:

- (a) Sebagai sarana untuk membentuk sarjana hukum yang menguasai cara berfikir yuridis (*juridisch denken*), bersikap kritis dan mempunyai ketajaman analisis terhadap proses dan produk peradilan;

- (b) Mendorong penegak hukum untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya pada saat memeriksa dan memutus suatu perkara. Tujuannya agar tidak menjadi putusan yang kontroversial atau melukai rasa keadilan masyarakat. Inilah yang dalam terminologi ilmu hukum dikenal dengan eksaminasi putusan atau *legal annotations*;
- (c) Mendorong penemuan hukum baru bagi para penegak hukum, khususnya hakim, terutama untuk kasus-kasus yang belum ada atau belum jelas ketentuan hukumnya (terdapat kekosongan hukum/*rechtsvacuum*).

Dalam *Black's Law Dictionary*, eksaminasi diartikan sebagai *an investigation; search; inspection; interrogation*. Dalam konteks eksaminasi terhadap produk peradilan (dakwaan, putusan), maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan (jaksa) atau putusan pengadilan (hakim). Eksaminasi sering disebut juga dengan *legal annotation* yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa. Pada dasarnya, proses yang dilakukan hampir sama dengan eksaminasi.

Sebagai bagian dari penelitian hukum, khususnya terhadap putusan kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum, maka kajian putusan ini dilakukan guna melihat dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Format yang digunakan adalah "Anotasi Putusan terhadap Putusan Kasus-kasus Difabel Berhadapan dengan Hukum". Dari banyak kasus yang dikumpulkan, pada akhirnya dipilih dua puluh kasus. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman kasus dan wilayah hukumnya. Dari ke dua puluh dua putusan tersebut, dipilih sembilan putusan yang dianggap mewakili untuk diberikan *legal annotations*.



Berikut ini adalah daftar putusan pengadilan kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum. Kasus-kasus ini mewakili putusan atas kasus pidana (kriminalitas) dan perdata. Kasus pidana yang ditemukan di antaranya adalah kasus pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan dan kekerasan disertai pengeroyokan. Sedangkan kasus perdata menyangkut perceraian.

# Korban Kebejatan Oknum Guru

---

## Bermula dari Tayangan Video

Mawar (bukan nama sebenarnya) adalah murid di sebuah SMA Luar Biasa di Sukoharjo, Jawa Tengah. Perempuan ini duduk di kelas II. Ia memiliki kebutuhan khusus (difabel) retardasi mental sekaligus tuna rungu. Pada 16 Juli 2002, sekitar pukul dua siang, Mawar bersama dengan tiga orang kawannya dan seorang guru sedang berada di ruang ketrampilan SMA. Beberapa saat kemudian, mereka semua memutuskan untuk pulang lantaran situasi sekolah sudah mulai sepi.

Ketika Mawar hendak pulang, seorang guru bernama Obi (bukan nama sebenarnya) memanggilnya. Pria yang merupakan guru tidak tetap itu memanggil Mawar untuk mendatangi ruang salon. Letak ruangan ini persis di sebelah ruang ketrampilan. Kedua ruangan ini hanya disekat menggunakan triplek. Begitu tiba di ruangan salon, Mawar diminta Obi untuk duduk. Setelah itu, Obi memperlihatkan tayangan video yang ada di telepon genggamnya: bermerk cross berwarna putih.

Tayangan video itu memperlihatkan adegan yang tak senonoh. Ada seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama telanjang badan. Mereka berdua berciuman mulai dari pipi sampai dengan leher, saling bergantian satu sama lain. Tak berhenti sampai disitu, laki-laki dan perempuan itu lantas melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri. Sembari menonton tayangan itu, Obi membuka kancing dua buah kancing baju milik Mawar dan kemudian membuka meremas serta menggigit payudaranya. Laki-laki kelahiran

Sukahorjo pada 9 Oktober 1974 itu mencoba melakukan tindakan yang tak selayaknya. Tak pantas dilakukan oleh seorang guru pada muridnya.

Pada saat Mawar duduk di sebuah kursi panjang, Obi tiba-tiba menyingkap rok miliknya. Tangan Obi menyelinap di bawah celana dalam milik Mawar dan langsung memegang kemaluannya. Mawar merasa kesakitan lantaran jari tengah Obi tiba-tiba saja masuk ke dalam alat kelaminnya. Perilaku biadab Obi itu tak berhenti sampai pada tindakan itu. Ia dengan sengaja menurunkan celana berserta celana dalamnya. Ia memegang kepala Mawar dan mendorongnya hingga ke arah selangkangannya. Dengan paksa dan sengaja, Obi memasukkan alat kelaminnya ke mulut Mawar. Ini membuat Mawar tak tahan dan merasa mual. Ujung-ujungnya, Mawar lantas muntah. Setelah itu, Obi mengeluarkan alat kelaminnya dari mulut Mawar dan langsung mengocoknya hingga keluar cairan.

Setelah itu, Obi menerbitkan isyarat menggunakan kedua tangannya. Jari telunjuknya diletakkan di depan mulut sembari matanya melotot. Tangan kanannya mengepal dan dipukukannya ke tangan kiri. Ini dilanjutkan dengan gerakan tangan kanan Obi yang seolah memotong lehernya sendiri. Ini adalah sebuah bentuk ancaman agar Mawar tak menceritakan kejadian yang menimpanya kepada siapapun. Jika sampai bocor dan orang lain tahu, maka ancaman itu akan berlaku. Obi tak segan-segan akan melakukan kekerasan pada Mawar yang notabene adalah muridnya sendiri. Ancaman ini membuat Mawar merasa ketakutan.

Persoalan lainnya adalah tindakan Obi ini tak hanya dilakukan sekali. Peristiwa yang nyaris serupa terulang pada waktu yang berbeda, yaitu pada tanggal 19 Juli 2012. Pada saat itu, Obi bahkan sengaja memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Mawar. Hal yang nyaris sama juga dilakukan Obi pada 26 Juli, 2

dan 9 Agustus serta pada 11 September. Semuanya terjadi pada tahun 2012. Secara keseluruhan, ia melakukan tindakan tidak terpuji itu sebanyak enam kali.

Tindakan Obi ini membuatnya berurusan dengan penegak hukum. Jaksa menuntutnya dengan tuntutan berlapis. Ia dijerat dengan tiga pasal sekaligus, yang masing-masing saling melengkapi.

<b>Pasal 285 KUHP (Primair)</b>	<b>Pasal 289 KUHP (Subsidaair)</b>	<b>Pasal 294 ayat (2) ke 2 KUHP (Lebih Subsidaair)</b>
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.	Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.	Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya dan pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Tuntutan jaksa itu membuat Obi beserta kuasa hukumnya mengajukan eksepsi pada 26 Februari 2013. Lantas majelis hakim mengeluarkan putusan sela yang isinya menolak eksepsi itu. Penolakan ini membuat persidangan berlanjut dan memerintahkan jaksa untuk melanjutkan penuntutan. Jaksa kemudian mengajukan alat bukti sekaligus barang bukti untuk menjerat Obi. Saksi yang dihadirkan ada tiga belas orang,

termasuk Mawar yang digolongkan sebagai saksi korban.

Ada juga surat *visum* dari Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta bernomor 849/PW/RM/XI/2012 yang dikeluarkan pada 13 November 2012. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendratno Triwibomo Sp.Og. Selain itu, ada beberapa barang bukti yang dijadikan sarana untuk menjerat Obi. Mulai dari barang pribadi milik Mawar hingga kartu penduduk milik Obi. Bahkan telepon genggam milik pria asal Sukoharjo itu juga turut dijadikan barang bukti.

Setelah proses pembuktian di persidangan, pada 18 Juni 2013, jaksa mengajukan tuntutan sebelas tahun penjara. Jaksa berkeyakinan bahwa Obi memang melakukan tindakan tercela tersebut. Ia pantas mendapatkan hukuman. Hal yang tentu saja ditampik oleh Obi beserta kuasa hukumnya. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo lantas memberikan putusan bahwa Obi bersalah. Ia dikenai hukuman kurungan badan selama delapan tahun enam bulan. Putusan ini sama-sama menuai penolakan. Penasihat hukum Obi dan jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.

Pada 20 Agustus 2013, Pengadilan Tinggi Semarang mengeluarkan putusan banding. Hukuman Obi diperberat menjadi sepuluh tahun penjara. Majelis hakim berpandangan Obi melanggar Pasal 289 KUHP. Putusan ini membuat Obi tak puas. Pria kelahiran 9 Oktober 1984 ini kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 29 Januari 2014, terbitlah putusan bagi kasasinya. Putusan Mahkamah Agung menolak kasasi itu. Ini artinya Obi tak lagi bisa mengelak dan sejak itu, ia mendapatkan ganjaran atas perlakuannya pada Mawar. Ia wajib menghuni dan hidup di balik jeruji besi selama sepuluh tahun.

### **Memakan Waktu Lama**

Mawar agaknya menuai dua kerugian sekaligus. Selain perlakuan bejat Obi, ia juga mengalami kejadian tak menyenangkan pada waktu meminta keadilan. Pada saat penyidikan di Unit PPA Kepolisian, terkesan berlarut-larut. Tentunya membuat Mawar merasa trauma. Belum lagi soal prosedur hukum dimana menjelang masa tahanan habis, perkara belum dinyatakan lengkap oleh jaksa. Padahal jika itu yang terjadi, maka Obi bisa lepas dari tahanan. Ia dengan mudah akan melakukan intimidasi pada Mawar. Meskipun kekhawatiran-kekhawatiran ini lantas tak terbukti lantaran kasus ini kemudian dilimpahkan ke pengadilan.

Mawar adalah perempuan difabel. Semestinya ia mempunyai hak seperti yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Aparat penegak hukum musti memberikan penerjemah atau juru bahasa pada Mawar. Selain itu, seyogyanya juga ada bantuan agar Mawar pulih sisi psikologisnya. Bagaimanapun ia adalah korban perkosaan. Nyatanya, dalam situasi ini, hal tersebut tak berlaku. Mawar dibantu oleh beberapa sukarelawan yang pada saat di pengadilan justru dipermasalahkan oleh penasihat hukum Obi. Penerjemah Mawar yang notabene sukarelawan dan sekaligus menjadi saksi itu dianggap menyalahi prosedur hukum.

Padahal situasi ini jelas terekam dalam Pasal 172 KUHP. Pasal tersebut memberikan wewenang penuh kepada ketua majelis agar saksi-saksi diperiksa secara bersamaan atau tidak. Ini membuktikan sebuah hal. Penasihat hukum Obi ternyata tak begitu paham soal hak korban yang harus dilindungi dan dihormati. Dan sebenarnya tak sekedar penerjemah atau juru bahasa, aparat mustinya menghormati hak lainnya. Mereka juga dituntut untuk tidak berlaku diskriminatif. Tidak boleh membedakan. Jangan

sampai memunculkan kesan pelecehan pada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dan bagi Mawar, ada catatan penting yang musti diperhatikan oleh penegak hukum. Ini ada hubungannya dengan lamanya proses persidangan yang dimulai pada 19 Februari sampai 27 Juni 2013. Nyaris memakan waktu lima bulan. Proses seperti ini sangat melelahkan dan bisa jadi menimbulkan rasa trauma.

### **Bagaimana Pembuktian Kasusnya?**

Majelis hakim menghadirkan tiga belas saksi untuk kasus yang melibatkan Obi ini. Ada sebelas saksi yang memberatkan, sisanya meringankan. Selain itu, ada seorang saksi ahli dan hasil *visum* serta beberapa barang bukti, seperti telepon genggam Obi dan beberapa pakaian dalam milik Mawar. Lalu bagaimana pembuktian dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini?

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatif wettelijk stelsel*). Sistem ini mengharuskan pembuktian dilakukan melalui alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim. Rujukannya ada pada Pasal 183 KUHP. Hakim baru boleh menghukum seseorang apabila sedikitnya ada dua alat bukti. Selain itu, hakim sendiri merasa yakin bahwa memang ada tindakan pidana dan memang ada pihak yang bersalah. Jadi keyakinan hakim juga memegang peranan penting.

Apakah cukup hanya itu? Ternyata tidak. Selain alat bukti dan keyakinan hakim, seseorang juga harus dibuktikan kesalahannya. Ada beberapa syarat bagi seseorang untuk bisa dinyatakan bersalah. Yang paling utama, orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban. Ia juga menginsyafi atau menyadari perbuatannya. Dalih tidak sengaja atau lalai tetap bisa dikenakan

hukuman. Yang paling akhir, hakim menilai sama sekali tidak ada alasan yang bisa menghapus kesalahan. Tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar. Jadi memang untuk bisa menyatakan seseorang bersalah, hakim musti benar-benar mendapatkan alasan dan bukti yang sangat kuat.

Nah, sekarang bagaimana dengan kasus Mawar ini? Pertama akan dilihat dulu putusan nomor 28/Pid.B/PN.SKH. Ini putusan pada proses peradilan tingkat pertama di Sukoharjo. Hakim menyatakan dakwaan primair tak terbukti. Alasannya, salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP tidak terbukti, yakni unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Hakim menganggap saksi yang dihadirkan tidak ada yang melihat langsung kejadiannya. Hanya Mawar yang menjadi saksi korban, yang mengakui adanya perbuatan itu.

Apakah pertimbangan hakim ini dapat dibenarkan? Secara aturan memang tidak ada yang salah. Tidak ada dua alat bukti yang mendukung. Pasal 185 ayat (2) KUHP menerangkan secara jelas situasi ini. Dinyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa seseorang dinyatakan bersalah. *Unus testis nullus testis*. Artinya adalah satu saksi tidak merupakan saksi. Sementara alat bukti lain berupa keterangan ahli atau *visum* tak cukup menjerat kelakuan Obi.

Memang ihwal perkosaan nyaris selalu dilakukan di tempat tertutup. Sulit diketahui orang lain. Bagi pemerkosa, tentunya hal ini sengaja dilakukan. Minimnya saksi menjadi alasan agar kelakuannya tak terungkap. Dan ini yang sengaja dilakukan OB pada Mawar. Sebenarnya, jika kembali dilihat putusan 28/Pid.B/PN.SKH., ada dua saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, yaitu Mawar sendiri sebagai saksi korban dan Bunga (bukan nama sebenarnya). Hanya saja keterangan Bunga di persidangan disimpulkan hakim bukan perkosaan. Bunga hanya dianggap



melihat perbuatan cabul. Antara perkosaan dan perbuatan cabul memang berbeda. Situasi ini membuat dakwaan primair tidak terbukti, tapi bisa dilanjutkan ke dakwaan subsidair sebagaimana yang tertuang pada Pasal 289 KUHP.

Hakim ternyata banyak menggunakan keterangan Bunga di pengadilan. Ada kesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Mawar. Sementara saksi-saksi lain hanya bersifat *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang didapat dari orang lain. Keterangan model ini sama sekali tak bisa digunakan sebagai alat bukti. Nah, keterangan Mawar dan Bunga ini dijadikan alat bukti oleh hakim. Alat bukti lainnya merujuk pada keterangan seorang ahli bernama dr. Hendratno Triwibowo, seperti yang tercantum pada surat berupa *visum et repertum* nomor 849/PW/RM/XI/2012. Situasi ini meyakinkan hakim untuk menjerat Obi. Ia dianggap bersalah melakukan tindakan pidana berupa menyerang kehormatan susila. Obi dikenai pidana penjara selama delapan tahun enam bulan penjara dari ancaman maksimal sembilan tahun penjara.

### **Menelaah Putusan Selanjutnya**

Setelah hakim memutuskan perkara tersebut, jaksa dan Obi yang diwakili penasihat hukumnya, sama-sama tak puas. Mereka sama-sama mengajukan banding. Lantaran banding, maka putusan itu belum berkekuatan hukum tetap atau belum *inkracht van gewijsde*. Hasil putusan banding itu dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dan tertuang dalam putusan nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg.

Putusan itu sejatinya menguatkan putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Ada bukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila. Hanya saja, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak

sependapat mengenai lamanya pidana penjara. Mereka justru menambah lamanya hukuman yang harus dilaksanakan oleh Obi. Dari yang semula pidana dari penjara delapan tahun enam bulan, ditambah menjadi sepuluh tahun penjara. Tentu saja putusan ini menimbulkan persoalan baru. Ancaman pidana maksimal bagi Obi adalah sembilan tahun. Ini artinya hakim di tingkat banding menambah hukuman 1 tahun dari ancaman maksimal. Ini tentu bisa dipergunakan Obi dan penasihat hukumnya untuk melakukan kasasi.

Ancaman maksimal dan minimal pidana sebenarnya adalah pedoman bagi hakim. Itu adalah batasan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman. Pada praktiknya, ada beberapa putusan yang menampik hal itu. Setidaknya ada dua pemahaman tentang hal ini. Ada yang berpendapat bahwa hakim tidak terikat pada aturan itu. Ada juga yang mengatakan sebaliknya.

Bagi mereka yang percaya bahwa hakim tidak terikat pada aturan itu, menganggap ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan. Hal khusus tersebut bisa bersifat memberatkan terdakwa, seperti Obi dalam kasus ini. Bisa jadi majelis hakim menganggap apa yang dilakukan Obi sudah melewati batas. Apalagi ia adalah guru yang semestinya berkewajiban melindungi anak didiknya. Hakim ingin bersikap adil dengan menambah hukuman Obi tersebut.

Putusan di Pengadilan Tinggi Semarang memang memiliki keuntungan sekaligus kelemahan. Jika memang benar karena semata-mata alasan bahwa Obi adalah seorang guru yang mestinya bertindak bijak, maka putusan itu bisa diterima. Apalagi Mawar sebagai korban adalah perempuan difabel. Tindakan amoral Obi mendapatkan ganjaran yang setimpal di mata hukum. Ia dianggap merusak masa depan Mawar. Hanya saja muncul kekhawatiran yang dianggap menjadi kelemahan

disini. Obi dan penasihat hukumnya bisa jadi akan melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan dalih bahwa hakim di Pengadilan Tinggi Semarang melakukan kekeliruan dengan menambah hukuman. Alasan bahwa hakim menambah hukuman itu akan dijadikan sandaran agar hakim di tingkat kasasi mengabulkan keringanan hukum bagi Obi. Untungnya, setelah melakukan kasasi, nasibnya tak berubah. Obi tetap diharuskan menghuni penjara 10 tahun. Ini artinya, putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang.

### **Pihak yang Terlibat dalam Perkara**

<b>No Register: 28/ Pid.B/2013/ PN.Skh.</b>	<b>No Register: 244/ Pid.2013/PT.Smg.</b>	<b>No Register: 1579 K/Pid/2013.</b>
Agus Darmanto, S.H.,M.H (Hakim Ketua)	Damsuri Nungtjik, S.H.,M.H (Hakim Ketua)	M.Desnayeti, S.H.,M.H (Hakim Ketua)
Diah Tri Lestari, S.H (Hakim Anggota)	A.A.Anom, S.H.,M.H (Hakim Anggota)	Sumardijatmo, S.H.,M.H (Hakim Anggota)
Evi Fitriastuti, S.H (Hakim Anggota)	Soekasantoso, S.H.,M.H (Hakim Anggota)	Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H (Hakim Anggota)
Wasiman. (Panitera Pengganti)	Sutrisno, S.H (Panitera Pengganti)	Suhardi, S.H (Jaksa)
Suhardi, S.H (Jaksa)	Suhardi, S.H (Jaksa)	Kadi Sukarna, S.H (Penasihat Hukum Obi)
Kadi Sukarna, S.H (Penasihat Hukum Obi)	Kadi Sukarna, S.H (Penasihat Hukum Obi)	

# Kejahatan Bermula Dari Sebuah Dompot

---

## **Tendangan di Area Pekuburan**

Gundala (bukan nama sebenarnya) adalah seorang pria yang lahir pada 28 Maret 1990. Ia adalah seorang buruh. Pada suatu saat, Gundala kedatangan sedang bersantai di tengah keramaian Kota Solo. Ia membonceng Trigan (bukan nama sebenarnya), salah seorang kawan karibnya. Kejadian itu tercatat pada 4 Desember 2012. Mereka berdua mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder. Motor yang terbilang uzur itu bernomor plat AD 6949 HK. Singat cerita, setelah berputar lama, Gundala dan Trigan bertemu dengan Mawar (bukan nama sebenarnya), seorang perempuan difabel rungu wicara. Mereka bertiga bertemu di depan SPBU Balapan.

Seusai bercerita panjang lebar, Mawar akhirnya pergi bersama kedua pria itu. Lantaran hanya satu motor, Mawar dibonceng dan berada di tengah. Ia diapit oleh Gundala dan Trigan. Laju motor kemudian menuju ke Kuburan Mojo, Jebres, Surakarta. Setelah sampai di lokasi, Trigan lantas menyetubuhi Mawar. Sementara Gundala menunggu pada jarak yang cukup jauh, sekitar 5 meter dari keduanya. Begitu Trigan selesai, giliran Gundala yang mendekati Mawar dan menyetubuhinya.

Kejadian itu belum selesai meski Trigan dan Gundala telah melampiaskan nafsu birahinya. Mawar kembali diajak keduanya naik motor menuju Plaza Palur. Mereka bertiga bertemu dengan dua orang lelaki lain, masing-masing bernama Dukun (bukan nama sebenarnya) dan Sarden (bukan nama sebenarnya). Jadi ada empat orang laki-laki dan satu orang perempuan yaitu

Mawar, yang saat itu saling bercengkrama. Mereka semua memutuskan untuk pergi ke daerah ISI II yang ada di seputaran Ring Road Mojosongo, Surakarta. Di lokasi itu kembali terjadi persetubuhan. Tak puas, keempat pria itu kemudian mengajak Mawar untuk kembali ke Kuburan Mojo. Hanya saja, di tengah perjalanan, Dukun memutuskan untuk pulang. Kini tinggal tersisa tiga pria dan Mawar yang berada di Kuburan Mojo.

Kini giliran Gundala yang beraksi kembali. Dan setibanya di Kuburan Mojo, pria yang tinggal di Karanganyar itu mengajak Mawar untuk masuk ke lokasi pekuburan. Sementara Trigan dan Sarden rela menunggu di luar area pekuburan. Dalih Gundala, ia ingin kembali berhubungan badan dengan Mawar. Setelah menyanggupi, Mawar kemudian meletakkan dompetnya di atas sebuah batu nisan. Pada saat Mawar menungging, tiba-tiba Gundala menendangnya. Secara otomatis, Mawar terjerembab ke depan. Dengan cepat, Gundala melancarkan aksi jahatnya dengan mengambil dompet Mawar yang ada di atas batu nisan. Bersama dengan kedua temannya yang menunggu di luar area pekuburan, Gundala memutuskan untuk kabur dan meninggalkan Mawar sendirian. Dompet milik Mawar yang diambil Gundala berisikan uang senilai Rp. 153 ribu.

### **Perilaku Berbuah Derita**

Apa yang dilakukan Gundala ternyata berbuah laporan ke polisi. Usut punya usut, laporan ini kemudian ditindaklanjuti dan masuk ke pengadilan. Jaksa lantas memberikan tuntutan untuk Gundala. Atas perilaku jahatnya, jaksa memuat dakwaan dalam dua pasal yang saling melengkapi.

<b>Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP (Primair)</b>	<b>Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP (Subsidaire)</b>
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.	Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Tak hanya berbalut pasal, jaksa juga turut menghadirkan saksi. Ada tujuh orang yang dihadirkan jaksa di pengadilan. Barang bukti yang diajukan ke pengadilan berupa dompet plastik warna hitam putih milik Mawar. Di dalamnya ada uang tunai Rp. 115 ribu. Selain itu ada dua sepeda motor, masing-masing Suzuki Thunder warna biru dengan nomor polisi AD 6949 HK dan Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor polisi AD 6697 YP.

Pada 3 Juni 2013, jaksa mengajukan tuntutan satu tahun penjara untuk Gundala. Jaksa yakin dan percaya, Gundala melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP (primair). Tuntutan jaksa ini dikabulkan oleh hakim tapi hanya sepuluh bulan kurungan. Selanjutnya, tak ada banding dari jaksa dan Gundala. Maka secara otomatis, putusan hakim ini lantas mempunyai kekuatan hukum tetap. Tak lagi bisa diotak-atik. Gundala mau tidak mau harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selama 10 bulan harus berada di balik jeruji besi.

### **Tepatkah Penggunaan Pasal Pencurian?**

Jaksa menggunakan pasal pencurian untuk menjerat Gundala. Hal yang nampaknya perlu mendapatkan perhatian penuh. Tapi sebelumnya, ada juga hal yang patut untuk disimak, yaitu terkait dengan keberadaan penasihat hukum. Gundala yang

diancam hukuman diatas lima tahun dan Mawar sama-sama tak mendapatkan penasihat hukum. Mawar yang merupakan seorang difabel tuna wicara hanya mendapatkan seorang penerjemah. Ini situasi yang perlu mendapatkan kritikan.

Selanjutnya soal putusan yang dikeluarkan pengadilan. Mawar mengalami kejadian dua kali. Rangkaian peristiwanya adalah persetubuhan yang lantas diikuti dengan pencurian. Hal yang diakui Mawar di persidangan, sama sekali tak ada paksaan dalam persetubuhan itu. Tak ada upaya paksa. Tak ada tindak kekerasan. Gundala dan teman-temannya hanya berjanji akan memberikan sejumlah uang begitu persetubuhan itu usai. Mawar dan Gundala bertemu secara tak sengaja. Pada saat Mawar sedang menunggu taksi, datanglah Gundala dan kawan-kawannya. Mawar diajak untuk berjalan dan berkeliling menggunakan motor. Sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah pekuburan.

Hanya saja ada fakta berbeda yang perlu diulik dan diulas lebih lanjut. Jadi, pada saat Gundala berniat kabur se usai menendang Mawar di pekuburan, ternyata langkah mereka terhenti. Ada seorang polisi yang memergokinya. Polisi ini yang juga sempat menjadi saksi di pengadilan. Saat olah TKP, Mawar memberikan isyarat bahwa Gundala dan seorang kawannya telah bersetubuh dengan dirinya. Polisi ini langsung menggelandang Gundala beserta kawannya ke Polsek Jebres. Usut punya usut, polisi menemukan fakta bahwa Gundala beserta kawannya yang lain telah memperkosa Mawar. Sementara Gundala menolak tuduhan itu. Mawar hanya akan diberi sejumlah uang setelah persetubuhan dilakukan. Satu hal yang tak bisa dipungkiri, bahwa dompet Mawar telah berpindah tangan. Ada kekerasan. Ada tendangan yang membuat Mawar tersungkur.

Agar kasus ini terang benderang, seyogyanya hakim bertindak berdasar Pasal 185 ayat (6) KUHP. Ini ada hubungannya

dengan keterangan saksi. Paling tidak, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, serta cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Idealnya, keterangan Gundala di pengadilan dapat diuji dengan keterangan saksi yang lain. Hal ini berlaku juga sebaliknya. Di sisi lain, ada kesalahan yang mendasar dalam perkara ini. Jika memang sedari awal, penyidik sudah menemukan fakta adanya perkosaan, setidaknya penyidik bisa mencari alat bukti lain seperti *visum et repertum* misalnya.

Jika hasil *visum* mendukung keterangan saksi tentang pemerkosaan, maka ada beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yaitu dugaan tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan. Hal ini dimungkinkan sebagaimana konsep “perbarengan tindak pidana”, baik yang berdiri sendiri maupun tindak pidana yang dianggap berlanjut.

Selanjutnya majelis hakim boleh saja mempertimbangkan perihal kasus persetubuhannya. Jika saja majelis hakim lebih teliti dalam menggali kebenaran dengan menggunakan logika berfikir yang benar, tentunya dihubungkan dengan alat bukti lain. Celaknya, majelis hakim justru membenarkan keterangan terdakwa sepanjang perihal ada dan tidaknya paksaan dalam persetubuhan tersebut. Di sisi lain, secara umum penanganan perkara ini sangat tidak baik. Setidaknya ada beberapa indikator yang mendukung pernyataan ini, yaitu Gundala sebagai terdakwa tidak didampingi penasihat hukum selama proses persidangan, padahal ancaman sanksi nya di atas lima tahun. Mawar juga



demikian. Ia tidak mendapatkan pendamping hukum, sehingga tak ada yang bisa menjelaskan tentang hak-haknya di pengadilan.

Selain itu, pertimbangan hakim kurang meyakinkan. Sangat minim dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang seharusnya dibuktikan. Merujuk pada hal ini, wajar jika putusan dan sanksi yang diterima Gundala tidak menguntungkan Mawar. Polisi, jaksa dan majelis hakim yang memeriksa sama sekali tidak memahami kerentanan seorang difabel wicara.

### **Pihak yang Terlibat dalam Perkara**

<b>No Register: 78/Pid.B/2013/PN.Ska.</b>	
<b>Komposisi Sidang</b>	<b>Catatan</b>
Nurdiyatmi, S.H (Hakim Ketua)	Mawar (saksi korban) dan Gundala (terdakwa) hadir tanpa didampingi penasihat hukum
S.H.D. Sinuraya, S.H (Hakim Anggota)	
Subur Susatyo, S.H.,M.H (Hakim Anggota)	
Wahyudi, S.H (Panitera Pengganti)	
Ardhias Adhi Wibowo, S.H (Jaksa)	

# Peristiwa Pada Dini Hari

---

## Gerbang Kos yang Terbuka

Pada 23 November 2013, sekitar pukul dua pagi, Hino (bukan nama sebenarnya) sedang berjalan-jalan. Hino yang lahir pada 9 Februari 1999 adalah remaja berkebutuhan khusus (difabel) lantaran mengalami *slow learner*. Persis pada saat itu, ia melintas di sebuah kos yang dikenal sebagai Kos Mentari. Letaknya di Kp. Pokaan RT 02/ RW 04, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Hino melintas dan melihat pintu gerbang kos dalam keadaan terbuka. Tidak dikunci. Di dalam garasi kos, ada sepeda motor yang terparkir. Hino berniat mengambil sepeda motor tersebut. Ia lantas pulang ke rumahnya sendiri dan mengambil kunci motor bertuliskan “honda” serta ditimpali tulisan lain “Kanmuri”.

Selesai mengambil kunci motor, ia bergegas kembali ke Kos Mentari. Sesampainya di tempat yang dituju, ia menemukan dua unit motor yang terparkir di garasi. Tanpa berpikir panjang, Hino mengambilnya salah satunya: sepeda motor Honda Grand berwarna hitam bernomor polisi AD 4387 WF. Tindakan Hino ini sama sekali tidak diketahui Warso (bukan nama sebenarnya), si pemilik motor tersebut. Setelah berhasil mengambil, Hino menaikinya. Ia berkeliling. Setelah beberapa saat, sepeda motor itu diparkir begitu saja di belakang kantor Kelurahan Jetis, persis di pinggir jalan.

Sekitar pukul setengah tiga pagi, Hino kembali hendak menaiki motor itu. Tingkahnya ternyata dipergoki Gino (bukan nama sebenarnya). Ia curiga melihat ada remaja di sekitar kantor kelurahan di luar jam kerja. Apalagi pada dini hari.

“Hai, kamu ke sini dulu! Itu sepeda motor siapa?”

“Saya tidak tahu,” jawab Hino.

Sembari menjawab, Hino lantas berjalan ke arah utara. Ia tak mau ditangkap warga. Setelah kejadian itu, pada 28 November 2013, sekitar pukul tiga sore, Hino ditangkap petugas Polsek Sukoharjo Kota. Penangkapan itu terjadi di Jalan Veteran, persis di depan Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Ia digelandang petugas dan dibawa ke Polsek Sukoharjo Kota untuk diperiksa lebih lanjut.

Kejadian itu berbuntut panjang dan masuk ke pengadilan. Jaksa menuntut Hino dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP. Ancamannya adalah pidana penjara, maksimal tujuh tahun. Untuk membuktikannya, jaksa melengkapi dengan berbagai alat dan barang bukti. Ada tiga orang saksi yang dihadirkan. Motor berserta STNK yang diambil Hino juga turut menjadi barang bukti yang dihadirkan jaksa. Selain itu juga ada kunci motor bertuliskan “honda” dan “Kanmuri”.

Jaksa mengajukan hukuman enam bulan penjara. Tuntutan ini diamini oleh hakim. Hino dianggap bersalah dan wajib menjalani hukuman. Putusan hakim ternyata lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hino dikenai kewajiban untuk menghuni jeruji besi selama tiga bulan. Jaksa tak mengajukan keberatan. Begitupun dengan Hino. Alhasil, Hino dianggap melakukan pencurian dan hukuman tersebut lantas memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat.

### **Layakkah Hukuman Itu?**

Apa yang menimpa Hino sebaiknya memang perlu analisa yang mendalam. Terutama soal penahanan dan pemenjaraan. Hino melakukan pencurian seperti yang dituduhkan pada 28 November 2013 dan disidangkan pada bulan Januari 2014. Pada saat pencurian, usia Hino baru empat belas tahun. Harus

diakui memang, pada saat proses perkara berlangsung, tak ada satupun alat bukti dan keterangan saksi yang bisa menjelaskan kebenaran umur Hino. Dalam putusannya, hakim sama sekali tak menjelaskan persoalan ini. Padahal sangat penting. Ada hubungan yang jelas antara umur dan hak anak seperti yang diatur dalam undang-undang.

Pada saat Hino melakukan pencurian, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memang sudah diterbitkan. Persoalannya, undang-undang tersebut belum bisa diberlakukan. Lantaran sebab itu, maka kasus itu dirujuk menggunakan peraturan lama atau sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, dirumuskan bahwa anak yang dapat diajukan ke persidangan adalah anak yang minimal berumur delapan tahun dan maksimal delapan belas tahun. Di sisi lain, peraturan tersebut juga mengatur soal sanksi yang bisa diterapkan kepada anak sesuai dengan batasan umur yang ada. Dibagi dalam dua kualifikasi, yaitu sanksi pidana (pokok dan tambahan) dan sanksi tindakan.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada “anak nakal” adalah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Selain itu, anak juga dapat dikenakan sanksi “tindakan”. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada “anak nakal” adalah mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Bisa juga diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Alternatif lainnya, si anak diserahkan ke Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Penerapan sanksi dan tindakan tersebut juga diatur secara rinci oleh pembentuk undang-undang, salah satunya pada Pasal

26 ayat (4) yang berbunyi: *“Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.”*

Dihubungkan dengan perkara yang menimpa Hino, perihal pembuktian soal umur tersebut menjadi penting. Karena itu akan berdampak pada sanksi yang akan diterima oleh Hino. Misalnya, jika benar Hino berusia empat belas tahun, maka hakim tidak harus memasukkannya ke penjara. Hakim bisa memberikan pidana pengawasan, yang praktiknya akan dilakukan oleh jaksa atau balai pemasyarakatan. Di sisi lain, hakim mengingkari prinsip-prinsip umum yang berlaku secara universal dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Seyogyanya, hakim memperhatikan Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Penangkapan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek.

Dan soal pendidikan. Ini yang juga tak kalah penting, Hino pada saat persidangan sedang menempuh pendidikan. Ia kelas 5 SD. Apalagi Hino diketahui memiliki kekurangan dalam berpikir. Tingkat kecerdasannya jauh di bawah rata-rata anak seusianya. Situasi ini pernah dibeberkan oleh penasihat hukum Hino di hadapan majelis hakim. Hanya saja, hakim bergeming. Kukuh pada putusannya. Padahal, sudah selayaknya, hakim memperhatikan keadaan Hino. Apalagi memang tidak ada *profile assessment* terhadap Hino. Baik jaksa atau penasihat hukumnya, sama sekali tak melakukan ini. Akhirnya bisa ditebak. Beberapa hak Hino sebagai seorang anak menjadi terlanggar.

**Pihak yang Terlibat dalam Perkara**

<b>No Register: 265/Pid.Sus/2013/PN Skh.</b>	
<b>Komposisi Sidang</b>	<b>Catatan</b>
<p>Agus Darmanto, S.H.,M.H (Hakim Ketua)</p> <p>Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H (Hakim Anggota)</p> <p>Suratni, S.H (Hakim Anggota)</p> <p>Tri Wahyuni, S.H. (Panitera Pengganti)</p> <p>Nuraisya Rachmaratri, S.H. (Jaksa)</p> <p>Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag dkk (Penasihat Hukum Hino)</p>	<p>Tidak ada <i>profile assessment</i>. Hakim tidak memperhatikan hak-hak anak</p>

# Tindakan Tak Senonoh Pak Tua

---

## **Perlakuan Kasar di Penginapan**

Martin (bukan nama sebenarnya) punya maksud jahat. Pada sekitar awal bulan Agustus 2015, ia iseng mengajak Mawar (bukan nama sebenarnya) ke sebuah penginapan. Ajakan Martin itu diterima Mawar tanpa prasangka dan curiga. Sedianya Mawar bertandang ke rumah Martin lantaran ingin bermain dengan anaknya. Mereka berdua berjanji untuk berfoto bersama. Mawar, gadis kelahiran 19 Juni 1984 ini terlahir sebagai gadis berkebutuhan khusus (difabel). Ia mengalami retardasi mental.

Pria kelahiran Jakarta pada 27 April 1966 itu membawa Mawar ke Penginapan Ndelik. Begitu sampai, ia mengajak Mawar ke sebuah kamar dan langsung menguncinya. Martin langsung menelanjangi Mawar, menariknya ke tempat tidur dan menindihnya. Tindakan tak senonoh itu dilanjutkan pada 30 Agustus 2014. Hanya saja lokasinya berbeda, di Penginapan Seibu. Untuk peristiwa kedua ini, Mawar sempat menolak. Penolakan ini tak membuat Martin berhenti. Ia malah semakin beringas. Wajah Mawar ditutupnya menggunakan penutup kepala agar tak berontak. Tindakan ini disertai ancaman mengerikan. Mawar akan disiram minyak dan dibakar seandainya tak mau menuruti kemauan Martin.

Peristiwa itu akhirnya dilaporkan dan berujung ke pengadilan. Jaksa lantas menyampaikan surat dakwaannya. Bentuknya alternatif.

### Dakwaan Jaksa

Pasal 285 KUHP	Pasal 286 KUHP	Pasal 289 KUHP
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.	Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.	Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dakwaan jaksa itu ditimpali keberatan (eksepsi) dari penasihat hukum Martin. Keberatan itu disampaikan secara tertulis pada 22 Desember 2015. Pada 3 Januari 2016, hakim mengeluarkan putusan sela. Pada intinya, hakim menolak alasan keberatan dari penasihat hukum. Ini artinya proses peradilan dilanjutkan. Guna membuktikan kesalahan Martin, jaksa mengajukan beberapa alat dan barang bukti. Proses peradilan ini menghadirkan delapan belas saksi yang terdiri atas sebelas saksi memberatkan (*a charge*) dan tujuh orang saksi meringankan (*a de charge*). Selain itu ada beberapa yang lain:



## Alat dan Barang Bukti

Surat	Barang Bukti
<p><i>Visum et repertum</i> dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito No. 38/IX/2015/RSDS, yang dibuat dan ditandatangani Tim Medis dr. Edi Padmini Setyo Siswani Sp.OG dan konsulen dokter forensik klinik dr. RA Kusparwati Ika P.SP.F,SH, tertanggal 17 September 2015.</p> <p>Hasil pemeriksaan menyatakan korban mengalami robek pada selaput dara pada arah jam 6, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan pada pemeriksaan <i>swab</i> vagina ditemukan morfologi sel <i>spermatozoa</i> dan ditemukan <i>kristal spermin</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu unit sepeda motor Honda GL 15 A1 RR M/T nomor polisi AB 6620 DN warna merah STNK atas nama Titik Subiyanti, 1 lembar STNK sepeda motor honda GL 15 A1 RR M/T nomor polisi AB 6620 DN</li> <li>2. Dua lembar selimut warna putih garis hitam dan 1 lembar selimut warna putih garis hijau, 1 (satu) lembar sprengi warna putih cokelat bermotif, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat muda merk Davin, 1 (satu) buah cebo warna biru tua, 1 (satu) buah batu bulat berdiameter 9 cm.</li> <li>3. Satu buah jaket warna cokelat, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu bertuliskan "Mrongos", 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah BH warna krem.</li> </ol>

Pada 30 Maret 2016, jaksa mengajukan tuntutan sembilan tahun penjara. Jaksa berkeyakinan kuat, Martin melanggar Pasal 285 KUHP. Tentu saja Martin dan penasihat hukumnya menolak tuntutan itu. Hanya saja, upaya tersebut boleh dibilang sia-sia. Pasalnya, pada 14 April 2016, majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman memutuskan Martin bersalah seperti yang dituntut oleh jaksa. Hakim memutuskan Martin harus berada di balik jeruji besi selama tujuh tahun. Putusan ini kembali membuat Martin dan penasihat hukumnya tak setuju. Mereka mengajukan banding.

### **Fakta Soal Kekerasan dan Ancaman Kekerasan**

Di pengadilan, akan banyak diketemukan pengertian tentang kekerasan dan ancaman kekerasan. Para penegak hukum masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda satu sama lain. Sebagai sedikit panduan, Pasal 89 KUHP bisa dijadikan sadaran. Pada pasal itu dinyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam hal ini KUHP tidak mengatur secara terang soal cara atau bagaimana seseorang membuat orang lain menjadi tidak berdaya, bahkan pingsan. Hanya saja, akibat akibat dari tidak berdaya itulah yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya.

Jika diteliti secara seksama dalam kasus ini, kekerasan dimaknai sebagai penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan dilakukan secara tidak sah. Misalnya, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang. Ini semua ada hubungannya dengan fisik. Sementara, ancaman kekerasan dianggap penggunaan kata-kata atau suatu benda, akan melakukan kekerasan baik fisik atau psikis. Akibatnya, orang yang diancam merasa tertekan, cemas bahkan takut.

Apabila dihubungkan dengan fakta bahwa Mawar adalah perempuan yang mengalami retardasi mental, menjadi menarik untuk ditelisik. Mawar diancam menggunakan batu sehingga ia takut dan diam. Hakim juga tegas. Ukuran ancaman kekerasan harus dilihat dari sudut pandang korban. Disini seolah hakim ingin mengajak orang lain untuk melihat bahwa ukuran ancaman kekerasan bisa berbeda-beda. Tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Pada posisi ini, penafsiran hakim layak diacungi jempol. Yang menjadi masalah adalah ternyata hakim tetap mengubungkan ancaman kekerasan dengan tidak adanya perlawanan dari Mawar.

Pada banyak kasus, inilah yang terjadi. Hakim terutama, ketika memeriksa kasus kekerasan seksual, selalu menghubungkan antara kekerasan berserta ancamannya dengan ada tidaknya perlawanan dari korban. Bahkan ada yang mengambil kesimpulan: jika tak ada perlawanan, berarti suka sama suka. Korban dianggap menghendaki adanya hubungan seksual. Padahal secara normatif, tidak ada aturan yang khusus mengatur soal ada tidaknya perlawanan.

Jika rujukannya adalah perlawanan, bagaimana nasib Mawar dalam kasus ini? Ia yang mengalami retardasi mental tentu saja memiliki keterlambatan berpikir dan bereaksi. Ini persis dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang saksi yang juga seorang pendamping psikolog dalam kasus ini. Oleh karena itu, apabila hakim konsisten melihat dari sudut pandang korban, maka tak selayaknya hakim mempersoalkan apakah Mawar melawan atau tidak.

Terlepas dari itu, ada beberapa putusan hakim yang lebih cenderung positif. Ini ada hubungannya dengan kekerasan seksual. Seperti Putusan PN No. 410/PID.B/2014/PN.Bgl, majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang beranggotakan Cipta Sinuraya, S.H., Syamsul Arief, S.H., M.H., dan Rendra Yozar DP, S.H., M.H. Salah satu pertimbangannya bisa dijadikan rujukan pembuktian dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual. Dalam kasus tersebut, hakim menafsirkan unsur *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya di luar perkawinan”* yang mencakup: *“membujuk dan merayu terdakwa, dengan modus asmara atau pacaran atau janji-janji manis padahal sesungguhnya hal tersebut kebohongan belaka, untuk memperdayai korban agar mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanan”*.

## Penggunaan Alat Bukti Petunjuk dan Surat

Jika dirunut secara seksama, hakim memutus perkara yang melibatkan Mawar ini dengan hanya menggunakan alat bukti petunjuk dan surat. Ini bisa ditemukan pada halaman 54 dalam Putusan No. 525/Pid.B/2015/PN Smn. Pertanyaannya sederhana. Apakah secara hukum hal itu dapat dibenarkan? Rujukannya bisa dilihat pada Pasal 188 ayat (3) KUHP. Pasal itu menyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menurut Yahya Harahap, peringatan yang digariskan dalam Pasal 188 ayat (3) KUHP merupakan “ajakan” kepada hakim agar sedapat mungkin “lebih baik menghindari” penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali, alat bukti ini dipergunakan. Hakim lebih dulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk. Kalau sudah diusahakan mencari alat bukti yang lain sampai pada batas maksimal, namun pembuktian belum mencukupi, dipersilahkan menggunakan pada alat bukti petunjuk.<sup>1</sup>

Kasus Mawar ini memang tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa itu. Tidak ada yang melihat Mawar dipaksa oleh Martin untuk melakukan tindakan tidak senonoh. Satu-satunya hanya Mawar yang menjadi saksi korban. Saksi lain hanya melihat Mawar membonceng Martin ke sebuah tempat. Dan dari pengakuan Mawar, tempat itu adalah lokasi dimana ia dipaksa

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap (2007), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika: Jakarta, Edisi Kedua, hlm. 312.

berhubungan badan. Akibat dari pemaksaan itu, termaktub dari hasil *visum* yang menuliskan bahwa selaput dara Mawar sobek pada arah jam 6. Pada pemeriksaan *swab vagina* juga ditemukan morfologi sel *spermatozoa*.

Martin sebenarnya juga tak bisa berbuat banyak. Ia tak bisa berdalih. Tak bisa membantah selain hanya membuat alibi tanpa alat bukti. Meskipun begitu, apresiasi patut diberikan kepada majelis hakim yang memutus perkara ini. Putusan ini juga bisa dijadikan rujukan bagi persitiwa yang nyaris sama. Dimana kekerasan seksual memang selalu sedikit saksi, bahkan bisa dikatakan sama sekali tidak ada, selain saksi korban.

### Pihak yang Terlibat dalam Perkara

No Register: 91/Pid.Sus/2016/PN Smn.	Catatan
RR Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H (Hakim Ketua)  Ayun Kristiyanto, S.H. (Hakim Anggota)  Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H (Hakim Anggota)  Wigati Haryati, S.H. (Panitera Pengganti)  Daru Triastuti, S.H. (Jaksa)  lham Yuli Isdiyanto, S.H. (Penasihat Hukum Martin)	Catatan minor terkait dengan penggunaan perlawanan dalam kasus kekerasan seksual

# Penolakan Yang Sia-Sia

---

## Bermula dari Kiriman Pesan

Kejadian ini berawal pada saat Fino (bukan nama sebenarnya) mengirimkan sms kepada Mawar (bukan nama sebenarnya). Peristiwa tersebut tercatat pada 20 Desember 2015. Fino, pria kelahiran 17 Februari 1991 ini berniat mengajak Mawar bermain. Ajakan Fino ternyata bersambut. Beberapa saat kemudian, ia datang ke rumah Mawar yang kebetulan memiliki kebutuhan khusus (difabel) berupa mental retardasi ringan dan daksa. Setibanya di rumah Mawar, kondisinya sepi. Tak ada seorang pun kecuali dirinya dan anak perempuan itu.

Fino lantas mempunyai niatan jahat. Ia ingin mengajak Mawar untuk bersetubuh. Pria kelahiran Sleman ini mengungkapkan keinginannya pada Mawar. Perempuan ini ternyata menolak. Penolakan yang sia-sia karena Fino tetap memaksa, bahkan merangkul dan menggendong Mawar ke sebuah kamar. Anak perempuan itu tetap menolak dengan cara meronta-ronta.

Peristiwa tersebut akhirnya berujung ke pengadilan. Jaksa menyusun dakwaan pada Fino dalam bentuk alternatif.

**Dakwaan Jaksa**

<b>Pasal</b>	<b>Bunyi Pasal</b>	<b>Ancaman Hukuman</b>
Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain	Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul	Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 285 KUHP	Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun	Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
Pasal 286 KUHP	Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun	Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
Pasal 289 KUHP	Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun	Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun



Pasal 290 ke 1 KUHP	Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.	Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
---------------------	---	--

Tuntutan jaksa itu juga dilengkapi dengan keterangan saksi yang berjumlah lima orang, termasuk Mawar sebagai saksi korban. Selain itu, ada surat dan barang bukti yang digunakan jaksa untuk menjerat Fino.

### Surat dan Barang Bukti

Surat	Satu buah surat berupa <i>visum et repertum</i> No. 001/1/2016/RSDS tertanggal 11 Januari 2016 dari RSUP Sardjito yang ditanda tangani oleh dr. Rukmono Siswishanto M.Kes Sp.Og (K)
	Satu buah surat berupa <i>visum et psychiatricum</i> No. 449/0296 tertanggal 12 No. 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sawitri Msc. Spkj dkk
	Satu buah surat berupa kartu keluarga No. 3404161607310007 tertanggal 16 Juli 2013

Barang Bukti	Satu unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam nomor polisi AB 4257 U. Nomor rangka: MH1KEV219YK083975, nomor mesin: KEV2E1083198. Atas nama STNK: JC Sigit Dwicahyono. Alamat: Jln. Flamboyan 369 PRM CC.CDCT Depok, Sleman
	Satu buah jaket bertuliskan Yamaha Mataram Sakti, warna hitam
	Satu buah kaos warna merah (bergambar Vespa tertulis "Jogja Tempo Doeloe")
	Satu celana panjang warna biru berbahan kain
	Satu celana panjang (ikat pinggang) warna hitam
	Satu topi warna hijau doreng
	Satu buah <i>handphone</i> merk Cross warna hitam berikut simcard dengan nomor sambung 087738834665
	Satu karpet dengan ukuran panjang 2 (dua) meter lebar 1,25 (satu koma dua puluh lima) meter, warna hijau
	Satu selimut (sepray) warna putih hitam lorek
	Satu buah celana dalam wanita warna putih
	Satu buah penyangga payudara (BH-mini set) warna putih
	Satu buah baju warna biru muda bertali di bagian dada
	Satu buah celana panjang jenis jeans warna biru, ukuran 27 dengan motif gambar di kedua saku belakang
	Satu buah celana dalam pria warna abu-abu merk Amitex, ukuran XL
	Satu buah <i>handphone</i> merk Hammer warna hitam berikut <i>simcard</i> dengan nomor sambung 087738127803

Pada proses pembuktian di persidangan, jaksa mengajukan tuntutan dua belas tahun penjara. Ini ditambah denda sebesar Rp. 60 juta, subsidair enam bulan kurungan. Jaksa yakin, Fino

melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (dakwaan kesatu). Tuntutan jaksa itu dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman pada 23 Mei 2016. Putusan ini berkekuatan hukum tetap lantaran jaksa dan Fino sama-sama tidak mengajukan banding.

### **Mengulik Pertimbangan Hakim**

Menarik untuk disimak, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Pada halaman 37, majelis hakim menyatakan, *“menimbang, bahwa apabila kita melihat hasil visum et repertum psychiatricum tersebut di atas maka bisa kita ambil suatu pengertian bahwa saksi korban tersebut adalah termasuk anak yang membutuhkan perhatian yang khusus dengan demikian diperlukan suatu rasa kasih sayang dan empati bagi siapa saja yang melihat dan peduli kepadanya dan hal tersebut bisa kita lihat dari penampilan saksi korban tanpa harus kita meminta pendapat ahli.”*

Frasa *“...bisa kita lihat dari penampilan saksi korban tanpa harus kita meminta pendapat ahli”* juga layak dicermati. Apa maksud hakim dengan frasa tersebut? Untuk mengulik hal tersebut, bisa dimulai dari adanya dua *visum* yang dijadikan sandaran. *Visum* pertama, seperti yang dihadirkan jaksa adalah No. 001/1/2016/RSDS tertanggal 11 Januari 2016 dari RSUP Sardjito. Kesimpulannya, sudut bawah liang senggama milik Mawar tampak luka memar berwarna kemerahan. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. Selain itu, laboratorium (*swab vagina*) ditemukan morfologi sel *spermatozoa*. Surat ini dijadikan pegangan bagi hakim jika memang ada kekerasan seksual pada Mawar.

Kedua, berupa *visum et psychiatricum* No. 449/0296 tertanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sawitri Msc. Spkj dkk. Kesimpulannya, didapatkan hasil ter IQ sebesar 69

(skala WISC). Hal ini berarti bahwa kemampuan berpikir Mawar berada dalam kategori retardasi mental ringan. Ia kurang matang dalam melakukan analisa dan mencari penyelesaian masalah. Mawar tampak kurang percaya diri dan masih membutuhkan dukungan serta arahan dari orang lain. Mawar juga mengalami depresi sedang dan retardasi mental ringan.

Merujuk pada Pasal 197 ayat (1) huruf d, mengharuskan suatu putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas. Isinya mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Artinya, majelis hakim dalam membuat pertimbangan harus berdasarkan fakta, keadaan dan juga alat bukti agar pertimbangan tersebut obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Soal difabilitas, maka akan ditemui kenyataan tentang kemampuan yang berbeda. Ini sangat terkait dengan kondisi fisik, intelektual, mental dan sensorik yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada hakim yang hanya menilai difabilitas hanya berdasarkan penampilan, sangat tidak dibenarkan. Selain sangat subjektif juga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka, fungsi *visum et psychiatricum* dalam pemeriksaan perkara ini sangat penting. Ia bisa menjelaskan karakter dan kondisi seseorang berdasarkan *profile assesment*.

Ada beberapa alat bukti yang memberi keyakinan pada hakim untuk memberikan sanksi pada Fino. Selain keterangan saksi dari beberapa orang, ada juga alat dan barang bukti. Hanya saja, hakim pada putusannya tidak menguraikan bagaimana ancaman kekerasan sekaligus kekerasan itu terjadi pada Mawar. Juga tidak ditemukan uraian perihal reaksi Mawar ketika menerima ancaman kekerasan dan kekerasan itu. Mawar mengalami retardasi mental. Akan lebih baik apabila hakim

mampu menguraikan hubungan ancaman kekerasan itu pada Mawar. Jika ini dijadikan patokan, maka akan lebih mudah untuk memahami tipologi kekerasan yang terjadi. Terutama pada anak perempuan yang mengalami retardasi mental. Uraian ini menjadi penting, agar kita dan khususnya hakim, memiliki pemahaman dasar jika ingin memeriksa perkara yang korbannya adalah difabel.

### **Pihak yang Terlibat dalam Perkara**

<b>No. Register: 91/Pid.Sus/2016/PN Smn.</b>	<b>Catatan</b>
<p>Ninik Hendras Susilowati, S.H.,M.H (Hakim Ketua)</p> <p>Wisnu Kristiyanto S.H.,M.H (Hakim Anggota)</p> <p>Zulfikar Siregar S.H.,M.H (Hakim Anggota)</p> <p>Iwan Sulistyanto, S.H (Panitera Pengganti)</p> <p>Arifiyah Minarti, S.H (Jaksa)</p> <p>Hadi Purnomo, dkk (Penasihat Hukum Fino)</p>	<p>Seyogyanya hakim lebih melengkapi putusan dengan hubungan antara kekerasan yang terjadi dengan retardasi mental.</p>

# Peristiwa di Kebun Bambu

---

## Rayuan Berujung Paksaan

Adalah Asem (bukan nama sebenarnya), Sruput (bukan nama sebenarnya) dan Nobita (bukan nama sebenarnya). Ketiga lelaki itu sama-sama berprofesi sebagai buruh. Lantaran berasal dari Kabupaten Batang dan sedang bekerja di proyek jalan tol Solo-Kertosono, mereka sepakat mengontrak rumah di Dukuh Krecek, Dusun Denggungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Menurut hemat mereka, kontrakan ini lebih dekat dengan lokasi pekerjaan. Di dukuh itu, mereka bertetangga dengan Mawar. Ia adalah anak perempuan yang memiliki kebutuhan khusus (difabel) lantaran mengalami mental retardasi ringan.

Pada hari minggu, 7 Agustus 2016, sekitar pukul delapan malam, Asem keluar kontrakan. Ia mengajak dua kawannya yang lain. Di pertengahan jalan, ia bertemu dengan Mawar.

“Warung rokok dimana, mbak?” tanya Asem.

“Ayo, saya antar,” jawab Mawar.

Setelah berputar mencari warung rokok, ternyata tak ada yang cocok. Asem tak menemukan merk rokok yang disukainya.

“Apa nggak dimarahin bapak kamu, kamu keluar malam?” tanya Asem

“Tidak,” jawab Mawar.

Sembari mencari warung rokok lain, mereka berdua terlibat percakapan. Ngobrol. Asem bahkan sempat melancarkan rayuan pada Mawar. Hanya saja ditolak mentah-mentah. Ketika sampai SDN I Denggungan, Banyudono, Boyolali, mereka berhenti. Asem duduk di pagar tembok SD bersama Mawar. Sementara dua kawan

Asem, ada yang berdiri di belakang pagar. Satu orang lain malah duduk jongkok dekat Mawar. Asem masih mencoba merayu Mawar untuk menjadi pacarnya. Anak perempuan itu mengelak dan menolak. Lantaran waktu sudah larut, mereka semua memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing.

Kejadian hampir sama terulang dua hari kemudian, 9 Agustus 2016. Waktunya juga tak bereda, sekitar pukul delapan malam. Kali ini, Asem, Sruput, Nobita bersama dengan dua orang yang lain, berniat jalan-jalan. Mereka berlima berniat membeli kopi dan rokok. Sesampainya di sebuah warung, rokok yang mereka inginkan kosong. Ketika berjalan, tiba-tiba mereka melihat Mawar. Kali ini giliran Nobita yang mencoba bertanya.

“Warung rokok dimana, mbak?”

Mawar kemudian mengantar Nobita, Sruput, beserta satu kawannya yang lain menuju sebuah warung. Sementara Asem dan satu orang lagi, menunggu di jalan. Setelah ketemu rokok yang diinginkan, Mawar beserta Nobita, Sruput dan seorang kawannya menemui Asem. Mereka berlima mengajak Mawar untuk berjalan menyusuri kebun bambu yang ada di Dukuh Krecek, Rt 04 Rw 02 Dusun Denggungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Nobita memilih berjalan bersama Mawar terlebih dahulu. Kemudian diikuti oleh Asem dan Sruput. Dua orang lainnya memilih untuk pulang ke rumah. Jadi hanya tinggal mereka bertiga.

Persis ketika sampai di kebun bambu, Sruput dan Nobita duduk berjejer dengan Mawar. Tiba-tiba Mawar beringsut mendekati Asem. Merasa ada kesempatan, Asem kembali melancarkan rayuannya.

“Mau ngajak tidur sama aku?” kata Asem. Mawar tak menjawab. Ia hanya diam tanpa memberikan persetujuan.

“Kalau kamu tidak mau, kamu tak anu!” ujar Asem, sembari mengepalkan tangannya.

Kepalan tangan itu ternyata membuat Mawar takut. Ia menurut ketika diajak Asem masuk ke kebun bambu yang gelap. Keduanya meninggalkan Sruput dan Nobita. Begitu masuk kebun bambu, Asem langsung membula celananya sampai selutut. Begitupun dengan Mawar. Asem lantas menyetubuhi Mawar, namun tak sampai selesai. Ia tak mengeluarkan air mani dan cepat-cepat memakai celana kembali. Ia kemudian menuju ke tempat dimana Sruput dan Nobita menunggu.

Begitu melihat Asem datang, Sruput langsung bergerak dan bangkit dari duduknya.

“Mau kemana, mas?” tanya Asem.

“Mau ke sana,” jawab Sruput, sembari menunjuk ke arah Mawar.

Sruput kemudian berjalan dan ia melihat Mawar tidak memakai celana. Ternyata pemandangan itu membuatnya terangsang. Ia menyuruh Mawar berbaring di tanah. Sruput langsung menyetubuhi Mawar dan mengeluarkan air mani di luar kemaluan Mawar. Setelah itu, Sruput memakai celana dan kembali ke tempat dimana Asem dan Nobita menunggu. Ternyata Nobita tak mau kalah. Ia melakukan tindakan serupa. Bedanya ia mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan Mawar. Setelah itu, mereka semua kembali ke rumah masing-masing.

### **Tuntutan Sepuluh Tahun Penjara**

Ternyata peristiwa itu berbuntut panjang. Ketiga lelaki yang melakukan perbuatan tidak senonoh itu mendapatkan getahnya. Mereka diajukan ke meja hijau. Mereka dituduh melakukan hal yang sama, hanya saja dengan berkas perkara yang berbeda. Asem dan Sruput berada dalam satu berkas pada perkara, sementara Nobita pada berkas yang lain. Perbuatan mereka membuat Mawar mengalami sobekan pada selaput daranya. Ini seperti yang tertuang



pada *visum* tanggal 23 Agustus 2016. Hasil *visum* menyebutkan ada sobek pada arah jam 3 luka lama sampai dasar. Kesimpulannya, liang senggama pernah dimasuki benda tumpul.

Hal itu dijadikan dasar bagi jaksa untuk melakukan tuntutan atau dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif.

### Dakwaan Jaksa

Pasal	Bunyi Pasal	Catatan tambahan/ Ancaman Hukuman
Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain	<p>Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 <i>jo</i> Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</p>

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 <i>jo</i> Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP  Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Pasal 81 ayat 1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul	Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 <i>jo</i> Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dakwaan jaksa itu tidak berdiri sendiri. Untuk membuktikannya, jaksa menghadirkan empat orang saksi. Ini ditambah dengan keterangan Asem dan Sruput sebagai terdakwa. Selain itu, ada beberapa alat dan barang bukti yang turut dihadirkan ke muka persidangan.

## Surat dan Barang Bukti

Surat	<p>Satu buah surat berupa <i>visum et repertum</i> no. 353/34/VIII/2016/RSUD.BI. Surat itu dikeluarkan pada 23 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L.Budiadi.Sp.OG., dokter spesialis kandungan atau kebidanan pada RSUD Pandan Arang, Boyolali. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sobekan pada arah jam 3 luka lama sampai dasar. Kesimpulannya, liang senggama pernah dimasuki benda tumpul.</p>
	<p>Laporan pemeriksaan psikologis. Laporan itu dikeluarkan pada 8 September 2016 dan ditandatangani oleh Dra. Sepi Indriati Psi. Ia adalah psikolog pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Surat tersebut menunjukkan bahwa potensi intelegensi saksi korban jauh di bawah anak seusianya. Hasil IQ 59, skala kemasakan sosial saksi korban setara dengan anak seusia 7 tahun 6 bulan. Juga ada hambatan yang menonjol dalam bersosialisasi dan berkomunikasi.</p>
	<p>Kartu keluarga dengan No. 3309091801120013. Kartu keluarga itu menunjukkan bahwa saksi korban lahir pada 3 Desember 1999. Artinya, Mawar berusia 16 tahun 8 bulan pada saat peristiwa itu terjadi</p>

Barang Bukti	Satu potong celana jeans panjang warna biru
	Satu potong celana kain panjang warna biru dongker motif kembang kembang kuning
	Satu potong kaos lengan panjang warna putih motif garis warna ungu
	Satu potong kaos lengan panjang warna merah muda
	Satu potong BH warna biru muda
	Satu potong celana dalam warna merah muda motif kembang

Setelah melewati serangkaian proses pembuktian di persidangan, Asem dan Sruput masing-masing dituntut sepuluh tahun penjara. Selain itu ada denda sebesar Rp. 2,3 milyar, subsidair tiga bulan kurungan. Jaksa yakin, mereka berdua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Tuntutan jaksa itu dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada 19 Januari 2017. Putusan ini lantas berkekuatan hukum tetap lantaran jaksa dan Asem serta Sruput sama-sama tak melakukan banding.

Hakim menilai bahwa anak yang mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya lebih gampang dibujuk. Terutama untuk dijadikan korban kejahatan. Ini yang juga terjadi pada Mawar. Dalam memberikan sanksi, hakim juga terlihat mempertimbangkan Mawar sebagai difabel. Asem dan Sruput dinilai memanfaatkan kerentanan anak perempuan itu. Pertanyaannya kemudian, bagaimana majelis hakim bisa memahami kerentanan yang dimiliki Mawar?

Nampaknya, majelis hakim sudah mempelajari dan menguji alat bukti yang diajukan oleh jaksa. Salah satunya adalah laporan pemeriksaan psikologis terhadap Mawar, tertanggal 8 September 2016. Laporan itu dikeluarkan oleh seorang psikolog pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Isinya menjelaskan bahwa potensi inteligensi Mawar jauh di bawah anak seusianya. Mawar dianggap setara dengan anak usia tujuh tahun enam bulan. Anak perempuan itu juga mempunyai masalah pada saat berkomunikasi dengan orang lain.

Selain itu, hakim juga memeriksa secara seksama dengan saksi yang ada. Ada keterangan dari saksi yang sehari-harinya bergaul dengan Mawar. Ini semua membuat hakim memiliki pandangan utuh mengenai retardasi mental. Wajar jika pada putusannya, hakim menyatakan Mawar sangat mudah dibujuk oleh Asem dan Sruput. Mawar dianggap hakim memiliki kekurangan dalam pertumbuhan mental. Satu yang patut diapresiasi adalah keberadaan laporan psikologis pada Mawar. Laporan ini menjadi dasar untuk memahami karakteristik retardasi mental. Ada kebutuhan berbeda, termasuk dalam hal berkomunikasi dan bersosialisasi.

### **Bagaimana dengan Sanksi Berupa Denda?**

Hakim mengabulkan tuntutan jaksa soal sanksi kurungan dan denda. Mengacu pada Pasal 10 KUHP, pidana denda adalah satu pidana pokok yang sampai hari ini masih sering diterapkan terhadap terpidana. Bisa diterapkan karena dianggap melanggar aturan pidana umum maupun khusus, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Bedanya, jika terkait pidana umum, maka sanksi pidana denda merupakan sanksi pokok yang berdiri sendiri. Sedangkan, pidana khusus seperti perlindungan anak, sanksi pidana dapat diberlakukan secara kumulatif dengan sanksi pokok lainnya berupa pidana penjara.

Merujuk pada pengertiannya, denda adalah sanksi untuk membayar sejumlah uang atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Denda tersebut dibayar kepada negara. Pertanyaanya, kenapa sanksi denda dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dikenakan secara kumulatif kepada pelaku?

Sebagaimana penjelasan umum pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014, Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Tujuannya untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Dari hal ini setidaknya bisa diambil kesimpulan. Ada dua tujuan dalam memberlakukan pidana penjara dan denda dalam aturan tersebut. Pertama, memberikan efek jera. Kedua, mendorong langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan atau anak pelaku kejahatan.

Jika dihubungkan dengan perkara ini, yang sanksinya berupa pidana penjara dan pidana denda, apakah kemudian fisik dan psikis anak difabel sebagai korban bisa dipulihkan dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku? Sebab sanksi denda yang dibayarkan oleh pelaku diperuntukkan buat negara. Itupun jika pelaku mampu membayar. Jika tidak, maka akan diganti dengan pidana kurungan.

Lalu bagaimana tujuan pemulihan yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang itu bisa terwujud? Anak difabel sebagai korban sering kali mengalami kerugian yang berlipat

ganda, baik diukur dari segi fisik dan psikis. Apalagi kekerasan seksual seringkali membuat rasa trauma yang berkepanjangan dan tak jarang berakibat kehamilan. Apakah korban dan keluarganya akan menanggung sendiri derita dan kerugian yang ia alami? Jika seperti ini kondisinya, maka sesungguhnya tidak ada hubungan antara sanksi pidana dengan tujuan pemberian sanksi tersebut. Berangkat dari situasi ini, kiranya perlu membuat ulang konsep dan tujuan pemidanaan dalam kasus anak difabel sebagai korban. Salah satunya pemberlakuan sanksi berupa restitusi terhadap pelaku yang diperuntukkan buat korban. Dalam sistem peradilan Indonesia, sanksi ini sebenarnya sudah diterapkan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang.

### **Pihak yang Terlibat dalam Perkara**

<b>No Register: 156/Pid.Sus/2016/PN Byl.</b>	<b>Catatan</b>
Agung Wicaksono, S.H.,M.Kn (Hakim Ketua)	Terkait dengan peraturan, sebaiknya denda bisa direstitusi kepada pihak korban
Aditya Danur Utomo, S.H (Hakim Anggota)	
Imelda, S.H (Hakim Anggota)	
Heny Sulistyowati, S.H (Panitera Pengganti)	
Inayatul Khoiriyah, S.H (Jaksa)	
Eko Hari Krisnanto, S.H (Penasihat Hukum Asem dan Sruput)	

# Rudapaksa Pekerja Jalan Tol

---

## Awalnya Mencari Kopi

Nobita (bukan nama sebenarnya) dan Wajan (bukan nama sebenarnya) adalah dua pemuda yang berasal dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bersama dengan pemuda lainnya, mereka berdua mengontrak rumah di Dukuh Krecek, Dusun Denggungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Nobita dan Wajan bekerja sebagai buruh pada proyek jalan tol Solo-Kertosono. Selama pekerjaan berlangsung, mereka mengontrak rumah agar dekat dengan lokasi pekerjaan. Kontrakan mereka dekat dengan rumah Mawar (bukan nama sebenarnya), anak perempuan yang mengalami mental retardasi.

Kejadiaannya pada hari Selasa, 9 Agustus 2016. Nobita bersama dengan dua pemuda yang lain berkenalan dengan Mawar. Awal perkenalan, Nobita sudah mulai bertindak kurang ajar. Kemudian pada hari Sabtu, 13 Agustus 2016, kurang lebih pukul delapan malam, Nobita dan Wajan beserta tiga pemuda keluar kontrakan. Mereka berniat membeli kopi. Selain membeli kopi, mereka sekalian berjalan sampai di tempat lomba perayaan kemerdekaan. Di lokasi itu, Nobita dan kawan-kawan kembali bertemu dengan Mawar. Nobita kemudian mengajak Mawar berjalan-jalan untuk mencari kopi.

Sesampainya di warung kopi, Nobita malah mengajak Mawar untuk mencari rokok. Nobita juga mengajak Wajan. Mereka bertiga berjalan menuju warung rokok terdekat. Hanya saja, warung rokok itu ternyata tutup. Keadaan di sekitar warung juga sepi. Tak ada orang yang melintas. Muncullah niat jahat Nobita.



Ia berniat melakukan tindakan asusila pada Mawar. Nobita, Wajan dan Mawar akhirnya menuju ke kebun bambu di Dukuh Krecek Rt 04 Re 02 Dusun Denggungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Saat berjalan menuju kebun bambu, Mawar selalu berada di dekat Nobita.

Sesampainya di kebun bambu, mereka semua saling ngobrol. Nobita lantas mengajak Mawar untuk pergi ke bawah pohon bambu. Begitu sampai, tiba-tiba Nobita mencium dan memeluk Mawar. Pria kelahiran Batang, 27 Maret 1994 itu akhirnya melampiaskan nafsunya ke anak perempuan yang mengalami retardasi mental. Perbuatan biadab itu ternyata dilanjutkan oleh Wajan. Setelah itu, Mawar ditinggal sendirian di tengah kebun bambu. Akibat perbuatan dua pemuda itu, selaput dara Mawar sobek.

Kekerasan seksual yang menimpa Mawar ini memang banyak melibatkan pelaku. Lantaran itu, jaksa memecah perkara ini dalam dua berkas.

**Dakwaan Jaksa**

<b>Pasal</b>	<b>Bunyi Pasal</b>	<b>Catatan tambahan/ Ancaman Hukuman</b>
Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain	Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 <i>jo</i> Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 <i>jo</i> Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP  Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Pasal 81 ayat 1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul	Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
--	---	--

Dakwaan itu kemudian diperkuat oleh jaksa melalui keterangan beberapa saksi. Ada empat saksi yang dilibatkan. Selain itu, ada beberapa yang lain, seperti keterangan langsung dari Mawar dan beberapa surat serta sejumlah barang bukti.

### Surat dan Barang Bukti

Surat	Satu buah surat berupa <i>visum et repertum</i> no. 353/34/VIII/2016/RSUD.BI. Surat itu dikeluarkan pada 23 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L.Budiadi.Sp.OG., dokter spesialis kandungan atau kebidanan pada RSUD Pandan Arang, Boyolali. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sobekan pada arah jam 3 luka lama sampai dasar. Kesimpulannya, liang senggama pernah dimasuki benda tumpul.
-------	---

	Laporan pemeriksaan psikologis. Laporan itu dikeluarkan pada 8 September 2016 dan ditandatangani oleh Dra. Sepi Indriati Psi. Ia adalah psikolog pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Surat tersebut menunjukkan bahwa potensi intelegensi saksi korban jauh di bawah anak seusianya. Hasil IQ 59, skala kemasakan sosial saksi korban setara dengan anak seusia 7 tahun 6 bulan. Juga ada hambatan yang menonjol dalam bersosialisasi dan berkomunikasi.
Barang Bukti	Kartu keluarga dengan No. 3309091801120013. Kartu keluarga itu menunjukkan bahwa saksi korban lahir pada 3 Desember 1999. Artinya, Mawar berusia 16 tahun 8 bulan pada saat peristiwa itu terjadi
	Satu potong celana jeans panjang warna biru
	Satu potong celana kain panjang warna biru dongker motif kembang kembang kuning
	Satu potong kaos lengan panjang warna putih motif garis warna ungu
	Satu potong kaos lengan panjang warna merah muda
	Satu potong BH warna biru muda
	Satu potong celana dalam warna merah muda motif kembang

### Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim

Jaksa mengajukan tuntutan kepada Nobita dan Wajan, masing-masing sepuluh tahun penjara. Itu ditambah dengan sebesar Rp. 2,5 milyar, subsidair tiga bulan kurungan. Jaksa yakin, mereka berdua bersalah karena melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke

1 KUHP. Tuntutan jaksa itu dikabulkan hakim. Pada 19 Januari 2017, majelis hakim Pengadilan Negeri Boyolali mengeluarkan putusan persis seperti apa yang diminta jaksa. Putusan ini lantas mengikat karena jaksa, Nobita dan Wajan sama-sama tak mengajukan banding.

Jika dirunut secara detail, kasus ini tak berbeda dengan kasus sebelumnya. Asem dan Sruput yang melakukan kekerasan seksual kepada Mawar, dijatuhi hukuman yang sama dengan Nobita. Ini terjadi lantaran mereka semua memang berteman satu sama lain. Hukuman yang mereka terima paling tidak sudah pada tataran memuaskan. Hanya memang soal denda ini yang nampaknya perlu diperhatikan. Selama ini denda masuk ke kas negara, ada baiknya, pembentuk undang-undang melakukan hal yang berbeda. Agaknya, jika denda juga diterima korban, mungkin akan lebih berguna.

**Pihak yang Terlibat dalam Perkara**

<b>No Register: 156/Pid.Sus/2016/ PN Byl.</b>	<b>Catatan</b>
<p>Agung Wicaksono, S.H.,M.Kn (Hakim Ketua)</p> <p>Aditya Danur Utomo, S.H (Hakim Anggota)</p> <p>Imelda, S.H (Hakim Anggota)</p> <p>Heny Sulistyowati, S.H (Panitera Pengganti)</p> <p>Inayatul Khoiriyah, S.H (Jaksa)</p> <p>Eko Hari Krisnanto, S.H (Penasihat Hukum Asem dan Sruput)</p>	<p>Terkait dengan peraturan, sebaiknya denda bisa direstitusi kepada pihak korban</p>

# Ulah Tak Beradab Sang Ayah

---

## Kejadian pada Dini Hari

Mawar (bukan nama sebenarnya) adalah gadis berusia sembilan belas tahun. Sehari-hari ia mengenakan kursi roda. Selain itu, diketahui bahwa Mawar mengalami retardasi mental dan daksa. Dan kejadian ini bermula pada 19 Februari 2016, sekitar pukul satu dini hari di rumahnya sendiri yang bertempat di Desa Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada saat itu, ia sedang bersama adiknya di sebuah kamar. Mereka didampingi oleh sang ayah yang bernama Superman (bukan nama sebenarnya).

Pada saat adiknya tertidur, Mawar tiba-tiba dikejutkan oleh sikap ayah kandungnya. Superman mencium pipi Mawar dan menyuruhnya untuk memegang alat kelaminnya.

“Ti, *demok manukku* (Ti, pegang kemaluanku),” kata Superman.

Mawar menurut. Ia memegang alat kelamin milik ayah kandungnya. Selepas itu, Superman melepas celananya. Termasuk celana dalam yang ia pakai. Ia juga melepas celana dalam milik Mawar. Tak berhenti sampai disitu. Pria paruh baya kelahiran 31 Desember 1973 itu memasukkan jari telunjuknya ke alat kelamin Mawar. Ia juga rela menyetubuhi anak kandungnya itu hingga ia mengeluarkan sperma.

Kejadian itu berbuntut panjang lantaran sampai ke ranah hukum. Jaksa lantas memberikan tuntutan pada Superman. Bentuknya alternatif.

**Dakwaan Jaksa**

<b>Pasal</b>	<b>Bunyi Pasal</b>	<b>Ancaman Hukuman</b>
Pasal 294 ayat (1) KUHP	Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya dianya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.	Pidana paling lama tujuh tahun
Pasal 286 KUHP	Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.	Pidana paling lama sembilan tahun
Pasal 289 KUHP	Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.	Pidana paling lama sembilan tahun

Dakwaan itu tidak berdiri sendiri. Jaksa melengkapinya dengan keterangan langsung dari Mawar dan ditambah dengan empat orang saksi. Selain itu ada beberapa surat dan barang bukti.



### Surat dan Barang Bukti

Surat	Satu buah surat berupa <i>visum et repertum</i> No. 445/463/2016 tertanggal 22 Februari 2016 dari RSUD Kabupaten Sukoharjo yang ditandatangani oleh dr. Gede Sri Dhyana MA. SpOG.
	Satu buah surat berupa hasil <i>assessment</i> psikologi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tertanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dra. Sepi Indriati Psi.
Barang Bukti	Satu buah tikar berwarna krem
	Satu buah kaos oblong lengan pendek berwarna biru
	Satu buah celana pendek 7/8 berwarna hitam
	Satu buah celana dalam berwarna abu abu tua
	Satu stel baju dan celana <i>babydoll</i> warna <i>pink</i>

Pada 7 Juni 2016, jaksa mengajukan tuntutan delapan tahun penjara untuk Superman. Jaksa yakin, pria yang berprofesi sebagai buruh lepas itu melanggar Pasal 286 KUHP, yang merupakan dakwaan kedua. Apa yang dituntut jaksa disetujui oleh hakim. Pada 21 Juni 2016, Superman dijatuhi hukuman penjara selama delapan tahun. Putusan ini akhirnya berkekuatan hukum tetap lantaran jaksa dan Superman sama-sama tidak mengajukan banding.

### Tafsiran Ulang Hakim

Menarik untuk dicermati, bagaimana hakim menafsirkan unsur “tidak berdaya” bagi Mawar yang mengalami retardasi mental. Salah satu pertimbangan yang majelis hakim sampaikan

dalam putusannya adalah: *“Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya yang dapat diartikan juga bahwa orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun, di mana orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya.”*

Pertimbangan selanjutnya malah lebih jelas. Mawar sejak lahir harus menggunakan bantuan kursi roda untuk beraktivitas. Ia hanya dapat merangkak. Selain daksa, ia juga mengalami retardasi mental. Dalam persidangan juga terungkap, meski sudah berusia sembilan belas tahun, mentalnya sama dengan anak usia empat tahun empat bulan. Parahnya, kekerasan seksual justru dialaminya karena perilaku bejat sang ayah. Kasus ini sendiri sampai ke pengadilan lantaran diadukan oleh ibu kandungnya.

Yang agak mengherankan, hakim masih menghubungkan antara ketidakberdayaan dengan ada tidaknya perlawanan dari Mawar. Kesimpulannya, jika berdaya, maka korban harus melakukan perlawanan saat akan disetubuhi. Padahal aturan hukum tidak mengharuskan demikian. Hakim juga menjelaskan, tidak berdaya itu adalah orang yang tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki tenaga sama sekali. Ketidakberdayaan diukur dari segi fisik. Pertanyaannya, apakah ketidakberdayaan itu bisa diukur dari segi yang lain? Baik itu diukur dari segi psikis, kejiwaan atau mentalitas seseorang? Apakah seorang difabel retardasi mental seperti Mawar bisa dianggap tidak berdaya?

Dalam perkara ini, tafsir ketidakberdayaan dari segi fisik mungkin bisa dianggap pas. Mawar memang mengalami difabel ganda, mental dan daksa. Tafsir lain juga bisa disimak, bahwa

ketidakberdayaan itu lantaran keterbelakangan metal. Ia tidak dapat berpikir seperti layaknya orang dewasa. Akibatnya, ia tak memahami perbuatan yang dilakukan.<sup>1</sup> Penjelasan ini menyimpulkan bahwa difabel mental itu bagian dari tidak berdaya.

Penjelasan ini bisa diuji lebih lanjut. Perhatikan penilaian dari seorang ahli yang sering berhadapan dengan difabel retardasi mental. Menurut drg. Siti Salmiah, keterbelakangan mental atau lazim disebut retardasi mental (RM) adalah suatu keadaan dengan intelegensia yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak-anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utama ialah intelegensi yang terbelakang. Retardasi mental disebut juga oligofrenia (oligo = kurang atau sedikit dan fren + jiwa) atau tuna mental. Keadaan tersebut ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada di bawah rata-rata dan disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri atau berperilaku adaptif.<sup>2</sup> Selanjutnya, seseorang dikatakan retardasi mental bila memenuhi kriteria: fungsi intelektual umum di bawah normal, ada kendala dalam perilaku adaptif sosial dan gejala itu timbul dalam masa perkembangan, yaitu di bawah usia 18 tahun.

Yang dimaksud fungsi intelektual di bawah normal yaitu apabila IQ di bawah 70. Anak ini tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah biasa karena cara berpikirnya yang terlalu sederhana. Daya tangkap dan daya ingatnya lemah. Demikian pula dengan pengertian bahasa dan berhitungnya juga sangat lemah. Sedangkan yang dimaksud dengan perilaku adaptif sosial

---

<sup>1</sup> Diakses dari [http://hukumonline.com/klinik/detail/lt507d7f43b8b71/](http://hukumonline.com/klinik/detail/lt507d7f43b8b71/jerat-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-terhadap-penderita-gangguan-mental) jerat-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-terhadap-penderita-gangguan-mental

<sup>2</sup> drg. Siti Salmiah, (2002), *Retardasi Mental*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 4.

adalah kemampuan seseorang untuk mandiri, menyesuaikan diri dan mempunyai tanggung jawab sosial sesuai dengan kelompok umur dan budayanya. Pada penderita retardasi mental, gangguan perilaku adaptif yang paling menonjol adalah kesulitan menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar. Biasanya, tingkah lakunya kekanak-kanakan. Tidak sesuai umurnya. Gejala tersebut harus timbul pada masa perkembangan, yaitu di bawah umur 18 tahun. Apabila gejala tersebut timbul setelah berumur 18 tahun, bukan lagi disebut retardasi mental, tetapi penyakit lain sesuai dengan gejala klinisnya.

Untuk itu, ada penggolongan anak retardasi mental yang bisa dinilai dari IQ nya, yaitu:<sup>3</sup>

1. IQ 50-79, anak pada kelompok ini masih mempunyai kemampuan dalam akademik setara dengan anak reguler pada kelas 5 SD.
2. IQ 25-49, anak pada kelompok ini masih mempunyai kemampuan dalam mengurus diri sendiri, pertahanan diri dan penyesuaian sosial. Sangat terbatas kemampuannya untuk mendapatkan pendidikan secara akademik.
3. IQ <25, dengan pemberian latihan yang terus menerus dan khusus, dapat melatih anak tentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri dan kemampuan yang bersifat komunikatif. Hal ini biasanya memerlukan pengawasan dan dukungan yang terus menerus.

Berdasarkan uraian di atas, seharusnya bisa diuji dengan hasil *assesment* psikologi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tanggal 08 Maret 2016. Sayangnya, hasil *assesment* tersebut tidak menjelaskan berapa IQ nya saksi korban. Terlepas dari itu semua, sesungguhnya difabel retardasi mental tersebut dapat

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

diartikan sebagai kondisi ketidakberdayaan. Untuk mengurus diri sendiri, pertahanan diri dan juga kemampuan komunikatif butuh dukungan dan dorongan terus menerus dari orang yang lain.

Di sisi lain, harus juga dipahami bahwa retardasi mental itu bukanlah penyakit. Ketidakberdayaannya harus juga dipahami secara kontekstual. Penilaian tersebut di atas, sesungguhnya sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karenanya, dalam setiap proses peradilan yang melibatkan difabel mental sebagai salah satu pihak, haruslah terlebih dahulu dilakukan *assesment*.

### **Pihak yang Terlibat dalam Perkara**

<b>No Register: 69/Pid.Sus/2016/ PN Skh.</b>	<b>Catatan</b>
<p>Boxgie Agus Santoso, S.H.,M.H (Hakim Ketua)</p> <p>Indriani, S.H., MKn (Hakim Anggota)</p> <p>Yulia Susanda, S.H., M.H (Hakim Anggota)</p> <p>Wasiman (Panitera Pengganti)</p> <p>Ghilang Pradiantoro, S.H (Jaksa)</p> <p>Sumarsoni, dkk. (Penasihat Hukum Superman)</p>	<p>Hakim masih menghubungkan ketidakberdayaan dengan ada tidaknya perlawanan</p>

## Perilaku Miring Pak Tani

---

### Ketahuan Lantaran Hamil

Mister (bukan nama sebenarnya) bertemu dengan Mawar (bukan nama sebenarnya) pada bulan September 2015. Pertemuan itu terjadi sekitar pukul tiga sore. Saat itu Mawar sedang mengasuh adiknya. Mister menyuruh Mawar untuk masuk rumah Supri (bukan nama sebenarnya), yang notabene adalah ayah Mawar. Alamat rumah itu ada di Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Setelah masuk rumah, Mister duduk di sebuah kursi di ruang tamu. Ia membuka telpon genggamnya bermerk Politron. Ia lantas memutar film porno.

*“Kowe arep ndelok video iki ora (kamu mau menonton video ini nggak)?”* tanya Mister pada Mawar.

Perempuan yang mengalami retardasi mental dan daksa ini menolak. *“Ora, lik. Aku isin (Tidak, paman. Aku malu),”* jawabnya.

Setelah itu, Mister pulang ke rumahnya dan disusul oleh Mawar. Setibanya di rumah, mencuci pakaian. Mawar yang tak punya rasa curiga apapun berusaha untuk membantu. Apa yang dilakukan Mawar ternyata memuat Mister berniat kurang ajar. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini berniat menyetubuhi Mawar.

*“Ayo, saiki kawin (mari, sekarang bersetubuh),”* kata Mister.

*“Nek meteng, piye lik? (Kalau hamil, bagaimana paman?),”* jawab Mawar.

*“Mengko nek kowe meteng, aku tanggungjawab. Tak ijab (Nanti kalau kamu hamil, aku tanggungjawab. Aku ijab),”* sahut pria kelahiran 4 Juni 1968 ini.

“*Piye, gelem ora?* (Bagaimana, mau tidak?),” tanya Mister.

Mawar tak menjawab dan hanya tersenyum. Senyuman yang justru membuat Mister kalap. Ia menyuruh Mawar untuk menungging. Kedua tangan Mawar memegang pintu kamar mandi. Mister lantas melepas celana pendek dan celana dalam yang dipakai Mawar dan menurunkannya sampai sebatas lutut. Ia juga melakukan hal yang sama. Mister menyetubuhi Mawar sampai beberapa menit dan memberikannya uang sebesar Rp. 5 ribu.

Mister mewanti-wanti agar Mawar tidak bercerita kepada siapapun. Ternyata Mawar menurut. Merasa mendapatkan kesempatan, hal yang sama dilakukannya pada bulan November 2015 dan Januari 2016. Lambat laun Mawar hamil. Kedua orang tuanya lantas melaporkan kelakuan Mister ke polisi dan peristiwa itu masuk ke pengadilan.

Jaksa lantas menyampaikan tuntutananya atas perilaku Mister. Bentuknya alternatif.

**Dakwaan Jaksa**

Pasal	Bunyi Pasal	Pasal Terkait	Ancaman Hukuman
Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 <i>jo</i> Pasal 65 ayat (1) KUHP	Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.	<p>Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014:</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</p>	<p>Penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>Denda paling banyak Rp. 5 milyar</p>
		<p>Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014:</p> <p>Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain</p>	



Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 <i>jo</i> Pasal 65 ayat (1) KUHP	Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014:  Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.	Penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun. Denda paling banyak Rp. 5 milyar
--	--	---	--

Dakwaan jaksa itu diperkuat dengan keterangan saksi sebanyak lima orang, termasuk Mawar sebagai saksi korban. Mister juga diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan. Bahkan ia mengakui telah menyetubuhi Mawar sebanyak tiga kali. Selain itu ada surat dan barang bukti lain.

### Surat dan Barang Bukti

Surat	<p><i>Visum et repertum</i> No. 353/1037 tertanggal 29 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kuncoro. Ia adalah dokter pada UPT Puskesmas Ponjong dari Rumah Sakit Umum Pelita Husada. Hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan luar pada tubuh pasien tidak dilakukan karena kejadian sudah lama.</li> <li>2. Dilakukan pemeriksaan USG Janin tunggal hidup, presentasi kepala, DJJ + Punggung kiri, Plasenta di fundus, BPD 6,3 cm, umur kehamilan 26 + 5 minggu tunggal hidup</li> </ol>
-------	--

Barang Bukti	Dua buah celana <i>levis</i> warna biru sobek di bagian dengkul merk <i>calbin</i> dan <i>leago</i> .
	Satu buah kaos warna biru bertuliskan Partai Nasdem
	Satu buah unit <i>handphone</i> merk Politron warna hitam <i>list</i> hijau.
	Satu buah celana pendek warna ungu motif bunga-bunga
	Satu buah kaos kuning bertuliskan " <i>way you should to be happy</i> ".
	Satu buah celana dalam warna kuning muda
	Satu buah celana pendek warna merah muda
	Satu buah BH warna biru laut

Setelah melakukan proses pembuktian, jaksa mengajukan tuntutan empat belas tahun penjara. Ini ditambah dengan denda Rp. 60 juta, subsidair enam bulan kurungan. Jaksa yakin bahwa Mister terbukti bersalah. Ia melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan dakwaan kesatu. Tuntutan itu ternyata dikabulkan hakim. Pada 27 Juli 2016, hakim memutus perkara itu persis dengan apa yang dituntut jaksa. Putusan ini lantas berkekuatan hukum tetap. Jaksa dan Mister sama-sama tak melakukan banding.

### Peran Pendamping Layak Diapresiasi

Kasus ini layak diperhatikan. Terutama mengenai peran pekerja sosial atau pendamping pada difabel mental. Dan pada bulan Mei 2016, perkara ini mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Wonosari. Kekerasan seksual itu menyebabkan Mawar hamil. Pada saat itu, umurnya tujuh belas tahun tetapi belum genap delapan belas tahun. Harus diakui bahwa penyelesaian perkara ini relatif lebih mudah. Setidaknya, keterangan terdakwa yang mengakui telah melakukan hubungan seksual menjadi

faktor yang memudahkan proses selanjutnya.

Di sisi lain, peran pekerja sosial juga diakui oleh majelis hakim, sebagaimana pertimbangannya yang menyatakan bahwa:<sup>1</sup>

*“menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum, mengingat akibat yang ditimbulkan terhadap korban yang masih berusia di bawah umur serta korban adalah anak yang menurut pandangan hakim masuk kategori anak difabel dalam pasal 1 huruf 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di mana anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban saat pemeriksaan sedang mengandung 9 bulan, itu jelas merusak masa depan saksi korban dan setelah melahirkan apa yang akan dilakukan korban masih bingung belum bisa memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, oleh sebab itu selama pemeriksaan saksi didampingi oleh orang tua dan pekerja sosial.”*

Pada saat pemeriksaan perkara ini, Undang-Undang No 8 Tahun 2016 baru saja disahkan oleh DPR. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut mengatur soal kewajiban penegak hukum meminta pertimbangan kepada pekerja sosial sebelum memeriksa seorang difabel. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa, *“penegak hukum sebelum memeriksa difabel wajib meminta pertimbangan atau saran dari: (a) Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; (b) Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau (c) Pekerja sosial mengenai*

---

<sup>1</sup> Pertimbangan hlm. 34-35 pada putusan perkara N. 48/Pid.Sus/2016/PN. Wno.

*kondisi psikososial.*

Sehubungan dengan amanah pasal tersebut, ternyata tidak hanya pekerja sosial yang wajib dimintakan pertimbangan sebelum memeriksa seorang difabel. Ada juga dokter dan peran psikolog yang terlibat dalam proses ini. Kewajiban ini patut dicari tahu, untuk apa pertimbangan itu harus dimintakan terlebih dahulu? Apakah ini akan berdampak pada pemenuhan hak-hak difabel?

Mengenai pekerja sosial, diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Bab IV tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Difabel dan bagian kedua tentang Keadilan dan Perlindungan Hukum. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka keberadaan pekerja sosial ini dibutuhkan untuk kepentingan proses peradilan yang melibatkan difabel sebagai salah satu pihak. Bisa sebagai saksi, korban atau bahkan tersangka dalam proses peradilan pidana. Praktiknya, pekerja sosial tersebut akan selalu mendampingi difabel dalam setiap proses peradilan. Selain memang dapat juga didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara. Tentu saja, keberadaan pekerja sosial dan penasihat hukum berbeda fungsi dan perannya.

Mengenai keadilan dan perlindungan hukum, undang-undang merumuskan beberapa hak yang dimiliki oleh difabel. Satu diantaranya adalah hak untuk memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.<sup>2</sup> Sedangkan aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Akan tetapi, pembentuk undang-undang belum merumuskan secara detil tentang aksesibilitas apa saja yang seharusnya didapat oleh difabel dalam setiap proses peradilan. Apakah keberadaan pekerja sosial juga untuk memenuhi aksesibilitas itu? Jika dicermati, maka jawabannya iya. Keberadaan pekerja sosial untuk memenuhi

---

<sup>2</sup> Pasal 9 huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.

aksesibilitas tersebut, dalam hal ini memberikan pertimbangan soal psikososial seorang difabel yang akan diperiksa oleh penegak hukum.

Praktek selama ini, aksesibilitas yang lazim digunakan oleh difabel adalah keberadaan penerjemah bahasa isyarat. Penerjemah tersebut dihadirkan guna memenuhi aksesibilitas difabel rungu wicara dalam hal berkomunikasi kepada penegak hukum. Hal ini sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang hukum acara pidana atau KUHP. Kembali pada perkara No 48/Pid.Sus/2016/PN.Wno, saksi korban adalah seorang difabel mental sebagaimana diakui oleh majelis hakim dalam putusannya. Selain itu, majelis hakim juga menyatakan bahwa pekerja sosial dibutuhkan keberadaannya selama pemeriksaan perkara ini. Tujuannya agar saksi korban dapat berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak di hadapan hukum. Pertimbangan majelis hakim ini harus dimaknai sebagai suatu bentuk pemenuhan aksesibilitas bagi saksi korban, meskipun undang-undang belum merumuskan bentuk dan macam aksesibilitas bagi difabel dalam proses peradilan.

Masih tentang aksesibilitas, meskipun sudah ada keberadaan pekerja sosial, ternyata dalam perkara ini tidak ada hasil *assesment* psikologi terhadap Mawar. Padahal hasil *assesment* itu dapat menjadi bukti yang bisa digunakan oleh hakim untuk menilai dan memahami karakter dan kerentanan seorang difabel mental. Hakikatnya, hasil *assesment* tersebut sama pentingnya dengan *visum et repertum*. Bedanya, hasil *assesment* akan banyak menguraikan kondisi psikis atau mental seseorang, baik sebelum tindak pidana terjadi atau sesudah tindak pidana terjadi. Kegunaannya, hasil *assesment* ini bisa dipakai oleh majelis hakim untuk membantah keberatan atau pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya yang menyatakan bahwa saksi korban memiliki hambatan dan dianggap

tidak memadai untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

Pembelaan seperti ini harus dimaknai sebagai bentuk ketidakpercayaan seorang penasihat hukum terhadap difabel karena dianggap tidak mampu memberikan keterangan. Kalaupun mampu, keterangannya tidak akan dipercaya atau dimaknai sebagai suatu kebohongan oleh orang lain. Padahal difabel mental itu dapat dan mampu berkomunikasi, dengan syarat diberikan aksesibilitas baginya. Atas perkara ini, sudah tepat pemaknaan hakim terhadap keberadaan pekerja sosial yang senantiasa mendampingi saksi korban dalam setiap pemeriksaan. Meskipun di sisi lain, negara belum juga merumuskan bentuk dan macam aksesibilitas bagi difabel dalam proses peradilan.

### Pihak yang Terlibat dalam Perkara

No. Register: 48/Pid.Sus/2016/PN. Wno.	Catatan
Kurnia Sari Alkas, S.H.,M.H (Hakim Ketua)  Agung Budi Setiawan, S.H.,M.H (Hakim Anggota)  Agung Sulistiono, S.H.,M.H (Hakim Anggota)  Salidi, S.H (Panitera Pengganti)  Darmawati, S.H (Jaksa)  Purwatiningsih, S.H.,dkk (Penasihat Hukum Mister)	Belum ada <i>profile assessment</i> kepada korban

## BAB VI

# Epilog

Dr. G. Sri Nur Hartanto, S.H., L.L.M.

**P**enelitian ini tak berhenti pada kertas kerja belaka. Terkait dengan difabel yang berhadapan dengan hukum, muncul upaya untuk melibatkan para pemangku kebijakan yang lain. Mereka yang dilibatkan adalah aparat penegak hukum dan aparat desa, keluarga dan organisasi difabel serta tokoh masyarakat, dimana permasalahan hukum terjadi. Metode yang digunakan adalah *Focus Group Discussion* (FGD). Dilakukan sebanyak dua kali dengan peserta yang berbeda.<sup>1</sup> Dalam dua kali FGD yang telah digelar, ada empat aspek yang dibahas, masing-masing adalah (a) beragam pandangan soal difabilitas, (b) hambatan penanganan kasus, (c) peluang guna mendorong penyelesaian kasus dan (d) rekomendasi penanganan kasus.

---

<sup>1</sup> Selama bulan Juli 2017 telah diadakan dua kali FGD. Pertama, FGD diadakan tanggal 20 Juli 2017 yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan keluarga difabel serta pendamping. FGD kedua diadakan pada 26 Juli 2017, dihadiri oleh aparat penegak hukum, organisasi difabel dan pendamping.

### **A. Beragam Pandangan Soal Disabilitas**

Dalam dua kali FGD, peserta secara sudah memahami konsep disabilitas atau difabel. Mereka memahaminya sebagai kemampuan yang berbeda atau *different be able*. Melalui angka statistik, dalam FGD pertama, hanya satu orang peserta dari total dua puluh satu peserta yang menyebut difabel dengan sebutan “abnormal”. Mereka setuju bahwa difabel tetap mempunyai hak dalam kerangka hak asasi manusia. Difabel adalah bagian dari warga negara sebagai pemangku hak.

Di FGD kedua, nyaris tak ada perbedaan. Hanya satu peserta dan total dua puluh peserta yang menganggap difabel sebagai “orang cacat atau berkemampuan terbatas”. Peserta juga setuju, bahwa difabel harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan setara. Terutama di lingkungan peradilan. Mereka juga mengamini sebuah hal. Banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami difabel. Banyak persepsi salah yang beredar. Dampaknya, difabel tidak mendapatkan perlakuan yang adil ketika dihadapkan pada masalah hukum.

### **B. Hambatan Penanganan Kasus**

Dua kali penyelenggaraan FGD juga memunculkan beberapa hambatan soal penanganan kasus. Misalnya, hambatan yang justru berasal dari keluarga korban sendiri. Selain itu ada hambatan yang bersinggungan dengan masyarakat, pemerintah atau pemerintah desa serta penegak hukum. Tabel di bawah ini merupakan temuan hambatan-hambatan yang sempat muncul dalam FGD.



Korban dan Keluarga	Aparat Hukum, Pemerintah dan Lembaga
<p>Korban tidak mau didampingi saat menghadapi permasalahan hukumnya. Alasannya, ada ancaman dari masyarakat jika kasus diproses sampai ke pengadilan. Mereka akan diasingkan oleh masyarakat.</p>	<p>Ada juga intimidasi dari aparat di tingkat dusun dan desa. Mereka akan mempersulit perolehan surat-surat berkaitan dengan administrasi kependudukan. Hal ini dilakukan apabila permasalahan hukum masuk ke pengadilan</p>
<p>Keluarga korban justru tidak mau mendampingi korban dan juga tidak mau bekerja sama dalam proses pendampingan kasus. Alasannya, kalau kasus diproses secara hukum, maka yang akan dihukum hanya pelaku.</p> <p>Korban tidak mendapat kompensasi apapun. Oleh karena itu, lebih dikedepankan “penyelesaian damai”. Dilakukan kesepakatan berupa ganti rugi uang ataupun korban dinikahkan dengan pelaku (dalam kasus kekerasan seksual).</p>	<p>“Penyelesaian damai” sering melibatkan aparat pemerintah tingkat dusun dan desa. Bahkan ada aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat kepolisian, yang menjadi saksinya. Penyelesaian seperti ini didukung juga oleh budaya “permisif” masyarakat.</p> <p>Mereka cenderung tidak mau atau enggan mempersoalkan ketidakadilan yang terjadi. Temuan yang didapat atas fenomena tersebut juga dikaitkan dengan minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum yang dimiliki korban dan keluarganya.</p>
	<p>Adanya pelabelan (stigmatisasi) dari perangkat desa dan masyarakat yang menyebut korban “bukan dari keluarga baik-baik”. Dengan demikian, tidak perlu diupayakan penyelesaian hukum atas kasus yang menimpanya.</p>

<p>Korban takut menjalani proses medis, khususnya pemeriksaan <i>visum</i>, yang akhirnya berdampak pada penanganan kasus tidak maksimal.</p>	<p>Kesaksian korban difabel seringkali diragukan oleh penegak hukum. Ini terjadi pada korban difabel mental retardasi. Kesaksiannya dianggap tidak konsisten. Kasusnya tidak dilanjutkan bahkan dihentikan penanganannya. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya SP3 oleh pihak kepolisian.</p> <p>Aparat kesulitan dalam memeriksa korban apabila suasana hati atau jiwa korban sedang tidak bagus. Apalagi terhadap korban yang tidak bersekolah</p>
<p>Kondisi korban yang keadaan jiwa atau suasana hatinya tidak selalu baik (<i>unstable mood</i>). Ini terjadi pada saat menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus yang dialaminya. Pemeriksaan dapat berlarut-larut atau membutuhkan waktu yang lama.</p> <p>Di samping itu, terkait korban sebagai difabel tuli, terdapat kendala bahasa. Ia tidak mengenal bahasa isyarat. Ini banyak dialami korban disabilitas tuli yang tidak bersekolah atau tidak mengeyam pendidikan formal.</p>	

<p>Korban difabel tuna rungu dan mental retardasi sering tidak mengetahui kalau yang dialami adalah bentuk tindak kekerasan atau kejahatan seksual. Apalagi kalau pelaku adalah orang terdekat. Mereka beranggapan itu bukan tindakan kekerasan seksual. Akibat dari ketidaktahuan ini, tentu dapat mempersulit proses pemeriksaan.</p>	<p>Pertanyaan penyidik kepada korban disabilitas, “Apakah saat kejadian, apakah kamu merasakan enak atau sakit?” Dijawab oleh korban, “enak.”</p> <p>Dampaknya, timbul keraguan aparat penegak hukum atau penyidik terhadap kejadian pemerkosaan atau kekerasan seksual.</p> <p>Pertanyaan-pertanyaan penyidik seperti di atas juga menjadi kendala tersendiri bagi korban difabel.</p>
	<p>Belum ada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan Disabilitas, yang ada baru unit PPA saja.</p>
	<p>Pengembangan personil untuk unit PPA dan Disabilitas belum disetujui secara kelembagaan.</p>
	<p>Belum bisa memberikan atau menjamin pemenuhan hak privasi korban.</p>
	<p>Belum ada konsep yang jelas terkait pemberian hak konsesi sehingga belum bisa diterapkan langsung di kepolisian, terutama di tingkat Polres.</p>
	<p>Minimnya aksesibilitas dalam proses penegakan hukum, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lembaga masyarakat.</p>

Hakim saat memeriksa difabel sebagai terdakwa atau pelaku seringkali ragu. Apakah difabel tersebut dapat dianggap sebagai orang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak?

Kalau dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka yang bersangkutan dibebaskan. Namun apabila ia dianggap bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, seberapa kadar kesalahannya? Hal ini berbeda dengan sikap hakim yang dengan tegas memeriksa dan memutuskan kasus-kasus hukum yang korbannya adalah difabel. Kalau penyandang disabilitas sebagai korban, hakim tersebut tegas mengatakan, “hantam saja!”

Kurang atau minimnya tenaga ahli untuk memperkuat penanganan kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum. Hal ini terutama berkaitan dengan pemeriksaan *visum psichiatrium* (visum kejiwaan). Padahal hal itu dilakukan untuk mengukur traumatik yang dialami, untuk menentukan perbedaan usia mental dan usia kronologis dan untuk mengukur IQ atau kecerdasan dalam menganalisis atau mempertimbangkan keputusan diri.

	<p>Penegak hukum tidak memahami aksesibilitas dan <i>reasonable</i> akomodasi apa saja yang dibutuhkan oleh difabel. Maka <i>profile assessment</i> terkait difabel yang berhadapan dengan hukum diperlukan untuk menilai kebutuhan-kebutuhan dan sarana prasarana yang diperlukan untuk mempermudah difabel dalam proses peradilan.</p>
	<p>Kualifikasi penerjemah sangat ditentukan oleh <i>profile assessment</i> dan juga cara untuk menggali informasi terhadap difabel. Keterangan ahli terkait dengan disabilitas sebagai pembuktian hukum ada di dalam <i>profile assessment</i> yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.</p>
	<p>Sejumlah rumah sakit pemerintah (tingkat RSUP) yang masih menarik biaya terkait pemeriksaan <i>visum</i>. Temuan yang didapatkan adalah di RSUP Sardjito Yogyakarta dan RS Moewardi Solo.</p> <p>Di RSUP Sardjito misalnya, hasil <i>visum</i> didapatkan setelah satu bulan. Lebih dari itu, masih minimnya <i>profile assesment</i> dan catatan psikologis terhadap difabel berhadapan dengan hukum (yang menguraikan tentang hambatan dan kerentanan disabilitas), tentu berdampak pada penanganan kasus, termasuk pemeriksaan di pengadilan.</p>

Selain hambatan itu, ada juga hambatan lain yang dihadapi penerjemah. Mereka dituntut untuk bersertifikasi. Masalahnya, korban membutuhkan seseorang yang dekat dengan dirinya saat menterjemahkan bahasa isyarat. Tak jarang, yang paham bahasa isyarat hanya orang tua atau ibunya. Sangat tidak mungkin apabila orang tua atau ibu korban harus disertifikasi terlebih dahulu sebelum ke pengadilan.

Masalah lain ditemukan pada pendamping korban atau organisasi difabel. Beberapa dari mereka tidak mau bekerja sama satu dengan yang lain. Penanganan kasus cenderung diklaim menjadi milik lembaga tertentu. Ini menjadikan penanganan kasus tidak optimal. Cenderung berdiri sendiri-sendiri. Ini tentu saja merugikan banyak pihak, termasuk korban.

Dari pihak pemerintah, dalam hal ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ternyata juga menemui kendala. Lembaga ini belum mempunyai *Standart Operational Procedure* (SOP) khusus, berkaitan dengan penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum. Bahkan ada temuan pada sebuah kabupaten, lembaganya sama sekali tak berfungsi. Secara otomatis, penuntasan kasus difabel berhadapan dengan hukum menjadi terhambat.

Kendala juga dihadapi dan dialami oleh seorang pendidik yang merupakan guru SLB. Sedianya ia akan memperjuangkan hak difabel yang menjadi korban. Masalahnya justru ia tak memperoleh dukungan dari pihak sekolah dan rekan sejawat. Sikapnya yang tegas dalam memperjuangkan hak-hak difabel, yang *notabene* adalah anak didiknya sendiri, justru dianggap “pemberontak”. Kepala sekolahnya lebih cenderung ingin menjaga citra baik dibandingkan memperjuangkan keadilan. Hal yang sama juga dialami oleh seorang aparat desa. Sebagian dari

aparatus di desa itu menganggap bahwa masalah hukum adalah aib. Tidak perlu dibuka di hadapan khalayak umum.

### C. Peluang Guna Mendorong Penyelesaian Kasus

Selama dua kali penyelenggaraan FGD, ditemukan peluang dan terobosan agar penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum menjadi lebih matang. Penggalan terhadap peserta FGD terkait hal ini, dapat ditinjau dalam tabel berikut.

<b>Korban, Keluarga Korban dan Masyarakat</b>	<b>Aparat Penegak Hukum</b>
<p>Adanya komitmen korban dan keluarga korban dalam menuntaskan kasus hukum sampai berkekuatan hukum tetap. Kemenangan korban ini acapkali didukung faktor masyarakat di sekitarnya.</p> <p>Mereka mendukung penuntasan kasus, di samping adanya pendamping korban yang setia dan konsisten mendampingi korban dan keluarganya, bahkan sampai dengan pendampingan paska kasus sudah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Hal lain adalah ada kemenangan korban dan keluarganya yang bisa “menurunkan” pejabat publik di tingkat dusun yang menjadi pelaku kekerasan seksual sebagai efek jera bagi pelaku.</p>	<p>Pemeriksaan korban dilakukan di tempat yang nyaman bagi korban dan tidak harus di kantor kepolisian.</p>

Adanya solidaritas masyarakat yang masih terbangun, apalagi terhadap kasus yang sering “diping-pong” oleh aparat penegak hukum. Ada sebagian masyarakat, juga didukung aparat tingkat desa, yang bahkan sampai menyatakan, “Kalau hukum negara tidak bekerja, ya hukum kampung yang bekerja”.

Ini akhirnya berdampak pada upaya kepolisian untuk “bergerak” menyelesaikan kasus. Selain itu, peluang juga dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini P2TP2A dan pemerintah desa.

P2TP2A adalah forum koordinasi berbagai pihak dalam agenda penuntasan kasus difabel berhadapan dengan hukum.

Kelembagaan ini menjadi peluang kerjasama lintas lembaga termasuk dengan aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus difabel berhadapan dengan hukum.

Sudah adanya pengadilan yang menerapkan aksesibilitas dalam pelayanan difabel berhadapan dengan hukum.



<p>Adanya komitmen kepala daerah dalam mendukung penuntasan kasus difabel berhadapan dengan hukum. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi efektif dengan lintas lembaga dan penegak hukum.</p>	<p>Adanya respon positif dari aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa dan hakim. Mereka bersedia membuka komunikasi dengan pendamping dalam menyamakan persepsi tentang difabel berhadapan dengan hukum yang memiliki hak-hak layanan hukum berkeadilan yang setara dengan warga negara yang lain.</p>
<p>Ini berdampak pada kasus dapat dituntaskan hingga pengadilan dan vonis yang berat bagi pelakunya. Di samping itu, ada jaminan kesehatan di daerah, termasuk Jamkesmas yang dapat dipakai untuk mendukung layanan kesehatan bagi korban.</p>	<p>Adanya aparat kepolisian (setingkat polres) yang telah membuat kesepakatan (<i>MoU</i>) dengan pemerintah daerah. Kesepakatan ini bersifat lintas lembaga dalam penuntasan kasus difabel berhadapan dengan hukum. Di dalamnya termasuk layanan kesehatan dengan rumah sakit dan layanan perlindungan sosial dengan dinas sosial serta kerjasama optimal dengan pendamping, dalam hal ini organisasi disabilitas.</p>

	<p>Adanya Peraturan Menteri Sosial No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Provinsi dan Kabupaten. Dengan demikian, layanan pemerintah daerah dapat ditransformasikan ke layanan tunai, dalam hal ini melalui dinas sosial dan non tunai, dalam hal ini layanan kesehatan di rumah sakit.</p>
	<p>Adanya terobosan hakim yang memberi peluang menggunakan juru bahasa untuk membantu disabilitas tuli yang menjadi saksi dan korban di pengadilan. Bahkan memakai media, baik tulisan, gambar dan <i>slide</i> untuk menerjemahkan.</p>
	<p>Peluang pemaknaan dan kriteria untuk penterjemah. Kualifikasinya tidak harus bersertifikat tetapi pandai bergaul dan bisa berkomunikasi efektif dengan korban. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 178 KUHP</p>

	Terkait dengan Surat Edaran dari Dirjen Badilag No.23L.a/DiA/HM.00/II/2012 tentang Perhatian kepada Disabilitas yang berisi aksesibilitas fisik. Dalam hal ini ada kewajiban badan peradilan untuk menyediakan sarana prasarana yang aksesibel, termasuk bangunan.
--	--

#### **D. Rekomendasi Penanganan Kasus**

Setelah melihat beberapa hambatan, masalah dan peluang dan yang ada dalam penanganan kasus, ada beberapa butir rekomendasi yang bisa ditemukan. Rekomendasi itu ditujukan pada tiga pihak yang saling terkait, yaitu aparat penegak hukum, negara atau pemerintah serta masyarakat, termasuk dalam hal ini korban dan keluarganya.

## Rekomendasi

Aparat Penegak Hukum	Negara atau Pemerintah	Masyarakat
Adanya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, berupa <i>training</i> atau pelatihan terhadap aparat penegak hukum terkait Undang-Undang Difabel dan kebijakan terkait disabilitas, termasuk peraturan daerah yang mengatur difabel).	Negara mendorong adanya peraturan terkait peradilan bagi difabel berhadapan dengan hukum yang terintegritasi dan berdasarkan hak asasi manusia.	Ada komunikasi dan koordinasi efektif di tingkat desa di antara korban, keluarga, masyarakat dan aparat pemerintah dalam menuntaskan kasus difabel berhadapan dengan hukum.
Aparat penegak hukum lebih proaktif dalam menangani kasus difabel berhadapan dengan hukum.	Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi FPK2PA dalam penuntasan kasus difabel berhadapan dengan hukum.	Ada pendampingan terhadap korban dan keluarga sampai paska putusan pengadilan.

Mengembangkan sistem pengaduan <i>online</i> dan konsultasi hukum terkait difabel berhadapan dengan hukum.	Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi FPK2PA dalam penuntasan kasus difabel berhadapan dengan hukum.	
<p>Terbentuknya Sistem Penanganan Penyandang Disabilitas (SPPD) yang komprehensif dan berkeadilan (termasuk dorongan ke Mahkamah Agung agar menerbitkan peraturan Mahkamah Agung berkaitan dengan disabilitas berhadapan dengan hukum.</p> <p>Ini menjadi langkah kedua setelah Mahkamah Agung berhasil menerbitkan peraturan terkait penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum.</p>	Layanan gratis terhadap difabel korban kekerasan dari Puskesmas sampai RSUD dan RSUP.	Ada pendidikan atau pelatihan hukum bagi keluarga korban, masyarakat dan pendamping agar menjadi bekal berharga dalam berpartisipasi optimal dalam penuntasan kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum.

<p>Aparat penegak hukum terbuka dalam memberikan keadilan atau pelayanan secara adil gender.</p>	<p>Sosialisasi kebijakan perlindungan difabel sampai ke tingkat desa dan dusun serta pendataan yang valid tentang disabilitas di desa. Hal ini ditambah dengan adanya lembaga layanan disabilitas di tingkat desa.</p>	
<p>Menambah struktur dalam unit PPA menjadi PPA dan Disabilitas, serta kebutuhan <i>profile assesment</i> dalam penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum.</p>	<p>Pendidikan Hak Asasi Manusia bagi para pendidik, termasuk guru-guru SLB.</p>	

## **BAB VII**

# Kesimpulan dan Rekomendasi

### **A. Kesimpulan**

1. Sudah muncul aturan mengenai perlindungan difabel. Hanya saja masih terdapat beberapa yang kurang cocok. Diperlukan aturan hukum yang saling mendukung satu sama lain. Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masih memerlukan penerbitan peraturan pelaksanaannya. Ada belasan peraturan pemerintah yang diamanatkan untuk segera dirampungkan pemerintah. Dari sisi penegakan hukum, Mahkamah Agung musti menyusun dan memberlakukan peraturan tentang difabel yang berhadapan dengan hukum. Ini harus segera diwujudkan lantaran hakim terutama, masih merujuk pada KUHP yang minim perlindungannya terhadap difabel.

2. Hakim masih terbelenggu pada formalitas pekerjaan di peradilan. Diantara mereka juga masih banyak yang belum memiliki pengetahuan soal difabel. Padahal ada kebutuhan khusus yang musti dipersiapkan ketika berhadapan dengan difabel. Kejadian ini mengakibatkan banyak hak difabel yang terlanggar di pengadilan. Hakim juga belum meletakkan *profile assessment* sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan.

3. Difabel masih mengalami kerentanan psikologis. Ketika menemui masalah, difabel kurang mendapatkan dukungan, baik moral maupun materiil, dari anggota keluarga, masyarakat, bahkan dari aparat desa. Hal ini ditambah dengan minimnya ketersediaan tenaga ahli dan penerjemah ketika difabel berhadapan dengan hukum.

<b>Faktor yang Berpengaruh pada Penyelesaian Kasus Difabel yang Berhadapan dengan Hukum</b>
Lemahnya instrumen hukum yang memberi landasan bagi penguatan akses keadilan difabel. Oleh karena itu, pembaharuan dan pembentukan instrumen hukum bagi pemenuhan hak-hak difabel dalam proses peradilan, mutlak diperlukan.
Adanya keterbatasan sumber daya serta sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya guna menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak difabel. Dibutuhkan komitmen kuat dari pengambil kebijakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kapabilitas aparat penegak hukum agar mereka lebih baik lagi dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum.



Dukungan dari masyarakat dan keluarga difabel masih minim, termasuk dari aparat pemerintah desa atau dusun dimana difabel berdomisili. Bahkan seringkali merekalah yang memaksakan kehendak untuk “penyelesaian damai” dalam kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum.

## B. Rekomendasi

1. Khusus bagi aparat penegak hukum, mereka memerlukan penguatan kapasitas serta rencana strategis terkait dengan kebijakan difabel yang berhadapan dengan hukum. Termasuk soal cara pandang. Aparat penegak hukum sebaiknya mulai menyadari bahwa melayani penyandang disabilitas itu bukan sebuah *charity* atau belas kasihan, tetapi merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Mereka juga diharapkan lebih pro aktif dalam menangani kasus serta membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Pemerintah diharapkan memberikan anggaran lebih besar untuk bantuan hukum. Paket bantuan hukum juga diperluas. Tidak hanya kepada masyarakat miskin, tetapi juga ke masyarakat yang lebih rentan. Dengan begitu, khusus penanganan difabel, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya, difabel berhak mendapatkan pendamping sesuai dengan disabilitasnya. Pengadaan sarana prasarana, termasuk ruang tahanan, menjadi lebih ramah pada difabel.

3. Pemerintah diharapkan membangun sistem penanganan yang tertata rapi. Dalam hal ini, termasuk menata kembali lembaga-lembaga yang ada agar bekerja secara efektif dan efisien.

### Sistem Penanganan yang Bisa Dikembangkan

Pelembagaan unit PPA dan disabilitas di kepolisian.
Mendorong tanggungjawab pemerintah daerah dukungan pada korban, termasuk daya dukung anggaran.
Mendorong negara, aparat penegak hukum dan institusi, menghadirkan penerjemah untuk aksesibilitas peradilan.
Payung hukum berkaitan usia kalender dan usia mental.
Penyeragaman <i>Standart Operational Procedure</i> (SOP) penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum dari pusat sampai dengan daerah.
Memperberat ancaman pelaku yang korbannya difabel, apalagi pelakunya tokoh masyarakat, bisa ditambah dengan 1/3 ancaman hukuman.
Negara menyediakan tempat rehab yang terpisah antara pelaku dan korban.

4. Memperkuat pendampingan dan mengembangkan komunikasi dan koordinasi efektif di tingkat desa. Ini dilakukan diantara korban, keluarga, masyarakat dan aparat pemerintah dalam menuntaskan kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum.

5. Memastikan adanya pemulihan bagi korban baik fisik, psikis dengan biaya negara dan juga ada *shelter* selama proses hukum dengan melibatkan masyarakat.

# Daftar Pustaka

- Endang Ekowarni, 2104. “Perempuan Difabel Kemana Mencari Perlindungan Hukum” dalam M. Syafiie, dkk, *Potret Difabel berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: SIGAB.
- Fajri Nursyamsi, dkk. 2015. *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*, Jakarta: PSHK.
- Hari Kurniawan dkk. 2015. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: Pusham UII.
- Janet E. Lord et al. 2012. *Human Rights Yes! Action and Advocacy on the Rights of Persons with Disabilities*, 2nd edition, Minneapolis: University of Minnesota Human Rights Center.
- Jerome Frank, 2013. *Hukum & Pemikiran Modern* (terjemahan), Bandung: Nuansa Cendekia.
- J. Djohansjah, 2010. “Akses Menuju Keadilan”, makalah Disampaikan Pada Pelatihan HAM Bagi Jejaring Komisi Yudisial Bandung, 3 Juli 2010 diselenggarakan oleh Pusham UII, Komisi Yudisial, dan NCHR.

- M. Syafi'ie-Purwanti-Mahrus Ali. 2014. *Potret Difabel berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: SIGAB.
- M. Syafi'ie, 2015. "Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif kepada Difabel", *Jurnal Difabel* edisi II.
- Noviani Arum Lestari, 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila: Studi Putusan Nomor 244/Pid.2013/P.T Smg*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nurul Qamar, 2012. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Puguh Windrawan (ed), 2015. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Reza Banakar dan Max Travers, 2005. *Theory and Methods in Socio-Legal Research*, Oxford: Hart.
- Soetandyo Wignjosoebroto, tanpa tahun. "Mengkaji dan Meneliti Hukum dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial", artikel lepas.
- Siti Salmiah, 2010. *Retardasi Mental*, Medan: Universitas Sumatera Utara
- Sri Hastuti PS, 2005. "Perlindungan HAM dalam Empat Konstitusi Di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum* No. 1 Vol. 1 Januari 2005, Universitas Islam Indonesia hlm 21-23
- Stephanie Ortoleva, 2011. "Inaccessible Justice: Human Rights, Persons with Disabilities and the Legal System" *ILSA Journal of International & Comparative Law*, Vol. 17:2.
- Takdir Rahmadi, 2011. "Akses Menuju Keadilan", Makalah disampaikan pada: Pernerkuatan pemahaman hak asasi manusia untuk hakim seluruh Indonesia di Hotel Grand

Angkasa Medan, 2 - 5 Mei 2011 dan diselenggarakan oleh Pusham UII, Komisi Yudisial, dan NCHR.

Theresia Degener, 2005. "A Global Comparison of Anti Discrimination Laws", dalam Anna Lawson and Caroline Gooding (ed), *Disability Rights in Europe From Theory to Practice*, Oregon: Hard Publishing.

Yahya Harapah, 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang  
Disabilitas

# Biografi

## **Penulis**

1. **Johanes Widijantoro, S.H., M.H** : dosen tetap Fakultas Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta dan menjadi anggota Pusat Studi HAM dan Demokrasi Univ. Atma Jaya Yogyakarta.
2. **M. Syafi'ie, S.H., M.H** : Dosen Fakultas Hukum UII, Peneliti Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Pusham UII, dan Pusat Studi Hukum (PSH)
3. **Tri Wahyu** : Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM) dan mantan Direktur Forum LSM
4. **Sarli Zulhendra, S.H., M.H.** : Pengacara dan Pendamping Hukum

## **Tim Peneliti**

1. **Purwanti** : Koordinator Advokasi dan Jaringan SIGAB, Trainer Disability dan Paralegal
2. **M. Bahjadul Ulumudin** : Staf Advokasi dan Jaringan SIGAB dan Paralegal

3. **Himawan Sutanto** : Staf Advokasi dan Jaringan SIGAB dan Paralegal
4. **Roby Solahudin** : Paralegal Kota Yogyakarta
5. **Tutik Kurniawati** : Paralegal Kabupaten Gunung Kidul
6. **Yulianto** : Paralegal Kabupaten Bantul